LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2024

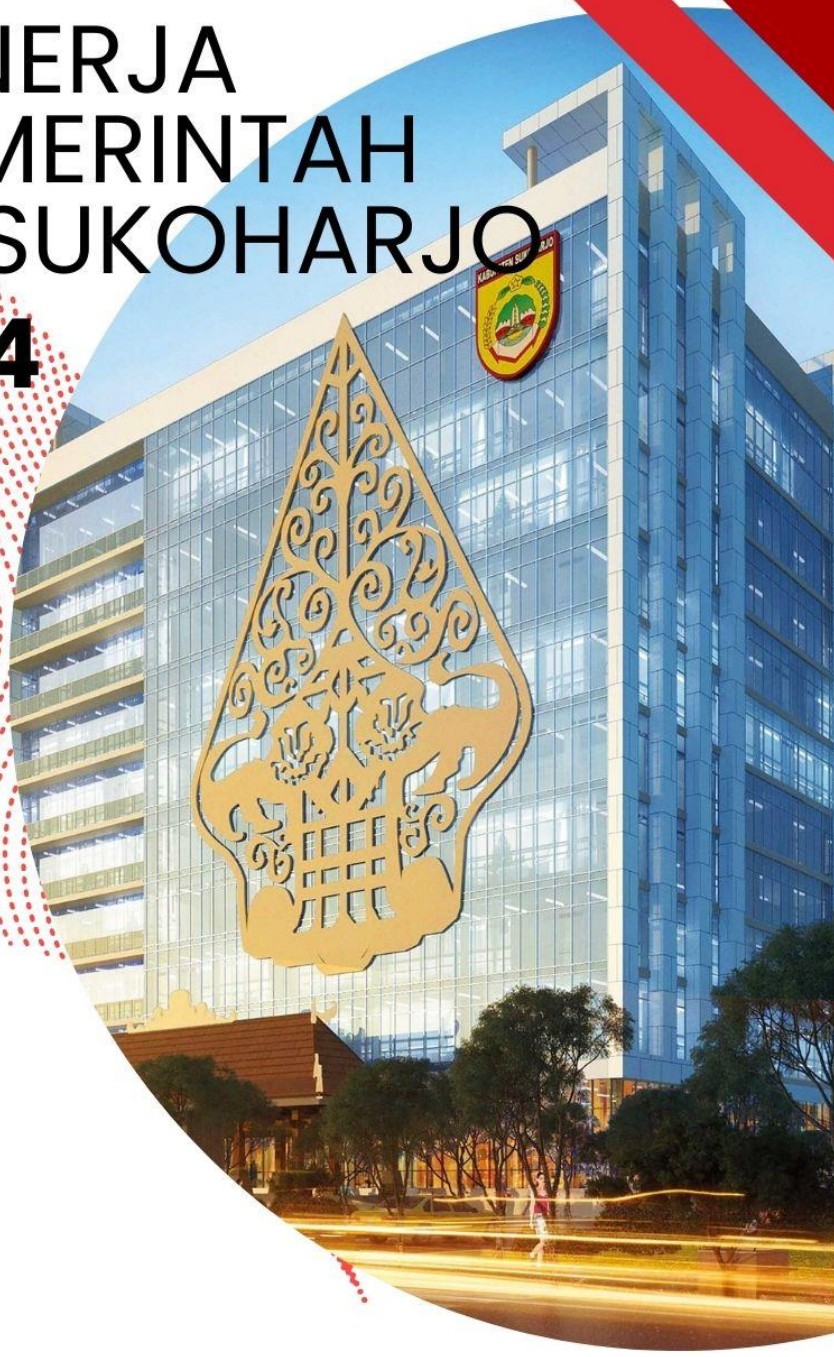

BAGIAN ORGANISASI - SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
Gedung Menara Wijaya lantai 8-9,
Jl. Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068 fax (0271) 593335
www.organisasi.sukoharjokab.go.id e-mail: bagorganisasi@sukoharjokab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab Manajemen Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sukoharjo, 29 Maret 2025

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO INSPEKTORAT DAERAH

ABDUL HARIS WIDODO, S.IP., M.Si., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP 19680606 198903 1 011

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadlirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingukungan pemerintah .

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sukoharjo, Maret 2025

BUPATI SUKOHARJO,

Hj. ETIK SURYANI, S.E, M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR viii
IKHTISAR EKSEKUTIF x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Gambaran Umum Kabupaten Sukoharjo 2
1. Kondisi Geografis 2
2. Kondisi Demografis 4
3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah 5
C. Fungsi Strategis Pemerintah Kabupaten 6
1. Sekretariat Daerah 8
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 8
3. Inspektorat Daerah 9
4. Dinas Daerah 9
5. Badan Daerah 10
6. Kecamatan 10
D. Kondisi Aparatur Sipil Negara 11
E. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama 12
F. Arah Kebijakan Tahun 2024 14
BAB II PERENCANAAN KINERJA 15
A. Rencana Strategis 15
1. Visi dan Misi 15
2. Tujuan dan Sasaran 17
3. Strategi dan Arah Kebijakan 19
B. Indikator Kinerja Utama 25
C. Perjanjian Kinerja 26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 31
A. Pengukuran Kinerja 31
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 32
1) Tujuan pertama : Terwujudnya tata kepemerintahan yang profesional 32
2) Tujuan kedua : Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter. 51
3) Tujuan ketiga : Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan insklusif. 82
4) Tujuan keempat : Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. 106
5) Tujuan kelima : Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman. 128
C. Capaian IKU, Anggaran dan Realisasi 136

D. Akuntabilitas Keuangan 137
1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 137
2. Realisasi Anggaran 139
E. Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia 146
F. Penghargaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 147
BAB IV PENUTUP 148
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja 148
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang 150
LAMPIRAN 152
A. Perjanjian KInerja 152

DAFTAR TABEL

Tabel 1.B.1	Luas Wilayah per Recamatan di Kabupaten Sukoharjo ……..…	3
Tabel 1.B.2	Pembagian Wilayah Administrasi di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 ..	3
Tabel 1.B.3	Rekapitulasi Data Kependudukan per Kecamatan Tahun 2024 …….	4
Tabel 1.B.4	Pertumbuhan Jumlah Penduduk Tahun 2017-2024 …….	4
Tabel 1.D.1	Jumlah PNS Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Eselon …….	12
Tabel II.A.1	Matrik Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo	17
Tabel II.A.2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 ……..……..	19
Tabel II.A.3	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2021-2026 ..	22
Tabel II.B.1	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sukoharjo ……..……	25
Tabel II.C.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 …….……	27
Tabel III.A.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah …..…….	32
Tabel III.B.1	Capaian Kinerja Tujuan 1 Terwujudnya Tata Kepemerintahan yang Profesional ……	32
Tabel III.B.1.1.1	Capaian Kinerja Sasaran 1.1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel …….	33
Tabel III.B.1.1.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 Sasaran 1.1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel ……..……	35
Tabel III.B.1.1.3	Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 1.1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel ……..…...…….	40
Tabel III.B.1.1.4	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 1.1 ……	49
Tabel III.B.2	Capaian Kinerja Tujuan 2 Terwujudnya Sumberdaya Manusia yang Sehat, Cerdas, Inovatif, dan Berkarakter …….....	51
Tabel III.B.2.1.1	Capaian Kinerja Sasaran 2.1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat ……..…….	53
Tabel III.B.2.1.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2024 Sasaran 2.1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat ……..…….	54
Tabel III.B.2.1.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Kabupaten/Kota sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Sasaran 2.1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat …….……..	54
Tabel III.B.2.1.4	Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 2.1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat …….……..	56
Tabel III.B.2.1.5	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2.1 ……	56

Tabel III.B.2.2.1	Capaian Kinerja Sasaran 2.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan ……..	57
Tabel III.B.2.2.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 Sasaran 2.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan …….....	58
Tabel III.B.2.2.3	Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2024 dengan Target RPJMD Sasaran 2.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan …….....	60
Tabel III.B.2.2.4	Perbandingan Realisasi rata-rata Lama Sekolah antara Eks Karesidenan Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Tingkat Nasional ……	61
Tabel III.B.2.2.5	Perbandingan Realisasi Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo dengan Eks Karesidenan Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Tingkat Nasional ……	62
Tabel III.B.2.2.6	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2.2 ……	62
Tabel III.B.2.3.1	Capaian Kinerja Sasaran 2.3 Meningkatnya Pengendalian Penduduk …...	63
Tabel III.B.2.3.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024 Sasaran 2.3 Meningkatnya Pengendalian Penduduk …….....	64
Tabel III.B.2.3.3	Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 2.3 Meningkatnya Pengendalian Penduduk	66
Tabel III.B.2.3.4	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2.3 ……	67
Tabel III.B.2.4.1	Capaian Kinerja Sasaran 2.4 Meningkatnya Akses dan Kualitas Hidup, Perlindungan terhadap Perempuan, Anak, Keseteraan Gender dan Pemuda …….……	68
Tabel III.B.2.4.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024 Sasaran 2.4 Meningkatnya Akses dan Kualitas Hidup, Perlindungan terhadap Perempuan, Anak, Kesetaraan Gender dan Pemuda ……...……	69
Tabel III.B.2.4.3	Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 2.4 Meningkatnya Akses dan Kualitas Hidup, Perlindungan terhadap Perempuan, Anak, Kesetaraan Gender dan Pemuda ……	71
Tabel III.B.2.4.4	Perbandingan Realisasi Nilai IPP Kabupaten Sukoharjo dengan Provinsi Jawa Tengah dan Tingkat Nasional …….....	72
Tabel III.B.2.4.5	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2.4 ……	73
Tabel III.B.2.5.1	Capaian Kinerja Sasaran 2.5 Meningkatnya Kearifan Budaya Lokal …….	74
Tabel III B.2.5.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 Sasaran 2.5 Meningkatnya Kearifan Budaya Lokal ……	75
Tabel III.B.2.5.3	Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 2.5 Meningkatnya Kearifan Budaya Lokal ..	76
Tabel III.B.2.5.4	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2.5 ……	76
Tabel III.B.2.6.1	Capaian Kinerja Sasaran 2.6 Meningkatnya Kualitas Hidup Penduduk Miskin ……	77

Tabel III.B.2.6.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 Sasaran 2.6 Meningkatnya Kualitas Hidup Penduduk Miskin ……..	79
Tabel III.B.2.6.3	Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 2.6 Meningkatnya Kualitas Hidup Penduduk Miskin …….	80
Tabel III.B.2.6.4	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Lain ……	80
Tabel III.B.2.6.5	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2.6 ……	81
Tabel III.B.3	Capaian Kinerja Tujuan 3 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Insklusif …….	82
Tabel III.B.3.1.1	Capaian Kinerja Sasaran 3.1 Meningkatnya Pertumbuhan Produktifitas …	86
Tabel III.B.3.1.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 Sasaran 3.1 Meningkatnya Pertumbuhan Produktifitas …….	89
Tabel III.B.3.1.3	Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 3.1 Meningkatnya Pertumbuhan Produktifitas ……..……...	97
Tabel III.B.3.1.4	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 3.1 ……	98
Tabel III.B.3.2.1	Capaian Kinerja Sasaran 3.2 Meningkatnya Kemandirian Desa ……..	102
Tabel III.B.3.2.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 Sasaran 3.2 Meningkatnya Kemandirian Desa ……..…	102
Tabel III.B.3.2.3	Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 3.2 Meningkatnya Kemandirian Desa ……	104
Tabel III.B.3.2.4	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 3.2 ……	105
Tabel III.B.4	Capaian Kinerja Tujuan 4 Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan ……...	107
Tabel III.B.4.1.1	Capaian Kinerja Sasaran 4.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur …….…	111
Tabel III.B.4.1.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024 Sasaran 4.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur ……..……	112
Tabel III.B.4.1.3	Capaian Indeks Layanan Infrastruktur …….……	112
Tabel III.B.4.1.4	Indeks Fatalitas Tahun 2022 – 2024 …….	114
Tabel III.B.4.1.5	Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 4.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur …….	116
Tabel III.B.4.1.6	Sumber Dana Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2024 …….	117
Tabel III.B.4.1.7	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 4.1 ……...	118
Tabel III.B.4.2.1	Capaian Kinerja Sasaran 4.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan ……..	120
Tabel III.B.4.2.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 Sasaran 4.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan ……..……	121
Tabel III.B.4.2.3	Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 4.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan …...	123

Tabel III.B.4.2.4	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 4.2 ……	127
Tabel III.B.5	Capaian Kinerja Tujuan 5.1 Terwujudnya Masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman ……..…….	129
Tabel III.B.5.1	Realisasi Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum ……..…….	129
Tabel III.B.5.1.1	Capaian Kinerja Sasaran 5.1 Meningkatnya Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat ……...……...	130
Tabel III.B.5.1.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 Sasaran 5.1 Meningkatnya Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat ……...	131
Tabel III.B.5.1.3	Cakupan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ……...	131
Tabel III.B.5.1.4	Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 5.1 Meningkatnya Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat …….....	132
Tabel III.B.5.1.5	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 5.1 ……	132
Tabel III.B.5.2.1	Capaian Kinerja Sasaran 5.2 Meningkatnya Kesatuan Bangsa dan Negara ……...……...	133
Tabel III.B.5.2.2	P Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 Sasaran 5.2 Meningkatnya Kesatuan Bangsa dan Negara ..……..	133
Tabel III.B.5.2.3	Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 5.2 Meningkatnya Kesatuan Bangsa dan Negara ……..	134
Tabel III.B.5.2.4	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 5.2 ……...	135
Tabel III.C.1	Capaian IKU,Anggaran dan Realisasi …….…….	136
Tabel III.D.1	Perbandingan Capaian Indikator dan Prosentase Realisasi Anggaran …..	138
Tabel III.D.2	Ringkasan APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 (unaudited) …….……..	140
Tabel III.D.3	Kebijakan Pendapatan – Target Pendapatan Tahun 2024 ……...	142
Tabel III.D.4	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 (unaudited) …….....	142
Tabel III.D.5	Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024 …….....	143
Tabel III.D.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 ……..	145
Tabel III.E.1	Jumlah Bezzeting dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 …….……..	146
Tabel III.F.1	Penghargaan dan Prestasi yang diraih Tahun 2024 ……..	147
Tabel IV.A.1	Prosentase Capaian Kinerja per Sasaran ……..……..	149

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.B.1	Peta Kabupaten Sukoharjo ……..…….	2
Gambar I.D.1	Distribusi ASN Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Tingkat Pendidikan …	11
Gambar III.B.1.1.1	Perbandingan Nilai IKM Kabupaten Sukoharjo dengan Provinsi dan Kabupaten Sekitar Tahun 2024 ……	41
Gambar III.B.1.1.2	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 ……	41
Gambar III.B.1.1.3	Perbandingan Indeks SPBE Kabupaten Sukoharjo dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024 …….	43
Gambar III.B.1.1.4	Perbandingan Nilai AKIP Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024 ……..……...	44
Gambar III.B.1.1.5	Perbandingan RKFD Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024 …….....	45
Gambar III.B.1.1.6	Perbandingan Indeks Sistem Merit Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024* ……..……	46
Gambar III.B.1.1.7	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019-2024 ……..……..…….	47
Gambar III.B.1.1.8	Perbandingan Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024 ……...……..	48
Gambar III.B.2	Angka Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo dari Tahun 2020 s.d 2024 ……	52
Gambar III.B.2.3.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019-2024 ……	65
Gambar III.B.2.3.2	Perbandingan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sukoharjo dengan Provinsi dan Nasional …….	66
Gambar III.B.2.4.1	Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024* ……..……...	72
Gambar III.B.3.1	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar …….	84
Gambar III.B.3.2	PDRB Per Kapita Tahun 2022 s.d 2024 ……..…….……...	85
Gambar III.B.3.1.1	Perbandingan Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar …….……..	90
Gambar III.B.3.1.2	Perbandingan Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Kabupaten Sukoharjo dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kota Sekitar ……	91
Gambar III.B.3.1.3	Realisasi Investasi di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan LKPM Tahun 2022 s.d 2024 …….……..	92
Gambar III.B.3.1.4	Perbandingan Realisasi Investasi Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar …….	93

Gambar III.B.3.1.5	Perbandingan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota Sekitar ……..……...	94
Gambar III.B.3.1.6	Perbandingan Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar …….	95
Gambar III.B.3.1.7	Perbandingan Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota lain dan Provinsi Jawa Tengah ……...	96
Gambar III.B.3.2.1	Perbandingan Indeks Desa Membangun Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar …….	105
Gambar III.B.4.1	Perbandingan IKLH Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024 ……...	109
Gambar III.B.4.2	Perbandingan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar, dan Provinsi Jawa Tengah ……	110
Gambar III.B.4.1.1	Perbandingan Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Sukoharjo dengan Provinsi Jawa Tengah …….	116
Gambar III.B.4.2.1	Perbandingan Indeks Kualitas Air Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024 ……..	124
Gambar III.B.4.2.2	Perbandingan Indeks Kualitas Air Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024 ……...…….	125
Gambar III.B.4.2.3	Perbandingan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024 ……	126
Gambar III.B.4.2.4	Perbandingan Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota sekitar Tahun 2024 ……..……	127

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rumusan visi Kabupaten Sukoharjo dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 adalah:

"MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR"

Adapun misi Kabupaten Sukoharjo, sesuai Peraturan Daerah di atas adalah: 1)Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan Reformasi Birokrasi; 2)Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas; 3)Memperkuat perekonomian rakyat yang berdaya saing tinggi; 4)Memperkuat pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan; dan 5)Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan keagamaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi ditetapkan strategi sebagai tahapan untuk mencapai tujuan spesifik dan tertentu. Selanjutnya untuk menuntun upaya tercapainya tujuan spesifik itu diperlukan arah kebijakan yang jelas dan terarah. Arah Kebijakan yang ditetapkan pada RPJM Daerah Kabupaten Sukoharjo, tahun 2024 ditujukan pada "Penguatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah", dengan prioritas daerah diarahkan pada: 1) Penguatan Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, Nilai Tambah dan Daya Saing Perekonomian; 2. Penguatan Pengurangan Kemiskinan; 3. Penguatan kepemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang professional dan netral; 4. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing; 5. Penguatan Infrastruktur Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan dan Penguatan Ketahanan Bencana; 6. Peningkatan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 7. Kerjasama regional, Kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerjasama dengan komponen masyarakat; 8. Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk scenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045.

Penilaian terhadap capaian sasaran berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh data sebagai berikut :

Prosentase Capaian Kinerja per Sasaran

Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian	Kategori
1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	6	96,16%	**Baik**
2.1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	100,18%	**Sangat Baik**
2.2 Meningkatnya kualitas pendidikan	2	100,81%	**Sangat Baik**
2.3 Meningkatnya pengendalian penduduk	1	140,23%	**Sangat Baik**
2.4 Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda	2	105,64%	**Sangat Baik**
2.5 Meningkatnya kearifan budaya lokal	1	145,14%	**Sangat Baik**
2.6 Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin	2	89,79%	**Baik**
3.1 Meningkatnya pertumbuhan produktifitas	8	76,15%	**Baik**
3.2 Meningkatnya kemandirian desa	1	103,22%	**Sangat Baik**
4.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur	4	120,71%	**Sangat Baik**
4.2 Meningkatnya kualitas lingkungan	4	104,49%	**Sangat Baik**
5.1 Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	1	99,87%	**Baik**
5.2 Meningkatnya kesatuan bangsa dan bernegara	1	100%	**Sangat Baik**

*Adapun berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 13 Sasaran Strategis Pemerintah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo disimpulkan bahwa 9 Sasaran dikategorikan **"Sangat Baik"** dan 4 Sasaran dikategorikan **"Baik".***

Permasalahan teknis yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di antaranya: 1) Dalam pencapaian di beberapa sasaran strategis masih jumpai adanya kendala baik berupa keterbatasan sumber daya yang ada, baik sumber daya aparatur, alokasi anggaran maupun sarana dan prasarana dan 2) Permasalahan yang terkait dengan faktor ekternal seperti adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat, dan faktor iklim dan cuaca serta geopolitik yang turut mempengaruhi pencapaian sasaran strategis.

Solusi pemecahan masalah yang diharapkan dapat memberikan perbaikan-perbaikan kinerja ke depan adalah: melakukan terobosan-terobosan dalam rangka menyediakan sumber daya yang memadai, seperti mengupayakan bantuan alokasi dana dari pemerintah pusat, ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas sumberdaya aparatur dan lain-lain; meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam setiap tahapan pelaksanan pembangunan, seperti misalnya dengan menyelenggarakan forum Perangkat Daerah, dan mengoptimalkan pengembangan e-Gov melalui pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan mulai dari e-planning, e-budgeting, dan e-monev dalam kegiatan proses penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan maupun monitoring dan evaluasi.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan pemerintahan negara meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut regulasi tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Mendasarkan pada regulasi tersebut di atas Bupati/Walikota berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut merupakan media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang ditetapkan. Penyusunan kinerja juga dapat dijadikan sebagai alat kendali, instrumen penilaian kinerja dan

mendorong terwujudnya *good governance*, serta dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertangunggjawaban kepada publik.

B. Gambaran Umum Kabupaten Sukoharjo

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Sukoharjo terletak pada posisi 110° 42 ’06.79” Bujur Timur - 110° 57’ 33,70” Bujur Timur dan antara 7° 32’ 17.00” Lintang Selatan - 7° 49’ 32.00” Lintang Selatan, dengan batas wilayah meliputi :

Sebelah Timur	: Kabupaten Karanganyar
Sebelah Selatan	: Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Sebelah Barat	: Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten

Kabupaten Sukoharjo memiliki luas wilayah keseluruhan sebesar 46.666 Ha atau sekitar 1,43% luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara rinci luas kecamatan di Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

Gambar I.B.1
Peta Kabupaten Sukoharjo

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo

Tabel 1.B.1
Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	Luas (km^2)	Persentase (%)
1	Weru	41,98	9,00
2	Bulu	43,86	9,40
3	Tawangsari	39,98	8,57
4	Sukoharjo	44,58	9,55
5	Nguter	54,88	11,76
6	Bendosari	52,99	11,36
7	Polokarto	62,18	13,32
8	Mojolaban	35,54	7,62
9	Grogol	30,00	6,43
10	Baki	21,97	4,71
11	Gatak	19,47	7,17
12	Kartasura	19,23	4,12
Total		466,66	100

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo

Secara administrasi Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri atas 150 desa dan 17 kelurahan, 1.963 Dukuh, 473 Kebayanan, 4.684 Rukun Tetangga dan 1.473 Rukun Warga dengan Ibukota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Bendosari yang berjarak 12 km dari Kota Surakarta. Pembagian wilayah administrasi per kecamatan di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.B.2
Pembagian Wilayah Administrasi di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2024

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	RT	RW
1.	Weru	13	398	137
2.	Bulu	12	245	102
3.	Tawangsari	12	320	115
4.	Sukoharjo	14	476	145
5.	Nguter	16	352	122
6.	Bendosari	14	326	110
7.	Polokarto	17	382	125
8.	Mojolaban	15	547	162
9.	Grogol	14	616	191
10.	Baki	14	366	111
11.	Gatak	14	262	92
12.	Kartasura	12	452	116
Jumlah		**167**	**4.742**	**1.528**

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo

2. Kondisi Demografis

Dengan luas wilayah sebesar 466,66 km^2 terdapat 911.745 jiwa penduduk. Berikut jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo berdasarkan jenis kelamin per kecamatan:

Tabel 1.B.3
Rekapitulasi Data Kependudukan Per Kecamatan Tahun 2024

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Weru	28.865	29.045	57.910
2	Bulu	18.835	18.344	37.179
3	Tawangsari	28.673	28.322	56.995
4	Sukoharjo	50.061	50.118	100.179
5	Nguter	28.256	27.759	56.015
6	Bendosari	32.616	32.564	65.180
7	Polokarto	44.435	44.273	88.708
8	Mojolaban	46.560	46.682	93.242
9	Grogol	60.994	60.876	121.870
10	Baki	36.479	36.199	72.678
11	Gatak	27.258	27.274	54.532
12	Kartasura	55.305	56.679	111.984
Jumlah		**458.337**	**458.135**	**916.472**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo

Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 yang sebesar 904.862 jiwa, berarti ada kenaikan sebesar 0,76%. Adapun pertumbuhan penduduk dari Tahun sampai dengan Tahun 2023 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1.B.4
Pertumbuhan Jumlah Penduduk Tahun 2017-2024

Tahun	Laki-laki	Penduduk Perempuan	Jumlah	Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5
2017	449,309	443,860	893,169	-0.08
2018	450.627	448.147	898.774	0.62
2019	453.879	452.524	906.403	0.85
2020	455.805	454.219	910.024	0.39
2021	449.766	448.868	898.634	-1,25
2022	452.507	452.355	904.862	0.69
2023	455.919	455.826	911.745	0.76
2024	458.337	458.135	916.472	0.52

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo

3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mendasarkan pada prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. Tujuan dari pemberian otonomi tersebut adalah untuk memberdayakan daerah, dimana di dalamnya juga terkandung maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan peran serta masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo membagi tugas pemerintahan, kemasyarakatan dan pelayanan kepada seluruh Perangkat Daerah. Struktur organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sukoharjo sebagai berikut :

a. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Kecamatan;
b. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo;
c. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
d. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kelas B;

e. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
f. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah.

C. Fungsi Strategis Pemerintah Kabupaten

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo, terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah, terdiri dari :
   a. Sekretaris Daerah.
   b. Asisten Sekretaris Daerah, meliputi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum.
   c. Bagian-Bagian, meliputi Bagian Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

2. Sekretariat DPRD, terdiri atas Sekretaris DPRD, Bagian Rapat Risalah dan Perundang-Undangan, Bagian Anggaran dan Pengawasan, dan Bagian Umum dan Keuangan.
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Daerah, terdiri dari :
   a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   b. Dinas Kesehatan;
   c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
   e. Satuan Polisi Pamong Praja;
   f. Dinas Sosial;
   g. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   h. Dinas Pangan;
   i. Dinas Lingkungan Hidup;
   j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
   l. Dinas Perhubungan;
   m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
   n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
   o. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
   p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
   q. Dinas Pertanian dan Perikanan;
   r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan;
   s. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
5. Badan Daerah, terdiri dari :
   a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
   b. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
   c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
   e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

6. Pemerintahan Kecamatan terdiri dari 12 kecamatan yaitu Sukoharjo, Nguter, Bulu, Tawangsari, Weru, Bendosari, Polokarto, Mojolaban, Grogol, Baki, Gatak, dan Kartasura.

Tugas dan fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan staf ahli serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perumusan penyusunan kebijakan daerah;
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan daerah;
c. penyelenggaraan kebijakan daerah;
d. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan daerah;
e. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah;
g. pelayanan administrative dan pembinaan aparatur sipil Negara; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan; dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Dinas Daerah

Dinas Daerah mempunyai tugas mempunyai tugas membenatu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. **Badan Daerah**

Badan Daerah mempunyai tugas membantu bupati kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Daerah menyengenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. **Kecamatan**

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b. pengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. pengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. pengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. pengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
g. pembina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan

h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
i. pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan; dan
j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Kondisi Aparatur Sipil Negara

Salah satu instrumen pokok dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah aparatur sipil negara dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah ASN Kabupaten Sukoharjo keadaan per 1 Februari 2025 sebanyak 7.430 yang terdiri dari 5.495 PNS, 6 CPNS dan 1.929 PPPK. Adapun distribusi ASN Kabupaten Sukoharjo menurut pendidikan, sebagaimana tergambar pada gambar di bawah ini:

Gambar I.D.1
Distribusi ASN Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Tingkat Pendidikan

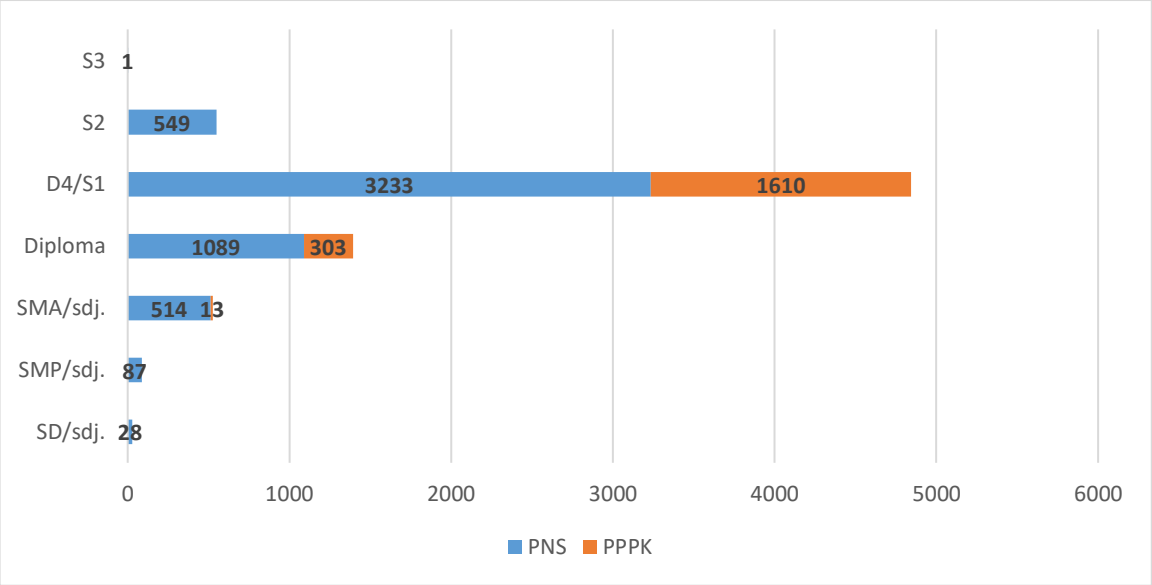

Sumber: BKPSDM Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa ASN Kabupaten Sukoharjo yang berpendidikan S3 sebanyak 1 PNS; S2 sebanyak 549 PNS; D4/S1 sebanyak 3.233 PNS dan 1.610 PPK; Diploma sebanyak 1.089 PNS dan 303 PPPK; SMA/sederajat sebanyak 514 PNS dan 13 PPPK; SMP/sederajat sebanyak 87 PNS; dan SD/sederajat sebanyak 28 PNS.

Jika dikelompokkan berdasarkan eselonering jabatan, maka jumlah pejabat struktural di Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1.D.1
Jumlah PNS Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Eselon

No.	Eselon	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Eselon II.A	1	0	1
2.	Eselon II.B	24	6	30
Jumlah Eselon II		**25**	**6**	**31**
3.	Eselon III.A	39	10	49
4.	Eselon III.B	72	16	88
Jumlah Eselon III		**111**	**26**	**137**
5.	Eselon IV.A	69	78	147
6.	Eselon IV.B	47	37	84
Jumlah Eselon IV		**116**	**115**	**231**
JUMLAH		**252**	**147**	**399**

Sumber data : BKPSDM Kabupaten Sukoharjo

Selanjutnya jika dilihat distribusi PNS berdasarkan eselon, maka sebaran PNS di Kabupaten Sukoharjo terdiri dari eselon II sebanyak 31 orang, eselon III sebanyak 137 orang dan eselon IV sebanyak 231 orang.

E. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

1. Aspek Strategis
   a. Lingkungan Internal
      1) Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
      2) Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai kapasitas sesuai bidang urusan yang diampu
   b. Lingkungan Eksternal
      1) Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan baik Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi, memberikan pedoman dan dasar yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
      2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat mendukung pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan.

3) Adanya dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat baik dukungan kebijakan maupun pendanaan untuk mengatasi permasalahan pembangunan.

2. Permasalahan Utama

Permasalahan pembangunan secara umum yang dihadapi oleh Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

a. Kualitas Sumber Daya Manuasia yang masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan pendidikan; kesehatan; pengendalian Penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; kesetaraan gender; perluasan akses, perlindungan, dan peningkatan kualitas hidup terhadap perempuan dan anak; penguatan keberdayaan pemuda terutama dalam menghadapi kondisi global yang semakin terbuka;
b. Kondisi kapasitas dan daya saing perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, terutama dalam menghadapi kondisi perekonomian global dan nasional yang tidak menentu;
c. Masih cukup tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin; Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana;
d. Belum mantapnya kualitas infrastuktur;
e. Masih perlunya peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, serta kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi;
f. Belum optimalnya upaya perbaikan kapasitas fiskal daerah;
g. Masih perlunya peningkatan peran pemerintah bersama masyarakat untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan kondusivitas daerah;
h. Perlunya perluasan kerjasama antar regional daerah, dunia usaha dalam rangka peningkatan pembangunan kawasan, pengembangan inovasi daerah, penanggulangan bencana, penguatan kondusivitas wilayah, pemerataan ekonomi, perbaikan kapasitas fiskal dan percepatan pencapaian target SPM.

F. Arah Kebijakan Tahun 2024

Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 ditujukan pada “Penguatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah”, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

1. Penguatan Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, Nilai Tambah dan Daya Saing Perekonomian;
2. Penguatan Pengurangan Kemiskinan;
3. Penguatan kepemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang professional dan netral;
4. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
5. Penguatan Infrastruktur Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan dan Penguatan Ketahanan Bencana;
6. Peningkatan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
7. Kerjasama regional, Kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerjasama dengan komponen masyarakat;
8. Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk scenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan hal yang sangat diperlukan oleh sebuah organisasi dalam menentukan arah dan tujuan yang akan dicapai. Rencana strategis juga akan memperjelas konsep organisasi dalam menentukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral dan komprehensif. Demikian halnya dengan organisasi Pemerintah Daerah, maka keberadaan rencana strategis mutlak diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Dalam konteks Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, rencana strategis dimanifestasikan dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Rencana strategis dimaksud mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, dan Kegiatan. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2023 beserta program pendukungnya diuraikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023.

1. Visi dan Misi

Berdasarkan kondisi Kabupaten Sukoharjo dewasa ini, serta peluang, tantangan, dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun ke depan, maka Hj. Etik Suryani, SE., MM. (Bupati) dan Drs. H. Agus Santosa (Wakil Bupati) menetapkan Visi Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 sebagai berikut :

"MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUKOHARJO
YANG LEBIH MAKMUR"

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020.

Mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kabupaten Sukoharjo akan tercipta kondisi sejahtera, terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya baik sosial maupun ekonomi, secara lahir maupun batin. MAKMUR juga merupakan motto atau slogan Kabupaten Sukoharjo yaitu ***Maju, Aman, Konstitusional, Mantap, Unggul, dan Rapi***.

❖ **MAJU**

Maju mempunyai pengertian bergerak kedepan menjadi lebih baik, tidak berhenti, tidak terlambat, mencapai tingkat peradaban yang lebih tinggi. Sebagai tugas panggilan dalam hidup. Dengan maju kita ingin tumbuh dan berkembang, dan selalu berpikir dan berusaha keras ke arah peningkatan menjadi lebih baik.

❖ **AMAN**

Keamanan merupakan salah satu unsur/syarat mutlak untuk dapat terlaksananya pembangunan. Tanpa stabilitas keamanan yang terpelihara secara mantap dan berkesinambungan, tidak mungkin kegiatan pembangunan dapat terlaksana dengan lancar.

❖ **KONSTITUSIONAL**

Penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan harus dilandasi hukum atau dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

❖ **MANTAP**

Warga masyarakat dan segenap penyelenggara pemerintahan optimis dalam membangun Sukoharjo.

❖ **UNGGUL**

Unggul mempunyai arti semangat berprestasi untuk selalu berusaha mencapai yang terbaik.

❖ **RAPI**

Rapi mengandung pengertian apik, baik, bersih, teratur, tertib, beres.

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah:

a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi.
b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas.

c. Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi.
d. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan.
e. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam rangka mencapai misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan dari suatu tujuan yang terukur formulasinya. Berdasar rekomendasi review Kementerian PANRB, rumusan akhir Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 78 tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 tergambar dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.A.1
Matrik Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran
1	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi**			
		Terwujudnya tata kepemerintahan yang profesional		**Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)**
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
				Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinah (AKIP)
				Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)
				Indeks Sistem Merit (ISM)
				Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
2	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas**			
		Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat,		**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**
				Angka Kemiskinan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran
		ceras, inovatif, dan berkarakter		
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)
			Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
			Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
				Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
			Meningkatnya kearifan budaya lokal	Angka Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya
			Meningkatnya kualitas hidup dan penduduk miskin	Prosentase Penduduk Miskin Perkotaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desi II (miskin)
				Prosentase Penduduk Miskin Perdesaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desi II (miskin)
3	**Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi**			
		Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Insklusif		**Pertumbuhan Ekonomi**
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
				Pendapatan perkapita
			Meningkatnya pertumbuhan produktifitas	Pertumbuhan Wirausaha Baru
				Pertumbuhan Usaha Mikro ke Usaha Kecil
				Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan
				Pertumbuhan PDRB Sektor Industri
				Pertumbuhan investasi
				Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan
				Skor Pola Pangan Harapan
				Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota
			Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun (IDM)
4	**Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan**			
		Terwujudnya pemerataan		**Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)**

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran
		pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan		**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**
				Indeks Resiko Bencana (IRB)
			Meningkatnya kualitas infrastruktur	Prosentase Lingkungan Hunian Layak
				Indeks Layanan Infrastruktur
				Indeks Fatalitas
				Cakupan Layanan Telekomunikasi
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Air (IKA)
				Indeks Kualitas Udara (IKU)
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
				Indeks Ketahanan Daerah
5	**Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Dan Keagamaan**			
		Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman		**Prosentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum**
			Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
			Meningkatnya Kesatuan Bangsa dan Bernegara	Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukoharjo tertuang pada tabel berikut:

Tabel II.A.2
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026

VISI : MEWUJUDKAN MASYRAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR				
No	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**
1	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi**	**Terwujudnya tata kepemerintahan yang profesional**	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	• Meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services) • Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan. • Mewujudkan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik dan efisiensi kelembagaannya.

VISI : MEWUJUDKAN MASYRAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR				
No	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**
2	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas**	**Meningkatnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter**	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	• Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif mapun rehabilitatif secara berkualitas, penerapan paradigma hidup bersih dan sehat dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan perbaikan status gizi masyarakat
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan	• Meningkatkan kualitas pendidikan melalui partisipasi pendidikan dalam rangka pemenuhan SPM, dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan
			Meningkatnya pengendalian penduduk	• Pengendalian penduduk melalui peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi
			Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	• Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, pengarustamaan gender dalam pembangunan, dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak anak melalui pengarustamaan hak anak dan perlindungan khusus anak.
				• Meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan pemuda pelopor dan wirausaha muda, dan pembinaan Pramuka.
			Meningkatnya kearifan budaya lokal	• Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, kesenian tradisional, sejarah serta cagar budaya daerah • Peningkatan budaya literasi
			Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin	• Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran, Peningkatan kesejahteraan social, Perlindungan sosial adaptif, dan Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu
3	**Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yuang Bekualitas dan Inklusif**	**Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Insklusif**	Meningkatnya pertumbuhan produktifitas	• Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi
				• Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, pengawasan perdagangan, dan pemasaran produk unggulan daerah.
				• Meningkatkan penataan kawasan industri dan pengembangan industri sesuai dengan potensi daerah
				• Membuka peluang investasi berbasis potensi daerah melalui penyediaan informasi potensi dan peluang investasi serta pemasaran investasi
				• Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani • Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan
				• Meningkatkan kualitas konsumsi pangan melalui penyediaan pangan yang cukup baik

VISI : MEWUJUDKAN MASYRAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR				
No	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**
				sisi jumlah, mutu maupun keamanannya dengan harga yang terjangkau.
				• Mengurangi pengangguran melalui pembekalan ketrampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
				• Peningkatan daya tarik pariwisata dan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
			Meningkatnya Kemandirian Desa	• Meningkatkan kemandirian dengan melalui pengembangan BUMDes, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa, dan peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah.
4	**Memperkust Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan**	**Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur**	Meningkatnya kualitas infratruktur	• Meningkatkan akses air minum layak dan aman
				• Meningkatkan akses layanan sanitasi layak dan aman (air limbah dan sampah)
				• Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni • Pengentasan Permukiman Kumuh
				• Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi melalui pembangunan dan rehabilitasi. • Mewujudkan infrastruktur penghubung antar wilayah yang merata dan layak
				• Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
				• Penuntasan Infrastruktur TIK; Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan Fasilitas Pendukung Transformasi Digital
		Terwujudnya lingkungan sehat, aman, tangguh, berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan	• Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara
				• Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana melalui pelayanan informasi kebencanaan, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana.
5	**Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Dan Keagamaan**	**Mewujudkan masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman**	Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	• Meningkatkan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan fokus pada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis pada aspek kerukunan dan ketertiban sosial, serta menjaga kerukunan antar umat beragama.
			Meningkatnya Kesatuan Bangsa Dan Bernegara	• Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan, termasuk edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini, termasuk kepada anak-anak usia

VISI : MEWUJUDKAN MASYRAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR				
No	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**
				sekolah, serta didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pengampu kepentingan yang berkaitan dengan keberagaman, toleransi, kewarganegaraan, dan politik

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sukoharjp 2021-2026 dirumuskan berdasarkan pertimbangan untuk pencapaian target indikator sasaran yang ditetapkan pada setiap misi dan strategi yang dijalankan.

Dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya mengenai fokus atau tema pembangunan tahunan dalam satu priode RPJMD, perlu memperhatikan beberapa faktor diantaranya pencapaian indikator sasaran yang termuat dalam tiap misi. Hal ini sebagai dasar untuk menentukan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target indikator sasaran pada setiap misi, sehingga semakin jelas tahapan dan ukuran target yang akan dicapai setiap tahunnya.

Secara umum keterkaitan Strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabuaten Sukoharjo 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel II.A.3
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2021-2026

Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi	
1. Meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (*direct services*) 2. Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel 3. Mewujudkan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik dan efisiensi kelembagaannya.	1. Percepatan kepemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral 2. Kerjasama regional, Kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerjasama dengan komponen masyarakat 3. Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045
Misi 2 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif mapun rehabilitatif secara berkualitas, penerapan paradigma hidup	4. Percepatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing

Strategi	Arah Kebijakan
bersih dan sehat dalam pengendalian penyakit	
5. Meningkatkan partisipasi pendidikan dalam rangka pemenuhan SPM, dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan	
6. Peningkatan budaya literasi	
7. Percepatan cakupan administrasi, dan peningkatan kependudukan integrasi sistem administrasi kependudukan	
8. Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, pengarustamaan gender dalam pembangunan, dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak anak melalui pengarustamaan hak anak dan perlindungan khusus anak.	
9. Meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan pemuda pelopor dan wirausaha muda, dan pembinaan Pramuka.	
10. Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, kesenian tradisional, sejarah serta cagar budaya daerah	
11. Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran 12. Peningkatan kesejahteraan sosial 13. Perlindungan sosial adaptif 14. Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu	5. Percepatan Pengurangan Kemiskinan
Misi 3 Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing TInggi	
15. Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi	6. Percepatan Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, Nilai Tambah dan Daya Saing Perekonomian;
16. Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, pengawasan perdagangan, dan pemasaran produk unggulan daerah.	
17. Meningkatkan penataan kawasan industri dan pengembangan industri sesuai dengan potensi daerah	
18. Membuka peluang investasi berbasis potensi daerah melalui penyediaan informasi potensi dan peluang investasi serta pemasaran investasi	
19. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani 20. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan	
21. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan melalui penyediaan pangan yang cukup baik sisi jumlah, mutu maupun keamanannya dengan harga yang terjangkau.	
22. Mengurangi pengangguran melalui pembekalan ketrampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.	

Strategi	Arah Kebijakan
23. Peningkatan daya tarik pariwisata dan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	
24. Meningkatkan kemandirian dengan melalui pengembangan BUMDes, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa, dan peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah desa.	
Misi 4 Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	
25. Meningkatkan akses air minum layak dan aman	7. Percepatan Infrastruktur Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan dan Penguatan Ketahanan Bencana;
26. Meningkatkan akses layanan sanitasi layak dan aman (air limbah dan sampah)	
27. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni 28. Pengentasan Permukiman Kumuh	
29. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi melalui pembangunan dan rehabilitasi. 30. Mewujudkan infrastruktur penghubung antar wilayah yang merata dan layak	
31. Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	
32. Penuntasan Infrastruktur TIK; Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan Fasilitas Pendukung Transformasi Digital	
33. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara	
34. Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana melalui pelayanan informasi kebencanaan, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana.	
Misi 5 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Dan Keagamaan	
35. Meningkatkan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan fokus pada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis pada aspek kerukunan dan ketertiban sosial, serta menjaga kerukunan antar umat beragama.	8. Percepatan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila.
36. Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan, termasuk edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini, termasuk kepada anak-anak usia	

Strategi	Arah Kebijakan
sekolah, serta didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pengampu kepentingan yang berkaitan dengan keberagaman, toleransi, kewarganegaraan, dan politik	

B. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 indikator kinerja utama (IKU) yang dipergunakan berdasar Peraturan Bupati Nomor 78 tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten. Berdasarkan hasil konsultasi dan arahan dari Kementerian PANRB untuk Indikator Kinerja Utama dapat tidak memuat secara utuh IKU Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dengan pertimbangan hanya memuat indikator yang bersifat prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan untuk Perjanjian Kinerja Kabupaten harus memuat secara utuh IKU Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel II.B.1
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sukoharjo

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	**2**	**3**
1.	**Terwujudnya tata kepemerintahan yang profesional**	**Indeks Reformasi Birokrasi**
2.	**Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter**	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
		2. Angka Kemiskinan
3.	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda.	1. Indeks Pembangunan Gender
		2. Indeks Pembangunan Pemuda
4.		1. Pertumbuhan Ekonomi

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	2	3
	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan insklusif	2. Tingkat Pengangguran Terbuka
		3. Pendapatan Per Kapita
5.	**Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan**	1. Indeks Pembangunan Infrastruktur
		2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		3. Indeks Resiko Bencana
6.	**Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman**	Presentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome)* yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja, sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2024 telah menetapkan Perjanjian Kinerja untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini. Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tersebut telah ditetapkan 5 tujuan, 13 sasaran, dengan 34 indikator kinerja.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel II.C.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	**Terwujudnya tata kepemerintahan yang profesional**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Nilai**	**72,92**
1.1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83
		2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	4,35
		3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Predikat	BB (75)
		4. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Nilai	1,646
		5. Indeks Sistem Merit	Kategori	III (307)
		6. Evaluasi kepatuhan standar pelayanan publik	Nilai	85
2.	**Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter**	**1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Nilai**	**78,66**
		2. Angka Kemiskinan	**%**	**7,6**
2.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	77,87
2.2	Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	Tahun	9,85

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
		2. Harapan lama sekolah (tahun)	Tahun	13,92
2.3	Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,87
2.4	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	97,32
		2. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	54,66
2.5	Meningkatnya kearifan budaya lokal	Angka partisipasi pelaku seni dan budaya	%	36
2.6	Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin	Prosentase Penduduk Miskin Perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2)	%	4,10
		Prosentase Penduduk Miskin Perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2)	%	2,75
3.	**Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan insklusif**	**1. Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**4,9**
		2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	**%**	**4,57**
		3. Pendapatan Perkapita	**Rp (Juta)**	**49,9**
3.1.	Meningkatnya pertumbuhan produktifitas	1. Pertumbuhan wirausaha baru	%	14
		2. Pertumbuhan usaha mikro ke usaha kecil	%	3,5
		3. Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	5,3
		4. Pertumbuhan PDRB sektor industri	%	5,74
		5. Pertumbuhan investasi	%	20

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
		6. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan	%	2,8
		7. Skor pola pangan harapan	%	93,8
		8. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota	%	84
3.2	Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,7698
4.	**Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan**	**1. Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)**	**Nilai**	**68,26**
		2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	**Nilai**	**61,32**
		3. Indeks Resiko Bencana	**Nilai**	**81,29**
4.1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur	1. Prosentase lingkungan hunian layak	%	84,7
		2. Indeks layanan infrastruktur	Nilai	70,79
		3. Indeks fatalitas	Angka	0,256
		4. Cakupan layanan telekomunikasi	%	100
4.2	Meningkatnya kualitas lingkungan	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	51
		2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	87,24
		3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	31,09
		4. Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,6

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
5.	**Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman**	**Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum**	**%**	**87,97**
5.1.	Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	91,49
5.2.	Meningkatnya kesatuan bangsa dan bernegara	Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara	%	82

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

A. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas maka dilakukan Pengukuran Kinerja, sebagai salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Kerangka pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\textbf{Realisasi}}{\textbf{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\textbf{Target} - (\textbf{Realisasi}-\textbf{Target})}{\textbf{Target}} \times 100\%$$

Sebagai dasar dalam melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka setiap indikator kinerja sasaran akan dinilai dengan pengukuran sakla ordinal, sebagai berikut :

Tabel III.A.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA ORDINAL	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74%	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dan RPJMD Tahun 2021-2026, setidaknya terdapat 5 Tujuan dan 13 Sasaran yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

1) Tujuan pertama : Terwujudnya tata kepemerintahan yang profesional.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka pencapaian kinerja tujuan adalah sebagai berikut:

Tabel III.B.1
Capaian Kinerja Tujuan 1
Terwujudnya tata kepemerintahan yang profesional

No.	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2024			%Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
				Realisasi	Capaian	Realisasi 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	72,92	86,2	118,21%	72,92	107,75%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan 1, yaitu Terwujudnya tata kepemerintahan yang profesional, capaian kinerja tujuan mencapai **118,21%**, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**. Mengacu pada hasil pengukuran di atas terlihat bahwa pada Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dari target sebesar 72,92 realisasinya 86,2 atau capaiannya sebesar 118,21%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaiannya telah mencapai 107,75%.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memperoleh nilai 86,2 dengan predikat (A) yang terdiri dari RB General dengan nilai 76,84 dan RB Tematik dengan nilai 9,36. Jika dibandingkan

dengan tahun 2023 yang realisasinya 72,92 (BB), maka pada tahun 2024 terdapat kenaikan realisasi yang siginifikan sebesar 13,28 menjadi 86,2 (BB).

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan 1 sasaran strategis, yaitu:

a. Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel

Pencapaian kinerja pada sasaran 1.1, yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.B.1.1.1
Capaian Kinerja Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel

No.	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2024			%Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
				Realisasi	Capaian	Realisasi 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83	86,04	103,66%	85,35	101,22%
2.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	4,35	4,45	102,30%	4,35	115,89%
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Predikat	BB (75)	B (66,94)	89,25%	B (65,04)	83,68%
4.	Indek Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	Nilai	1,646	1,067	64,82%	1,231	56,60%
5.	Indeks Sistem Merit (ISM)	Kategori	III (307)	III (307*) ***thn 2023**	100%	307	122,8%
6.	Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	85	99,36	116,89%	97,41	110,40%
Rata-rata capaian					**96,16%**		**98,43%**

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran 1.1, yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel, capaian kinerja lebih tinggi dengan yang ditargetkan, sehingga rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar **96,16%** sehingga dapat dikategorikan **Baik.** Adapun realisasi dan capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terealisasi 86.04 pada tahun 2024 dengan capaian kinerja sebesar 103.66%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja meningkat karena realisasi IKM pada tahun 2023 sebesar 85.35 dengan capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 101,22%.

2) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terealisasi sebesar 4,45 pada tahun 2024 dengan capaian kinerja sebesar 102,30%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja meningkat karena realisasi SPBE pada tahun 2023 sebesar 4,35. Adapun capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 115,89%.
3) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) terealisasi sebesar 66,94 pada tahun 2024 dengan capaian 89,25%. Adapun capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 83,68%.
4) Indek Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dengan Rasio KFD sebesar 1,067 dari target 1,646 atau tercapai 64,82%. Realisasi tahun 2024 sebesar 1,067 dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 1,885, maka capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 56,60%.
5) Indeks Sistem Merit (ISM) pada tahun 2024 terealisasi sebesar 307 atau kategori III (baik) dari target kategori III (baik) dengan capaian kinerja sebesar 100%. Indeks Sistem merit (ISM) pada tahun 2024 sampai saat ini belum keluar nilainya, sehingga pada laporan ini realisasi yang digunakan merupakan Indeks Sistem Merit tahun 2023. Dikarenakan adanya transisi perubahan kewenangan verifikasi penilaian mandiri sistem merit dari yang semula dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara menjadi kewenangan BKN karena adanya Perpres Nomor 92 tahun 2024 tentang tugas dari peralihan KASN pada Pasal 3 menyebutkan bahwa BKN mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan penerapan Sistem Merit. Adanya peralihan ini BKN belum bisa menetapkan penilaian mandiri system Merit karena masih dilakukan penyesuaian terkait kewenangan dan tugas ini.
6) Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik terealisasi 99.36 pada tahun 2024 dengan capaian kinerja sebesar 116,89%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja meningkat karena realisasi Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik pada tahun 2023 sebesar 97.41 dengan capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 110,40%.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel III.B.1.1.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024
Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel

No.	Indikator	Satuan	2022		2023		2024		
			Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3			4	5	6	7	8
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83,69	103,32%	85,35	104,08%	83	86.04	103.66%
2.	Sistem Pemerintahan Bebasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,42	93,96%	4,35	112.99%	4,35	4,45	102,30%
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Predikat	B (63,58)	105,97%	B (65,04)	100,06%	BB 75	66,94	89,25%
4.	Indek Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	Nilai	1,302	89,12%	1,231	79,57%	1,646	1,067	64,82%
5.	Indeks Sistem Merit (ISM)	Kategori	III (267,5)	152,86%	III 307	123,29%	III 307	III 307*	100%
6.	Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	90,19	111,35%	97,41	117,36%	85	99.36	116.89%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa:

1) Berdasarkan tabel di atas, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun 2022 sampai 2024 mengalami peningkatan, tahun 2022 sebesar 83,69, tahun 2023 sebesar 85,35 dan tahun 2024 sebesar 86.04. Hal ini disebabkan karena 67 Perangkat Daerah yang aktif menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) aktif dalam menyusun rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dan menyusun laporan tindak lanjut hasil SKM, sehingga dapat diketahui unsur-unsur yang perlu dilakukan perbaikan kedepan sehingga hasil IKM pada periode selanjutnya mengalami kenaikan.
2) Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 mendapatkan nilai indeks sebesar 4,45. Nilai ini meningkat dibandingkan penilaian pada tahun 2023 yang mendapatkan nilai indeks sebesar 4,35. Sedangkan nilai pada tahun 2022 sebesar 3,42. Nilai indeks SPBE Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 mengalami peningkatan dan ini telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 4,35 dengan capaian sebesar 102,30%. Faktor penunjang capaian indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Sukoharjon yang melebihi target diantaranya

komitmen pimpinan yang sangat tinggi atas implementasi SPBE, kolaborasi yang solid di semua Perangkat Daerah dan telah tersedianya kebijakan terkait SPBE.

3) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) dari tahun 2022 sampai 2024 mengalami peningkatan, tahun 2022 sebesar 63,58, tahun 2023 sebesar 65,04 dan tahun 2024 sebesar 66,94 Pada tahun 2024 terdapat kenaikan nilai sebesar 1,90 poin, menempatkan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo peringkat 2 dengan pertumbuhan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Adapun Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah melakukan tindak lanjut dari rekomendasi pada LHE SAKIP sebelumnya, diantaranya:
   a) Melakukan reviu terhadap dokumen perjanjian kinerja Perangkat Daerah;
   b) Melakukan perbaikan indikator di Sebagian Perangkat Daerah serta melakukan pengukuran kinerja baik Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah terhadap masing-masing indikator;
   c) Melakukan reviu LAKIP terhadap semua Perangkat Daerah;
   d) Melakukan monitoring atas tindak lanjut dari hasil evaluasi internal.
4) Indek Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) terealisasi sebesar 1,302 pada tahun 2022. Terjadi penurunan menjadi 1,231 dengan capaian 79,57% pada tahun 2023. Kemudian terjadi penurunan realisasi lagi menjadi 1,067 dengan capaian 64,82% pada tahun 2024. Hasil IKFD/RKFD merupakan perhitungan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Formula Perhitungan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah. Sedangkan Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dihitungkan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara

untuk berbagai kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat perubahan formula perhitungan dan rentang IKFD atau RKFD antara tahun 2021 dan 2022, sehingga berakibat IKFD/RKFD tahun 2022 berada pada kategori KFD Rendah. Padahal pada tahun 2021, IKFD Kabupaten Sukoharjo berada pada kategori KFD Tinggi. Pada tahun 2023, IKFD Kabupaten Sukoharjo sebesar 1,231 dengan kategori sedang dan tahun 2024 IKFD Kabupaten Sukoharjo mengalami penurunan menjadi 1,067 dengan kategori rendah.

Adapun penyebab penurunan capaian IKFD sebagai berikut:

a) DAU yang telah diatur penggunaannya
b) Dana Tambahan Infrastruktur ditambahkan sebagai faktor pengurang
c) belanja pegawai sebagai penyebut dalam perhitungan RKFD mengalami kenaikan karena jumlah pegawai ASN bertambah sehingga menyebabkan nilai perolehan RKFD kecil.

Adapun strategi yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk meningkatkan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) antara lain sebagai berikut :

a) Strategi Pendapatan Daerah

   Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, strategi yang dilaksanakan adalah peningkatan target penerimaan PAD yang implementasinya dapat dijabarkan antara lain:

   - Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
   - Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungut pajak dan retribusi;
   - Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan perundang-undangan daerah;
   - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;

- Mendorong pembentukan sistem pembayaran pedapatan daerah yang langsung ke bank/lembaga keuangan;
- Meningkatkan koordinasi,kerjasama dan dukungan antar SPKD yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- Meningkatkan evaluasi, monitoring, dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
- Meningkatkan partisipasi dan peranan Pihak Ketiga penyediaan biaya pembangunan daerah;
- Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui: Meningkatkan intensitas dan efektifitas penagihan tunggakan pajak; Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui : Peningkatan kapasitas sistem online pembayaran pajak, one-stop service, samsat keliling, peningkatan efektifitas drive thru, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak; Meningkatkan informasi dan komunikasi perpajakan daerah; Meningkatkan efektifitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah; Membentuk sistem pembayaran pajak melalui electronic payment (e-payment) dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang face to face dengan fiscus; Pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah.

b) Strategi Belanja Daerah

Dalam rangka mengoptimalkan belanja daerah, maka strategi yang diterapkan adalah dengan peningkatan tata kelola keuangan daerah, dimana pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggunggjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo diharuskan mengedepankan money follow program priority yang akan memprioritaskan program/kegiatan

wajib/mengikat dan dukungan terhadap tematik pembangunan, yaitu pembiayaan pembangunan.

5) Indeks Sistem Merit (ISM) pada tahun 2022 terealisasi sebesar 267,5 atau kategori III dengan capaian 152,86%, kemudian pada tahun 2023 mengalami kenaikan dengan realisasi sebesar 307 atau kategori III dan capaiannya 123,29%. Adapun keberhasilan pencapaian tersebut didukung adanya beberapa rekomendasi KASN dalam reviu hasil penilaian tahun 2022 ditindaklanjuti dan disempurnakan prosesnya pada tahun 2023.

6) Realisasi indikator kinerja Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari tahun 2022 sampai 2024 mengalami peningkatan, tahun 2022 sebesar 90,19, tahun 2023 sebesar 97,41 dan tahun 2024 sebesar 99,36. Kenaikan secara signifikan tersebut tercapai karena:
   a) Adanya kerjasama dan koordinasi antara Bagian Organisasi dengan Perangkat Daerah yang akan dijadikan lokus penilaian yaitu dengan rutin menyelenggarakan pendampingan dan monitoring serta evaluasi persiapan penyelenggaraan Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik;
   b) Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2024 diselenggarakan oleh Ombudsman RI dengan meminta Narahubung/ Penanggung Jawab pada setiap Perangkat Daerah yang akan dinilai yaitu Dinas PM dan PTSP, Dinas Dukcapil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Puskesmas Kartasura dan Puskesmas Sukoharjo, sehingga mempermudah koordinasi proses penilaian antara Unit Pelayanan Publik dan Ombudsman RI;
   c) Waktu atau jadwal penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik pada tahun 2024 diinformasikan terlebih dahulu kepada Narahubung setiap Perangkat Daerah yang dijadikan lokus penilaian, sehingga Perangkat Daerah dapat mempersiapkan dengan baik dan maksimal;
   d) Bagian Organisasi selaku koordinator Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Tahun

2024 menyusun Buku Saku untuk mempermudah Perangkat Daerah dalam menjawab wawancara pada Dimensi Input.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2024 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.B.1.1.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d 2024	Target Akhir RPJMD	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86,04	85	101,22%
2.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	4,45	3,84	115,89%
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Predikat	66,94	A (80)	83,68%
4.	Indek Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	Nilai	1,067	1,885	56,60%
5.	Indeks Sistem Merit (ISM)	Kategori	III (307*)	III (250)	122,8%
6.	Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	99,36	90	110,40%
Rata-rata Capaian					**98,43%**

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024apabila dibandingkan dengan target akhir yang telah ditetapkan dalam RPJMD maka rata-rata capaian sasaran 1.1 adalah **98,43%**. Adapun capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memperoleh realisasi sebesar 86.04 dari target akhir RPJMD sebesar 85 sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 101,22%. Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada diagram berikut:

Gambar III.B.1.1.1
Perbandingan Nilai IKM Kabupaten Sukoharjo dengan Provinsi dan Kabupaten Sekitar Tahun 2024

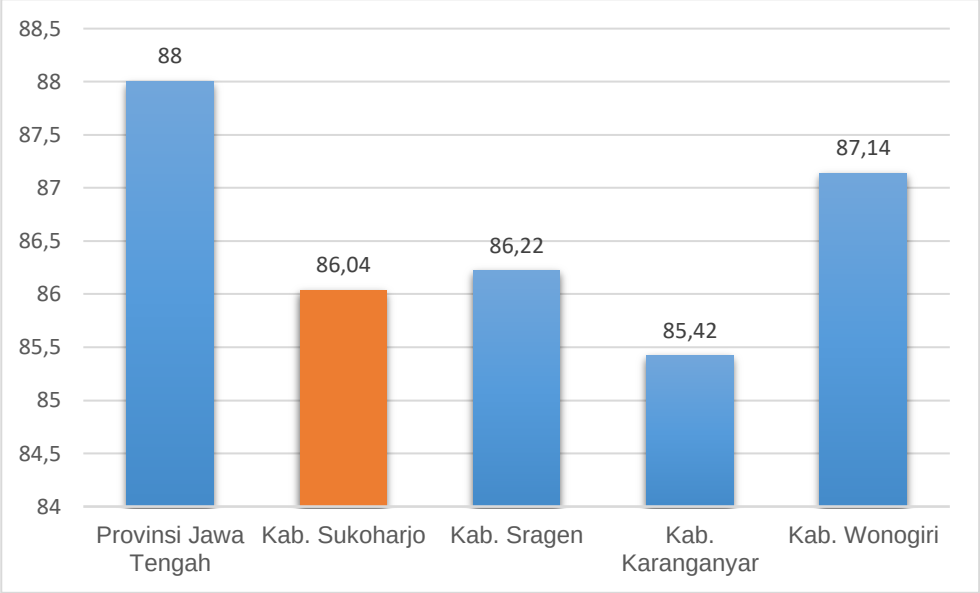

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan diagram diatas, dapat dilihat bahwa hasil IKM Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 86,04, hasil tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Wonogiri. Namun demikian, realisasi IKM Kabupaten lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IKM Kabupaten Karanganyar. Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.1.1.2
Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

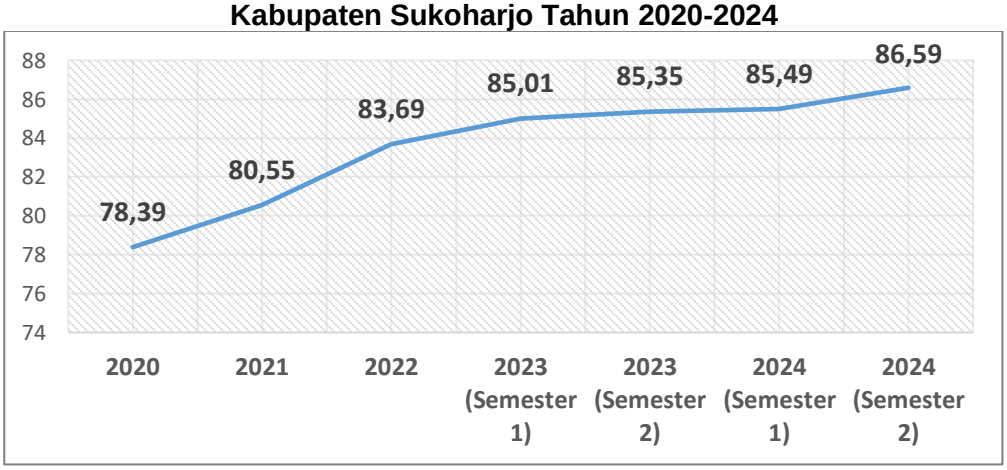

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

Dari gambar grafik hasil Indeks Kepuasan Masyarakat diatas pada tahun 2020 rata-rata nilai IKM Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yaitu 78,39 dengan mutu pelayanan B (Baik). Pada Tahun 2021 rata-rata nilai IKM Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yaitu 80,55 dengan mutu pelayanan B (Baik) kemudian pada Tahun 2022 rata-rata nilai IKM Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yaitu 83,69 dengan mutu pelayanan B (Baik), pada Semester 1 Tahun 2023 rata-rata nilai IKM Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yaitu 85,01 dengan mutu pelayanan B (Baik) dan Semester 2 Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memperoleh nilai rata-rata IKM sebesar 85,35 dengan mutu pelayanan B (Baik). Kemudian pada Semester 1 Tahun 2024 rata-rata nilai IKM Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yaitu 85,49. Semester 2 Tahun 2024 rata-rata nilai IKM Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yaitu 86,59.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat yang cukup signifikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, sehingga dapat disimpulkan dengan adanya peningkatan IKM setiap tahunnya juga disertai dengan peningkatan terhadap kualitas pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo setiap tahunnya.

2) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memperoleh realisasi sebesar 4,45 dari target akhir RPJMD sebesar 3,84 sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 115,89%. Untuk melihat perbandingan Indeks SPBE pada Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota sekitar, maka dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.1.1.3
Perbandingan Indeks SPBE Kabupaten Sukoharjo dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024

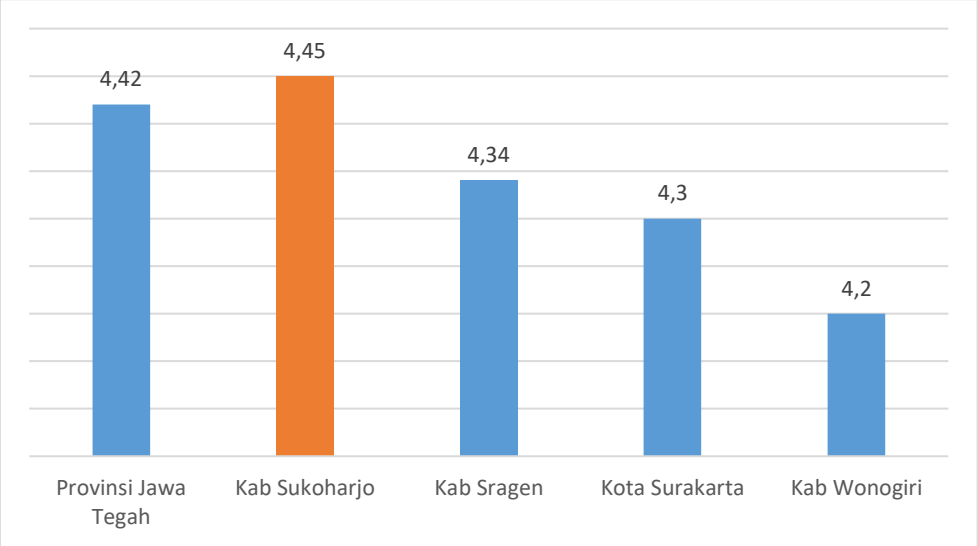

Sumber: Diskominfo Kabupaten Sukoharjo

Gambar diagram di atas menunjukkan bahwa realisasi Indeks SPBE Kabupaten Sukoharjo sebesar 4,45 menjadi yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Indeks SPBE Kabupaten Sukoharjo lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,42; Kabupaten Sragen sebesar 4,34; Kota Surakarta sebesar 4,3; dan Kabupaten Wonogiri sebesar 4,2. Secara nasional, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menempati peringkat ke-4 untuk kategori Pemerintah Kabupaten setelah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebesar 4,77, Pemerintah Kabupaten Kediri sebesar 4,63 dan Kabupaten Sumedang sebesar 4,51.

3) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) memperoleh realisasi sebesar 66,94 dari target akhir RPJMD sebesar 80 sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 83,68%. Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi Nilai AKIP Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Nilai AKIP Kabupaten/Kota sekitar dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.1.1.4
Perbandingan Nilai AKIP Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024

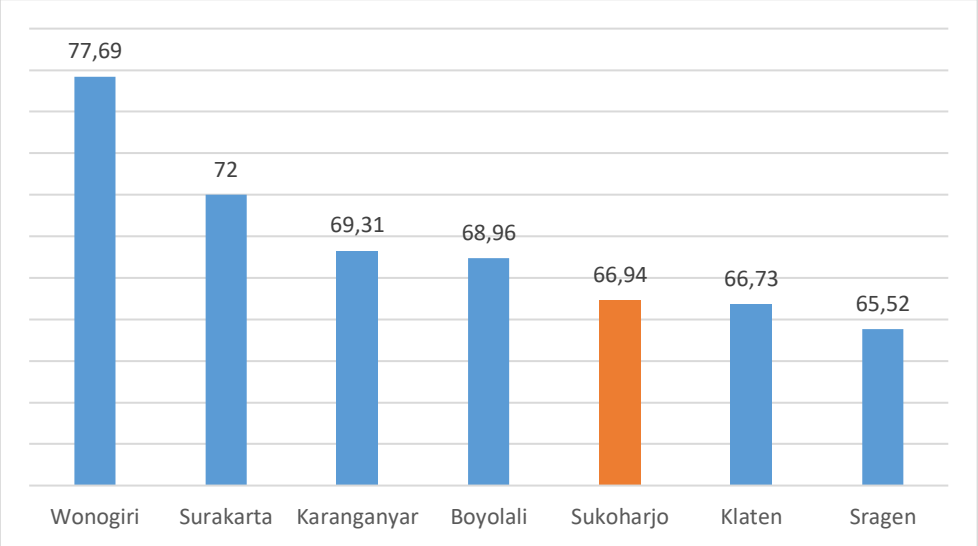

Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa Nilai AKIP Kabupaten Sukoharjo sebesar 66,94 dibawah Kabupaten Wonogiri, Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, dan lebih tinggi dari Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sragen. Namun demikian, Nilai AKIP Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 berada di posisi 26 se Jawa Tengah mengalami kenaikan pada tahun 2024 dengan berada pada posisi 20 se Jawa Tengah.

4) Pada RPJMD Kabupaten Sukoharjo penyebutan Indek Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) sedangkan tahun 2024 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 penyebutan telah diubah menjadi Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD). Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) terealisasi sebesar 1,067 dari target akhir RPJMD sebesar 1,885 sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 56,60%. Hasil RKFD Kabupaten/Kota se Solo Raya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

III.B.1.1.5
Perbandingan RKFD Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024

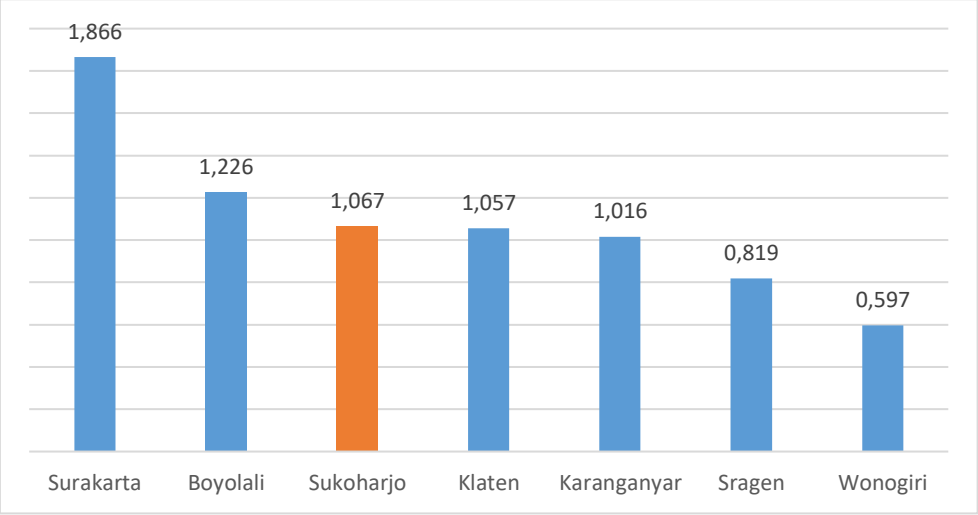

Sumber: BPKPAD Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa realisasi IKFD Kabupaten Sukoharjo sebesar 1,067 lebih tinggi dari Kabupaten Klaten dengan realisasi sebesar 1,057; Kabupaten Karanganyar sebesar 1,016; Kabupaten Sragen sebesar 0,819; dan Kabupaten Wonogiri sebesar 0,597. Sedangkan Kota Surakarta memiliki realisasi yang lebih tinggi yaitu 1,866; dan Kabupaten Boyolali sebesar 1,226.

5) Indek Sistem Merit memperoleh realisasi sebesar 307 dari target akhir sebesar 250 (Kategori III) sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 122,8%. Untuk melihat perbandingan Indeks Sistem Merit pada Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota sekitar, maka dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.1.1.6
Perbandingan Indeks Sistem Merit Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024*

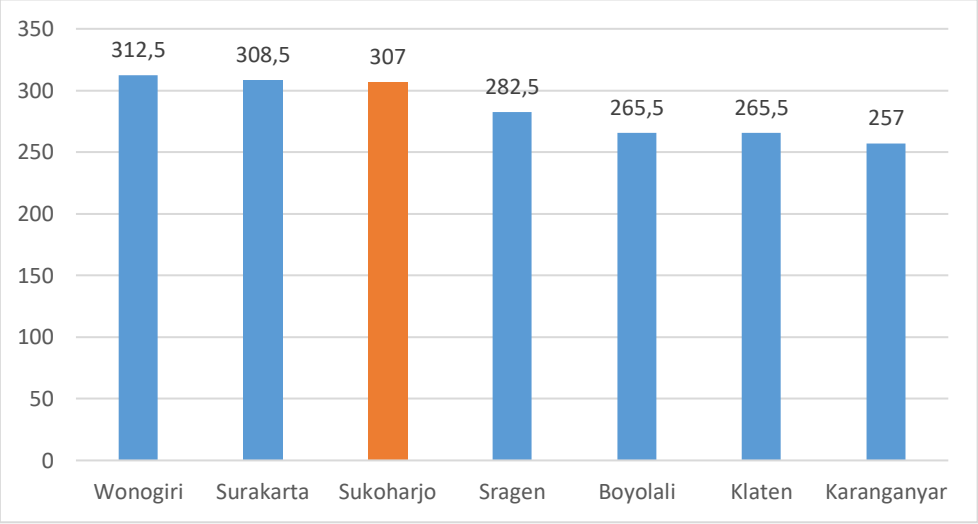

*Sumber: BKPSDM Kabupaten Sukoharjo, *menggunakan data tahun 2023.*

Gambar diagram di atas menunjukkan bahwa capaian Indeks Sistem Merit Kabupaten Sukoharjo sebesar 307 jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar berada pada peringkat ketiga setelah Kabupaten Wonogiri dengan realisasi sebesar 312,5 dan Kota Surakarta dengan realisasi sebesar 308,5. Meskipun demikian, Indeks Sistem Merit Kabupaten Sukoharjo lebih tinggi dari Kabupaten Sragen sebesar 282,5; Kabupaten Sragen sebesar 282,5; Kabupaten Boyolali sebesar 265,5; Kabupaten Boyolali sebesar 265,5; Kabupaten Klaten sebesar 265,5; dan Kabupaten Karanganyar sebesar 257.

6) Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik memperoleh realisasi sebesar 99,36 dari target akhir sebesar 90 dengan capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 110.40%. Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.1.1.7
Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019-2024

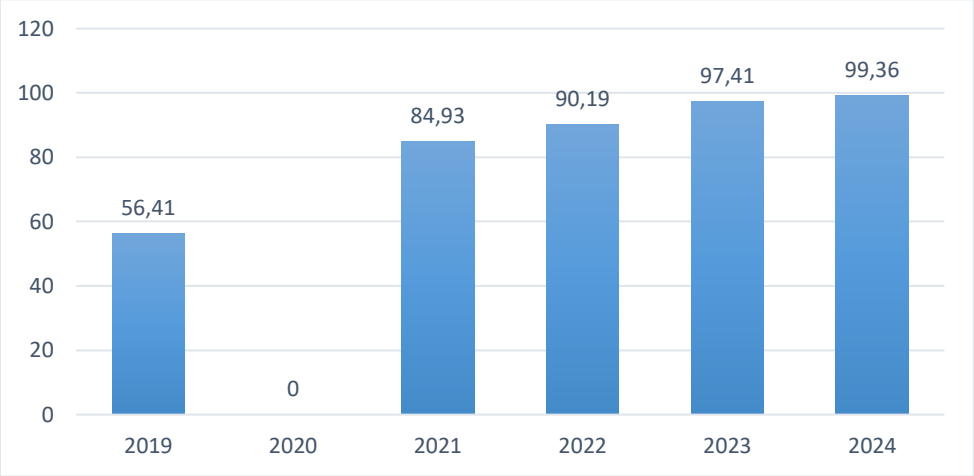

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sukoharjo

Dari gambar grafik nilai kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 di atas, pada awal penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memperoleh nilai sebesar 56,41 dan masih termasuk pada zona kuning dengan kategori kepatuhan sedang. Pada tahun 2020 Ombudsman Republik Indonesia tidak melakukan penilaian terhadap Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Pada tahun 2021 nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar 84,93 dan berhasil memperoleh Zona Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi. Pada tahun 2022 nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan kembali menjadi 90,19 memperoleh Zona Hijau dengan Kategori nilai A (Kualitas Tertinggi) dan pada Tahun 2023 terdapat kenaikan dengan nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo sebesar 97,41 dengan Kategori nilai A (Kualitas Tertinggi). Kemudian pada Tahun 2024 terdapat kenaikan sangat signifikan dengan nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo sebesar 99,36 dengan Kategori nilai A (Kualitas Tertinggi).

Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.1.1.8
Perbandingan Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024

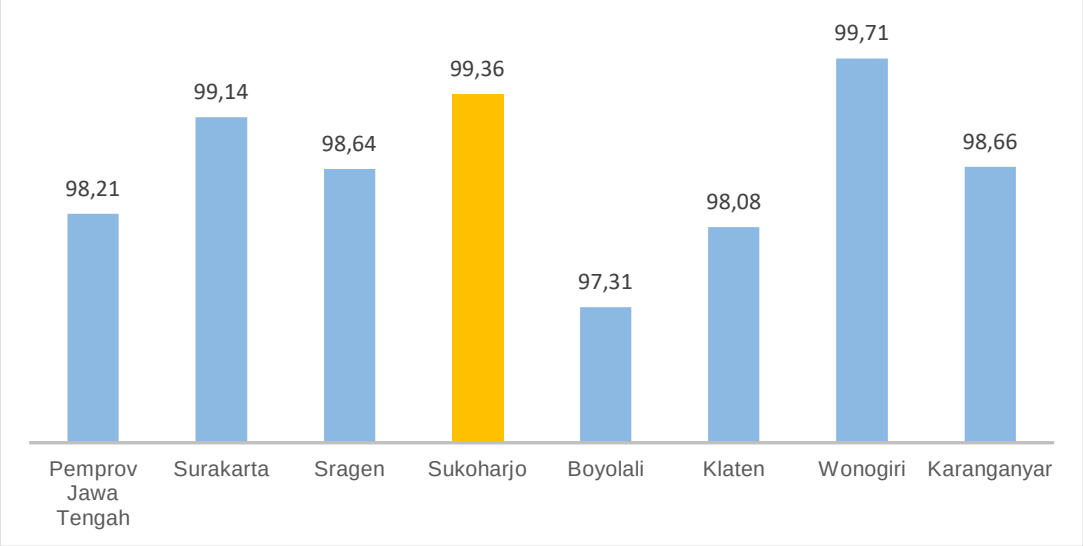

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sebesar 99,36 (Zona Hijau) Kualitas Tertinggi. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memperoleh nilai kepatuhan lebih tinggi dibadningkan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan hasil nilai 98,21. Pemerintah Kota Surakarta dengan nilai 99,14. Pemerintah Kabupaten Sragen dengan nilai 98,64, Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan nilai 97,31, Pemerintah Kabupaten Klaten dengan nilai 98,09 dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan nilai 98,66. Pencapaian hasil nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 memperoleh hasil yang baik dan dan konsisten dikarenakan berhasil memperoleh peringkat 2 Nasional hasil Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tingkat Kabupaten secara Nasional, dibawah Kabupaten Wonogiri yang berhasil memperoleh peringkat 1 Nasional dengan hasil nilai 99,71.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.1.1.4
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 1.1

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	98,16%	Rp. 460.328.127.637	Rp. 448.351.644.133	-1,28

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Rata-rata capaian indikator pada Sasaran 1.1 sebesar 98,16% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 460.328.127.637,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 448.351.644.133,- sehingga efisiensinya sebesar -1,28%.

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 1.1 bersumber dari:

1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dilaksanakan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui Kegiatan Penataan Organisasi pada Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana dengan alokasi anggaran sebesar Rp140.318.000,- terealisasi sebesar Rp. 135.841.389,- atau 96,81%.
2) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilaksanakan pada Program Aplikasi Informatika melalui Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada:
   a) Subkegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.110.000,- dan realisasi sebesar Rp. 25.888.880,- atau tercapai 99,15%.
   b) Subkegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 245.390.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 241.760.000,- atau tercapai 98,52%.

c) Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- dan terealisasis sebesar Rp. 5.950.000,- atau tercapai 99,17%.

3) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui Kegiatan Penataan Organisasi pada Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp175,538,000.00,- terealisasi sebesar Rp171,863,458.00 atau 97,91%.

4) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) didukung oleh Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 411.522.239.157,- dan realisasi sebesar Rp. 405.912.275.862,- atau 98,64% dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.043.960.880,- dan realisasi sebesar Rp. 10.027.557.340,- atau 90,80%.

5) Indeks Sistim Merit dilaksanakan pada Program Kepegawaian Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 3.789.524.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.582.292.777,- atau tercapai 94,53% ; Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 27.578.394.900 dengan realisasi anggaran sebesar 22.555.989.977 atau tercapai 81,79% ; Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan alokasi anggaran Rp. 5.800.652.200 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.692.224.450,- atau tercapai 89,13 %.

2) **Tujuan kedua : Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter.**

Dalam mewujudkan tujuan tersebut berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun 2024, pencapaian kinerja untuk tujuan adalah sebagai berikut:

Tabel III.B.2
Capaian Kinerja Tujuan 2
Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter

No.	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2024			%Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
				Realisasi	Capaian	Realisasi 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	78,66	79,3	100,81%	78,65	101,14%
2.	Angka Kemiskinan	%	7,6	7,47	101,71%	7,58	93,29%
Rata-rata Capaian					101,26%		97,22%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan 2, yaitu Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter, dari 2 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya rata-rata capaian kinerja tujuan mencapai **101,26%**, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**. Adapun realisasi dan capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan dari beberapa komponen dasar hidup, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta kehidupan yang layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Mengacu pada hasil pengukuran di atas terlihat bahwa pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari target sebesar 78,66 realisasinya 79,3 atau capaiannya sebesar 100,81%. Peningkatan nilai IPM ditunjang dari peningkatan keempat komponen penyusun IPM, yaitu Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita. Peningkatan nilai IPM didorong oleh peran pemerintah daerah yang sangat berpengaruh untuk meningkatkan pembangunan indeks manusia dengan mensinkronkan/menselaraskan

3 indikator yaitu pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak; pendidikan gratis; dan jaminan kesehatan warga. Target akhir pencapaian IPM dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2026 adalah sebesar 78,40. Artinya, pada tahun 2023 Kabupaten Sukoharjo telah mencapai target tersebut.

2) Kemiskinan menurut BPS dipahami sebagai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Dengan pendekatan tersebut, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 sebesar 7,47% dari target 7,6% dengan capaian 101,71%. Hal tersebut menunjukkan penurunan angka kemiskinan yang berhasil ditekan pada angka 7,47% Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penurunan angka kemiskinan terjadi pada tahun 2024 sebagaimana data tersaji pada gambar berikut ini:

Gambar III.B.2
Angka Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo dari Tahun 2020 s.d 2024

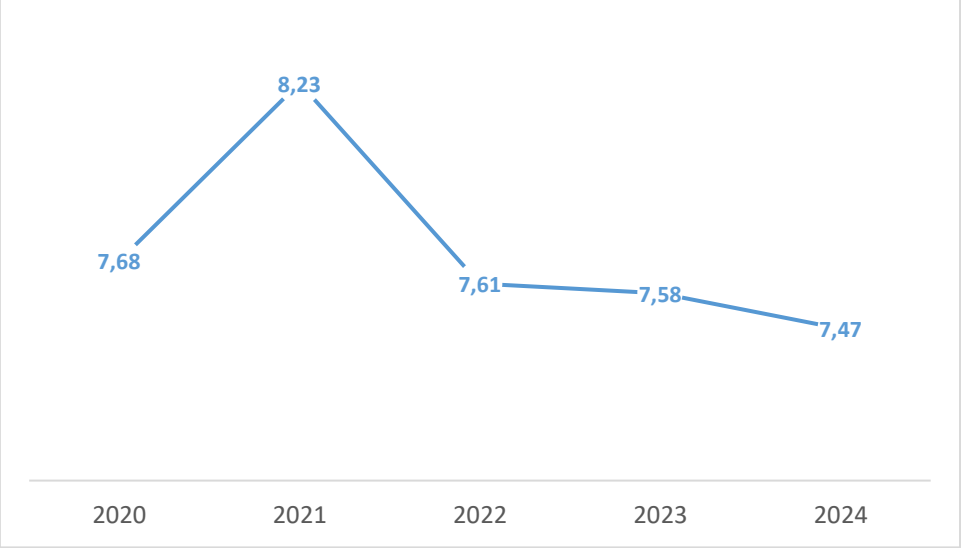

Sumber: Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan gambar di atas, terjadi kenaikan angka kemiskinan pada tahun 2021. Sedangkan dari tahun 2022 hingga tahun 2024, Angka Kemiskinan mengalami penurunan. Untuk mengatasi kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah melakukan berbagai program, seperti: Memberikan santunan kematian, Memberikan bantuan pangan,

Memberikan subsidi bunga untuk pelaku UMKM, Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, Mengembangkan UMKM.

Apabila diperbandingkan dengan target akhir pada RPJMD Kabupaten Sukoharjo sebesar 7,0% maka realisasi angka kemiskinan sebesar 7,47% pada tahun 2024 mencapai 101,71% dari target yang ditetapkan. Namun demikian posisi angka kemiskinan Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 tersebut dibawah angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,47%, urutan ke-9 dari Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah dan urutan ke-1 dari Kabupaten/Kota di wilayah Subosukowonosraten.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan 6 sasaran, yaitu:

a. Sasaran 2.1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Pencapaian kinerja pada sasaran 2.1, yaitu Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.B.2.1.1
Capaian Kinerja Sasaran 2.1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

No.	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2024			% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
				Realisasi	Capaian	Realisasi 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	77,87	78,01	100,18%	77,86	100,14%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 2.1, yaitu Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dengan indikator kinerja Angka Harapan Hidup (AHH) terealisasi pada tahun 2024: 78,01 tahun dari target 77,87 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih tinggi dengan yang ditargetkan, sehingga capaian kinerja pada sasaran ini sebesar **100,18%** sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel III.B.2.1.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024
Sasaran 2.1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

No.	Indikator	Satuan	2022		2023		2024		
			Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	77,82	100,15%	77,86	100,14%	77,87	78,01	100,18%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi AHH dari tahun 2022 sampai 2024 mengalami peningkatan, tahun 2022 sebesar 77,82, tahun 2023 sebesar 77,86 dan tahun 2024 sebesar 78,01. Jika dilihat berdasarkan capaian, maka pada tahun 2022 persentase capaian sebesar 100,15% turun menjadi 100,14% di tahun 2023, namun terjadi kenaikan di tahun 2024 menjadi 100,18%.

Untuk melihat perbandingan realisasi kinerja dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.2.1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Kabupaten/Kota sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Sasaran 2.1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

No	Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)		
		2022	2023	2024
1	2	3	4	5
	Nasional	71,85	72,13	72,39
	Provinsi Jawa Tengah	74,57	74,69	74,93
1	**Sukoharjo**	**77,82**	**77,86**	**78,01**
2	Karanganyar	77,64	77,72	77,91
3	Kota Surakarta	77,43	77,63	77,9
4	Klaten	76,95	77,07	77,30
5	Wonogiri	76,41	76,56	76,84
6	Boyolali	76,12	76,23	76,44
7	Sragen	75,87	75,97	76,18

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari data di atas dapat dilihat bahwa AHH Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 sebesar 78,01 menjadi yang tertinggi se Solo Raya. Selain itu realisasi AHH Kabupaten Sukoharjo lebih tinggi dari realisasi AHH Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Adapun Kabupaten Sukoharjo menjadi nomor ketiga setelah Kota Salatiga dan Kota Semarang.

Keberhasilan pencapaian sasaran di atas sesungguhnya tidak terlepas dari dipedominya sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten

Sukoharjo yaitu “Menurunnya angka kesakitan dan kematian” dengan indikator kinerja antara lain:

1) Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI);
2) Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB);
3) Menurunnya Angka Kematian Balita (AKABA);
4) Menurunnya persentase stunting;
5) Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
6) Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa;
7) Meningkatnya persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan.

Beberapa factor pendorong yang berkontribusi dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian sebagai berikut:

1) Tercapainya *Universal Health Coverage* (UHC) sebesar 98,37% di Kabupaten Sukoharjo sehingga meningkatkan akses Kesehatan yang lebih luas terutama pada masyarakat miskin.
2) Integrasi Layanan Primer (ILP) dengan mendekatkan akses pelayanan Kesehatan di masyarakat serta pelayanan Kesehatan pada seluruh cluster sirklus hidup.
3) Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan melalui digitalisasi Rekam Medis Elektronik dan integrasi data Kesehatan melalui SATU SEHAT.
4) Promosi pola hidup sehat di masyarakat melalui berbagai Gerakan seperti Gerakan Bumil Sehat, Aksi Bergizi, Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas yang dilaksanakan di 12 kecamatan.
5) Peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan melalui pelatihan, bimbingan teknis dan *workshop*.

Meskipun demikian masih ditemukan kendala dalam pencapaian target sasaran diantaranya:

1) Perubahan gaya hidup di masyarakat. Peningkatan konsumsi makanan tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok meningkatkan prevalensi penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, stroke dan kanker.

2) Kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya deteksi dini penyakit.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2024 dengan target akhir RPJMD tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel III.B.2.1.4
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2024 dengan Target RPJMD Sasaran 2.1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2024	Target Akhir RPJMD	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
1.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	78,01	77,90	100,14%

Realisasi kinerja indikator Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 78,01 tahun pada tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar 77,90 tahun maka capaiannya adalah 100,14%.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.2.1.5
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2.1

No	Sasaran	Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	100,18%	Rp. 437.317.341.102	Rp.413.302.808.999	6,00

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator pada Sasaran 2.1 sebesar 100,18% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 437.317.341.102,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 413.302.808.999,- sehingga efisiensinya sebesar 6.00%.

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 2.1, melalui

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 334.485.996.514,- terealisasi sebesar Rp. 314.483.052.549,- atau tercapai 94,02% dengan sisa anggaran Rp. 20.002.943.965,- atau 5,98%.

2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.270.948.988,- terealisasi sebesar Rp. 95.424.353.840,- atau tercapai 96,13% dengan sisa anggaran Rp. 3.846.595.148,- atau 3,87%.
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.589.607.400,- terealisasi sebesar Rp. 1.486.276.875,- atau tercapai 93,50% dengan sisa anggaran Rp. 103.330.525,- atau 6,50%.
4) Program sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 607.273.600,- terealisasi sebesar Rp. 568.200.650,- atau tercapai 93,57% dengan sisa anggaran 39.072.950,- atau 6,43%.
5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.363.514.600,- terealisasi sebesar Rp. 1.340.925.085,- atau tercapai 98,34% dengan sisa anggaran Rp. 22.589.515,- atau 1,66%.

b. Sasaran 2.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Pencapaian kinerja pada sasaran 2.2, yaitu Meningkatnya Kualitas Pendidikan tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.B.2.2.1
Capaian Kinerja Sasaran 2.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan

No.	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2024			% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
				Realisasi	Capaian	Realisasi 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	Tahun	9,85	10,01	101,62%	9,84	106,60%
2.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	13,92	13,92	100%	13,91	100,43%
Rata-rata Capaian					**100,81%**		**103,52%**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 2.2, yaitu Meningkatnya Kualitas Pendidikan dapat dilihat bahwa capaian kinerja lebih tinggi dari target yang ditetapkan dengan rata-rata capaian kinerja

pada sasaran ini sebesar **100,81%** sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik.** Adapun realisasi dan capaian masing masing indikator sebagai berikut:

1) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Pada tahun 2024, indikator Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun) memiliki target 9,85 tahun yang terealisasi 10,01 tahun. Realisasi indikator Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas jika dibandingkan dengan target tahun 2024 maka capaiannya sebesar 101,62%, sedangkan capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 106,60%.
2) Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Pada tahun 2024, indikator Harapan Lama Sekolah memiliki target 13,92 tahun yang terealisasi 13,92 tahun. Hal ini berarti anak-anak di Kabupaten Sukoharjo yang berusia 7 tahun memiliki harapan menempuh pendidikan hingga Diploma II. Capaian Harapan Lama Sekolah tahun 2024 dibandingkan dengan target tahun 2024 tercapai sebesar 100%, sedangkan capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 100,43%.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel III.B.2.2.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024
Sasaran 2.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan

No.	Indikator	Satuan	2022		2023		2024		
			Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3			4	5	6	7	8
1.	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	Tahun	9,62	102,89%	9,84	105,13%	9,36	10,01	101,62%
2.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	13,90	100,43%	13,91	100,43%	13,92	13,92	100%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi untuk kedua indikator dari tahun 2022 hingga 2024 selalu mengalami kenaikan. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun) tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023, maka terdapat peningkatan realisasi sebesar 0,17. Sedangkan realisasi Harapan Lama Sekolah (Tahun) tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2024, maka terdapat peningkatan realisasi sebesar 0,01.

RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Berdasarkan data Rata-rata lama sekolah (RLS) di atas, dapat dilihat bahwa terjadi tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Secara umum, hal ini menunjukkan pembangunan pendidikan di Kabupaten Sukoharjo relatif terus membaik.

Pada tahun 2023, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Kabupaten Sukoharjo mencapai 9,84 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Sukoharjo yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,84 tahun atau telah tamat SMP dan berada di tingkat pertama pendidikan setingkat SMA.

Pada tahun 2024, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Kabupaten Sukoharjo mencapai 10,01 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Sukoharjo yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,01 tahun atau telah tamat SMP dan berada di tingkat kedua pendidikan setingkat SMA.

Peningkatan rata-rata Lama Sekolah (RLS) disebabkan karena semakin meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, di samping itu perbaikan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Sukoharjo juga semakin meningkat sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses pendidikan.

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator makro yang perhitungannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS).

Diasumsikan bahwa peluang anak akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah

penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Pada tahun 2023, Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Sukoharjo mencapai 13,91 tahun. Pada tahun 2024, Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Sukoharjo mencapai 13,92 tahun. Artinya, secara rata-rata anak-anak di Kabupaten Sukoharjo yang berusia 7 tahun memiliki harapan untuk menempuh pendidikan hingga tamat Diploma I dan masuk ke Diploma II). Terdapat peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 0.01 tahun dibandingkan tahun 2023.

Peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) disebabkan karena semakin meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, perbaikan kualitas sarana dan prasarana di berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Sukoharjo juga semakin meningkat sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses pendidikan.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2024 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel III.B.2.2.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2024 dengan Target RPJMD
Sasaran 2.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2024	Target Akhir RPJMD	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
1.	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	Tahun	10,01	9,39	106,60%
2.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	13,92	13,86	100,43%
Rata-rata Capaian					**102,58%**

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka capaian sasaran 2.2 ini telah mencapai target. Capaian Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun) tahun 2024 jika dibandingkan dengan target akhir dalam dokumen RPJMD tercapai sebesar 106,60%. Sedangkan Capaian Harapan Lama Sekolah (Tahun) tahun 2024 jika dibandingkan dengan target akhir dalam dokumen RPJMD tercapai sebesar 100,43%.Adapun untuk melihat perbandingan realisasi Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo dengan Eks Karesidenan Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah serta Nasional, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.2.2.4
Perbandingan Realisasi rata-rata Lama Sekolah antara Eks Karesidenan Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Tingkat Nasional

Eks-Karesidenan Surakarta	2021	2022	2023	2024
Nasional	8,54	8,69	8,77	8,85
Provinsi Jawa Tengah	7,75	7,93	8,01	8,02
Kabupaten Boyolali	7,85	8,08	8,09	8,17
Kabupaten Klaten	8,81	9,09	9,27	9,29
Kabupaten Sukoharjo	9,35	9,62	9,84	10,01
Kabupaten Wonogiri	7,34	7,42	7,67	7,68
Kabupaten Karanganyar	8,57	8,79	9,02	9,26
Kabupaten Sragen	7,66	7,79	7,87	7,88
Kota Surakarta	10,90	10,92	11,00	11,25

Sumber: Badan Pusat Statistik

RLS penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun) tahun 2024 di atas RLS Nasional sebesar 1,16 tahun. Jika dibandingkan dengan RLS Regional (Provinsi Jawa Tengah), RLS di Kabupaten Sukoharjo lebih tinggi dari RLS Regional sebesar 1,99 tahun. Apabila dibandingkan dengan daerah se eks-Karesidenan Surakarta, posisi capaian RLS Kabupaten Sukoharjo berada pada nomor 2 setelah Kota Surakarta.

Untuk melihat perbandingan realisasi Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo dengan Eks Karesidenan Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah serta Nasional, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.2.2.5
Perbandingan Realisasi Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo dengan Eks Karesidenan Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Tingkat Nasional

Eks-Karesidenan Surakarta	2021	2022	2023	2024
Nasional	13,08	13,1	13,15	13.21
Provinsi Jawa Tengah	12,77	12,81	12,85	12.,86
Kabupaten Boyolali	12,57	12,62	12,66	12,67
Kabupaten Klaten	13,39	13,4	13,41	13,43
Kabupaten Sukoharjo	13,84	13,9	13,91	13,92
Kabupaten Wonogiri	12,5	12,51	12,52	12,61
Kabupaten Karanganyar	13,69	13,7	13,71	13,73
Kabupaten Sragen	12,84	12,91	12,92	12,93
Kota Surakarta	14,88	14,89	14,90	15,07

Sumber : *Badan Pusat Statistik*

HLS Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 di atas HLS Nasional sebesar 0,71 tahun. Jika dibandingkan dengan HLS Regional (Provinsi Jawa Tengah) juga di atas HLS Regional sebesar 1,06 tahun. Apabila dibandingkan dengan daerah se eks-Karesidenan Surakarta, HLS Kabupaten Sukoharjo berada pada peringkat kedua setelah Kota Surakarta.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.2.2.6
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2.2

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	100,81%	Rp. 151.350.409.778	Rp. 147.686.279.449	3,31

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator pada Sasaran 2.2 sebesar 100,81% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 151.350.409.778,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 147.686.279.449,- sehingga efisiensinya sebesar 3,31%.

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 2.2, Meningkatnya Kualitas Pendidikan, melalui:

1) Program Pengelolaan Pendidikan yang terdiri dari kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 71.867.659.058,- terealisasi sebesar Rp. 70.857.433.183,- atau tercapai 98,59% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.010.225.875,- atau 1,41%; kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.745.684.152,- terealisasi sebesar Rp. 51.308.121.318,- atau tercapai 97,27% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.437.562.834,- atau 2,73%; kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.945.256.568,- terealisasi sebesar Rp. 22.777.970.948,- atau tercapai 95,13% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.167.285.620,- atau 4,87%; kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.532.810.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.483.754.000,- atau tercapai 98,06% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 49.056.000,- atau 1,94%.

2) Program Pengembangan Kurikulum yang terdiri dari kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 85.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 85.000.000,- atau tercapai 100%; dan kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 174.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 174.000.000,- atau tercapai 100% dengan sisa anggaran sebesar Rp 0,-.

c. Sasaran 2.3 Meningkatnya pengendalian penduduk

Pencapaian kinerja pada sasaran 2.3, yaitu Meningkatnya pengendalian penduduk tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.B.2.3.1
Capaian Kinerja Sasaran 2.3 Meningkatnya pengendalian penduduk

No.	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2024			% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
				Realisasi	Capaian	Realisasi 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,87	0,52	140,23%	0,76	139,53%

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan penduduk dapat dilihat dengan menghitung jumlah penduduk alami (selisih jumlah kelahiran dan kematian) dan jumlah penduduk non alami (selisih migrasi penduduk masuk dan penduduk keluar). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 2.3, yaitu Meningkatnya pengendalian penduduk dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) pada tahun 2024 terealisasi sebesar 0,52% dari target 0,87% dengan capaian kinerja sebesar **140,23%** sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian antara tahun 2024 dengan tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel III.B.2.3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024
Sasaran 2.3 Meningkatnya pengendalian penduduk

No.	Indikator	Satuan	2023		2024		
			Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,76	89,86%	0,87	0,52	140,23%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 sebesar 0,76%. Kemudian pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 0,52%. Realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 0,24. Angka ini masih batas aman, yaitu masih ada pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk ini perlu dijaga jangan sampai tidak terjadi pertumbuhan penduduk apalagi apalagi sampai minus. Yang artinya jumlah penduduk berkurang dan tidak terjadi pertambahan jumlah penduduk, kalau tidak ada upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk dikhawatirkan lama-lama jumlah penduduk akan habis.

Berikut Perhitungan Laju Pertumbuhan Penduduk

$$\frac{\text{Jml Pend. Th Ini - Jml Pend Thn Lalu}}{\text{Jml Pend. Tahun lalu}} \times 100\%$$

$$\frac{916472 - 911745}{911745} \times 100\%$$

$$\frac{4727}{911745} \times 100\%$$

= 0,52

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.2.3.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019-2024

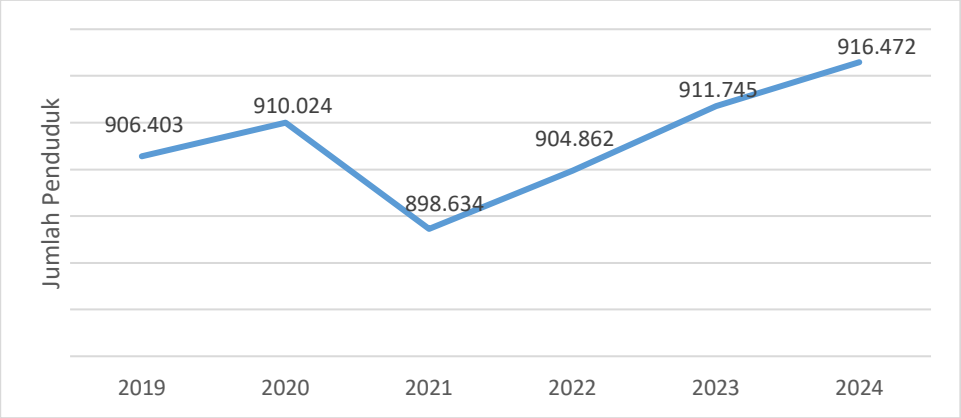

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan grafik di atas, jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2019 sebanyak 906.403 jiwa. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 910.024 jiwa. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 898.634 jiwa. Pada tahun 2022 hingga tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 916.472 jiwa.

Untuk dapat melihat perbandingan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sukoharjo dengan Provinsi dan Nasional maka dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.2.3.2
Perbandingan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sukoharjo dengan Provinsi dan Nasional

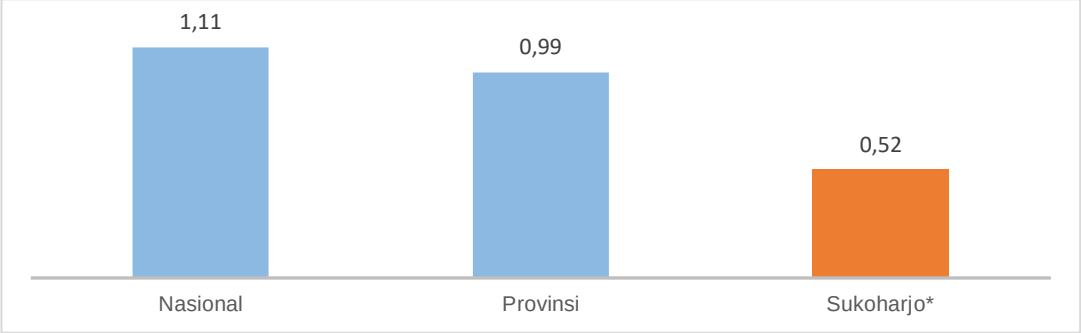

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 yang menggunakan data dari Disdukcapil sebesar 0,52 lebih rendah dari Nasional sebesar 1,11 dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,99. Data Nasional dan Provinsi menggunakan data dari BPS.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2024 dengan target akhir RPJMD sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel III.B.2.3.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2024 dengan Target RPJMD Sasaran 2.3 Meningkatnya pengendalian penduduk

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2024	Target Akhir RPJMD	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,52	0,86	139,53%

Realisasi kinerja indikator Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 0,52% pada tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar 0,86% maka capaiannya adalah 139,53%. Adapun faktor pendukung dari pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

1) Keberhasilan dalam Penurunan Angka Total Fertility Rate (TFR) karena semakin rendah jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh

seorang perempuan, maka semakin rendah pula Laju Pertumbuhan Penduduk.

2) Meningkatnya usia kawin pertama berdampak pada angka kelahiran yang dapat ditekan.
3) Program Bangga Kencana terus-menerus diinformasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat paham untuk menghindari 4 T (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Dekat dan Terlalu Banyak)

Adapun upaya yang sudah dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk sebaga berikut:

1) Melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga, Kesehatan reproduksi serta dampak dari pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali.
2) Menyediakan akses dan fasilitasi kontrasepsi.
3) Memberdayakan kampung Keluarga Berencana sebagai pusat informasi dan edukasi bagi masyarakat mengenai Program KB.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.2.3.4
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2.3

No	Sasaran	Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pengendalian penduduk	140,23%	Rp. 13.265.813.000	Rp. 12.927.037.149	43,90%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator pada Sasaran 2.3 sebesar 140,23% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.265.813.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.927.037.149,- sehingga efisiensinya sebesar 43,90%.

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 2.3, melalui:

1) Program Pengendalian Penduduk dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 443.575.000,- terealisasi sebesar Rp. 420.276.950,- atau 94,75% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 23.298.050,- atau 5,25%.
2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.781.898.000,- terealisasi sebesar Rp.

7.612.045.699,- atau 97,82% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 169.852.301,- atau 2,18%.

3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan alokasi anggaran sebesar 5.040.340.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.894.714.500,- atau 97,11% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 145.625.500,- atau 2,89%.

d. Sasaran 2.4 Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda

Pencapaian kinerja pada sasaran 2.4, yaitu Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.B.2.4.1
Capaian Kinerja Sasaran 2.4 Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda

No.	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2024			% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
				Realisasi	Capaian	Realisasi 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	97,32	97,32 ***th 2023**	100%	97,32	100,79%
2.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	54,66	60,83	111,29%	54,66	117,75%
Rata-rata Capaian					**105,64%**		**109,27%**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 2.4, yaitu Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda dapat dilihat bahwa capaian kinerja lebih tinggi dengan yang ditargetkan, sehingga capaian kinerja pada sasaran ini sebesar **105,64%** sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik.** Adapun realisasi dan capaian masing masing indikator sebagai berikut:

1) Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2023 terealisasi sebesar 97,32 sedangkan pada tahun 2024 realisasi IPG masih belum dirilis oleh BPS.

2) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) terealisasi sebesar 60,83 dengan capaian sebesar 112,29% pada tahun 2024.

Selanjutnya untuk mengetahui perbandingan pencapaian kinerja tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.B.2.4.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024
Sasaran 2.4 Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda

No.	Indikator	Satuan	2023		2024		
			Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	97,32	100,83%	97,32	97,32 ***th 2023**	100%
2.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	54,66	103,13%	54,66	60,83	112,29%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2023 terealisasi sebesar 97,32. Sedangkan IPG tahun 2024 belum dirilis. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan IPG sebagai berikut:

1) Meningkatkan kemandirian masyarakat utamanya kaum perempuan yang dilakukan secara bertahap melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah, serta mampu untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
2) Memberikan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki terhadap kesempatan/ peluang dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan.
3) Meningkatkan jumlah perempuan dalam kegiatan ekonomi atau bidang ketenagakerjaan.

Kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Dinas PPKBP3A Kabupaten Sukoharjo melalui Kegiatan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) dengan melakukan pelatihan keterampilan teknis bagi perempuan untuk meningkatkan motivasi dan kapasitas perempuan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pelatihan keterampilan teknis bagi perempuan dilakukan melalui usaha ekonomi produktif baik itu olahan pangan maupun non olahan pangan atau keterampilan lain dengan tetap memperhatikan

potensi dan kearifan lokal serta kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Sasaran kegiatan ini adalah :

1) Kelompok Perempuan rentan (di daerah ekstrim)
2) Perempuan Kepala Keluarga
3) Perempuan Korban Kekerasan

Jumlah sasaran untuk kegiatan pelatihan ini dilakukan setiap tahunnya untuk 3 (tiga) desa, 2 (dua) desa untuk Pelatihan Peningkatan Ekonomi Perempuan (PPEP) dan 1 (satu) desa untuk Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Perempuan Korban Kekerasan. Adapun hasil yang diharapkan sebagai berikut:

1) Meningkatnya kapasitas Perempuan dalam mengolah atau mengelola potensi sumber daya ekonomi desa secara mandiri.
2) Meningkatnya pengetahuan , keterampilan dan motivasi Perempuan dalam usaha ekonomi produktif.
3) Meningkatnya jumlah Perempuan wirausaha baru.
4) Meningkatnya kesejahteraan Perempuan dan keluarganya.

Nilai total Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 adalah 54,66 sedangkan pada tahun 2024 nilai IPP adalah 60,83. Terdapat kenaikan realisasi sebesar 6,17 poin. Kenaikan tersebut lebih tinggi dibandingkan kenaikan nilai IPP pada tahun 2023 yaitu sebesar 2,13 poin. Salah satu faktor pendukung peningkatan capaian IPP pada tahun 2023 adalah adanya perbaikan dalam metode perhitungan dan penelitian yang lebih mendalam terhadap data pendukung. Berikut hasil perhitungan data pada masing-masing domain:

1) Domain Pendidikan : 73,33
2) Domain Kesehatan dan Kesejahteraan : 67,50
3) Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja : 60,00
4) Domain Partisipasi dan Kepemimpinan : 36,67
5) Domain Gender dan Diskriminasi : 66,67

Berdasarkan hasil diatas dapat dilihat bahwa domain Partisipasi dan Kepemimpinan mendapatkan point terendah. Hal itu dikarenakan kurangnya partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan berorganisasi, sosial

kemasyarakatan serta kurangnya kemampuan pemuda dalam memberikan saran dan pendapat dalam pelaksanaan rapat / kegiatan. Untuk kedepannya perlu diberikan lebih banyak kegiatan yang melibatkan pemuda agar bisa terlibat aktif dalam suatu kegiatan. Selama ini kegiatan kepemudaan telah dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo, diharapkan untuk kedepannya perangkat daerah lintas sektor yang terkait kepemudaan juga dapat lebih meningkatkan kuantitas pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pemuda. Perangkat daerah terkait dimaksud adalah Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, Dinas PPKBP3A, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Koperasi, UKM serta Perdagangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2024 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel III.B.2.4.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2024 dengan Target RPJMD Sasaran 2.4 Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2024	Target Akhir RPJMD	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	97,32 ***th 2023**	96,55	100,79%
2.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	60,83	51,66	117,75%
Rata-rata Capaian					**109,27%**

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka capaian sasaran 2.4 ini telah melebihi target. Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2024 terealisasi 97,32* dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 96,55 maka capaiannya sebesar 100,79%.

Untuk dapat melihat perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Kota sekitar maka dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.2.4.1
Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024*

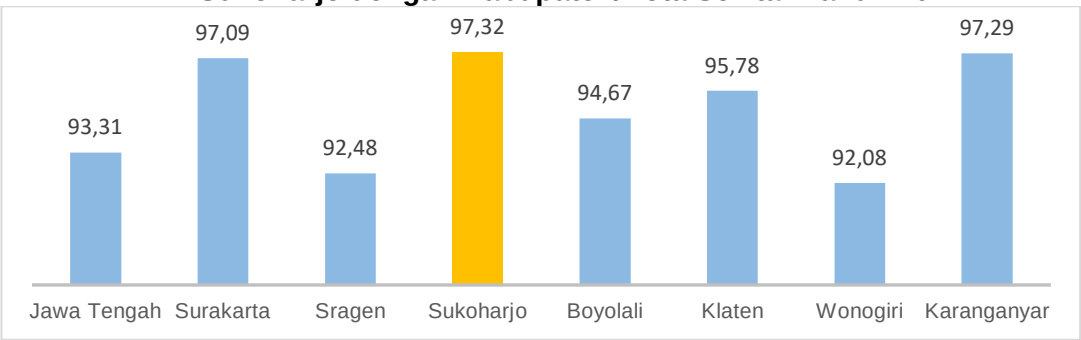

*Sumber: BPS, *menggunakan data tahun 2023*

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan gender Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 yang menggunakan nilai tahun 2023 sebesar 97,32 menjadi yang tertinggi se-solo raya dan lebih tinggi dari IPG Jawa Tengah sebesar 93,31.

Indeks Pembangunan Pemuda pada tahun 2024 terealisasi 60,83 dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 51,66 maka capaiannya sebesar 117,75%. Untuk dapat melihat perbandingan Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Klaten maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.2.4.4
Perbandingan Realisasi Nilai IPP Kabupaten Sukoharjo dengan Provinsi Jawa Tengah dan Tingkat Nasional

Keterangan	2021	2022	2023	2024
Nasional	53,33	55,33	55,83	57,67
Provinsi Jawa Tengah	50,67	53,33	55,50	56,50
Kabupaten Sukoharjo	41,77	52,53	54,66	60,83
Kabupaten Klaten	-	-	50,80	58,00

Berdasarkan tabel di atas, Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 sebesar 60,83 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sebesar 56,50 dan Nasional sebesar 57,67. Untuk saat ini Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang sudah melaksanakan pengukuran Indeks Pembangunan Pemuda adalah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Klaten. Nilai Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sukoharjo lebih tinggi 2,83 poin jika dibandingkan dengan Kabupaten Klaten sebesar 58,00.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.2.4.5
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2.4

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda	105,64%	Rp. 1.288.509.000	Rp. 1.285.499.010	5,89%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator pada Sasaran 2.4 sebesar 105,64% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.288.509.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.285.499.010,- sehingga efisiensinya sebesar 5,89%.

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 2.4, melalui :

1) Indeks Pembangunan Gender dilaksanakan pada program berikut:
   a) Program Pengarusutamaan Gender dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 366.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 365.809.110,- atau 99,92%;
   b) Program Perlindungan Perempuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 107.939.000,- terealisasi sebesar Rp. 106.524.900,- atau 98,69%;
   c) Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 252.670.000,- terealisasi sebesar Rp. 252.670.000,- atau 100%;
   d) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 26.800.000,- atau 100%;
   e) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 120.000.000,- atau 100%;

f) Program Perlindungan Khusus Anak dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 125.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 125.000.000,- atau 100%.

2) Indeks Pembangunan Pemuda dilaksanakan pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan , pada kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah / RAD Tingkat Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 290.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 288.695.000,- atau tercapai 99,55% sehingga terdapat sisa anggaran Rp 1.305.000,- atau sebesar 0,45%.

e. Sasaran 2.5 Meningkatnya kearifan budaya lokal

Pencapaian kinerja pada sasaran 2.5, yaitu Meningkatnya kearifan budaya lokal tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.B.2.5.1
Capaian Kinerja Sasaran 2.5 Meningkatnya kearifan budaya lokal

No.	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2024			% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
				Realisasi	Capaian	Realisasi 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Angka Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya	%	36	52,25	145,14%	36	149,28%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran Meningkatnya kearifan budaya lokal dengan indikator kinerja Angka Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya pada tahun 2024 terealisasi sebesar 52,25% dari target 36%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih tinggi dengan yang ditargetkan, sehingga capaian kinerja pada sasaran ini sebesar **145,14%** sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel III.B.2.5.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024
Sasaran 2.5 Meningkatnya kearifan budaya lokal

No.	Indikator	Satuan	2022		2023		2024		
			Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3			4	5	6	7	8
1.	Angka Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya	%	24,08	104,70%	36	120%	36	52,25	145,14%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi AHH dari tahun 2022 sampai 2024 mengalami peningkatan, tahun 2022 sebesar 24,08, tahun 2023 sebesar 36 dan tahun 2024 sebesar 52,25. Peningkatan Angka Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya/APPSB disebabkan karena meningkatnya kegiatan pertunjukan seni dan budaya di Kabupaten Sukoharjo pasca pemberlakuan PPKM akibat pandemi covid-19 sehingga meningkatkan jumlah pelaku seni dan budaya yang ikut terlibat dalam kegiatan pertunjukkan seni dan budaya; hal tersebut berpengaruh terhadap meningkatnya angka partisipasi pelaku seni dan budaya di Kabupaten Sukoharjo tahun 2024. Disamping itu pasca pembangunan Taman Budaya Suryani Sukoharjo yang memiliki fasilitas, sarana dan prasarana yang cukup memadai maka kegiatan pentas seni dan budaya semakin sering dilaksanakan di tempat tersebut untuk mengakomodir pertunjukan seni dan budaya dan sebagai tempat berkesenian masyarakat, pelaku seni yang ada di Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya sehingga turut andil dalam meningkatkan Angka Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya di tahun 2024. Meningkatnya partisipasi tersebut dibuktikan dari terselengaranya 50 event seni dan budaya pada tahun 2024 yang melibatkan 5100 orang dari 114 sanggar/paguyuban seni dan 34 sekolah.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2024 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel III.B.2.5.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2024 dengan Target RPJMD
Sasaran 2.5 Meningkatnya kearifan budaya lokal

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2024	Target Akhir RPJMD	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
1.	Angka Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya	%	52,25	35	149,28%

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka capaian sasaran 2.2 ini telah mencapai 149,28%.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.2.5.4
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2.5

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kearifan budaya lokal	145,14%	Rp. 5.291.631.500	Rp. 5.034.582.238	52,55

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator pada Sasaran 2.5 sebesar 145,14% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.291.631.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.034.582.238,- sehingga efisiensinya sebesar 52,55%.

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 2.5, melalui:

1) Program Pengembangan Kebudayaan yang terdiri dari kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 928.750.000,- terealisasi sebesar Rp. 912.044.705,- atau tercapai 98,20% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 16.705.295,- atau 1,8%; kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.443.461.500,- terealisasi sebesar Rp. 2.405.592.000,- atau 98,45% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 37.869.500,- atau 1,55%; kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

1.009.140.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.006.612.039,- atau tercapai 99,75% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.527.961,- atau 0,25%.

2) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang terdiri dari kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 187.375.300,- atau tercapai sebesar Rp. 93,69% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 12.624.700,- atau 6,31%; kegiatan pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.280.000,- terealisasi sebesar Rp. 416.251.000,- atau tercapai 69,34% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 184.029.000,- atau 30,66%.

3) Program Pembinaan Sejarah melalui kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 110.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 106.707.194,- atau tercapai 97,01% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 3.292.806,- atau 2,99%.

f. Sasaran 2.6 Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin

Pencapaian kinerja pada sasaran 2.6, yaitu Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.B.2.6.1
Capaian Kinerja Sasaran 2.6 Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin

No.	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2024			% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
				Realisasi	Capaian	Realisasi 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Penduduk Miskin Perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2)	%	4,10	5,34	69,76%	6,68	66,50%
2.	Persentase Penduduk Miskin Perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2)	%	2,75	2,48	109,82%	0,71	106,42%
	Rata-rata Capaian				**89,79%**		**86,46%**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 2.6, yaitu Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin dapat dilihat bahwa capaian kinerja belum mencapai target, sehingga rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar **89,79%** sehingga dapat dikategorikan **Baik.** Adapun realisasi dan capaian masing masing indikator sebagai berikut:

1) Persentase Penduduk Miskin Perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2) pada tahun 2024 terealisasi sebesar 5,34% dengan capaian sebesar 69,76%. Hal ini disebabkan karena penerima bantuan PKH dan BPNT dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial diberikan secara langsung melalui rekening ke penerima bantuan. Sehingga Dinas Sosial hanya bisa mengetahui jumlah penerima bantuan pkh dan BPNT, namun tidak memiliki akses terhadap *by name by address* (BNBA) penerima bantuan PKH dan BPNT. Dampaknya adalah Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo tidak bisa mengambil irisan dari penerima Bantuan PKH dan BPNT. Sehingga jumlah penerimanya menjadi jumlah penerima PKH ditambah jumlah penerima BPNT dari yang sebelumnya adalah irisan penerima PKH dan BPNT. Selama tahun 2024, masyarakat yang terdaftar di DTKS dan menerima Bantuan PKH dan BPNT sebanyak 71.454 jiwa. Sedangkan yang berada pada klasifikasi Desa/Kelurahan Perkotaan sebanyak 48.780 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 berdasarkan Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebanyak 913.950 jiwa.
2) Persentase Penduduk Miskin Perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2) pada tahun 2024 terealisasi sebesar 2,48 dengan capaian sebesar 109,82%. Selama tahun 2024, masyarakat yang terdaftar di DTKS dan menerima Bantuan PKH dan BPNT sebanyak 71.454 jiwa. Sedangkan yang berada pada klasifikasi Desa/Kelurahan Perdesaan sebanyak 22.674 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 berdasarkan Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebanyak 913.950 jiwa.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel III.B.2.6.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024
Sasaran 2.6 Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin

No.	Indikator	Satuan	2022		2023		2023		
			Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3			4	5	6	7	8
1.	Persentase Penduduk Miskin Perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2)	%	n/a	n/a	6,68	65,59%	4,10	5,34	69,76%
2.	Persentase Penduduk Miskin Perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2)	%	n/a	n/a	0,71	175,85%	2,75	2,48	109,42%

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa:

1) Indikator Persentase Penduduk Miskin Perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2) bila dilihat dari tabel di atas realisasi menurun secara angka namun capaian kinerja naik karena target yang ditetapkan adalah target menurun, artinya semakin kecil Persentase Penduduk Miskin Perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2) akan semakin baik. Realisasi pada Tahun 2023 sebesar 6,68% dengan capaian terhadap target sebesar 65,59%, pada Tahun 2024 sebesar 5,34% dengan capaian realisasi 69,76%.
2) Persentase Penduduk Miskin Perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2) bila dilihat dari tabel di atas realisasi dan capaian kinerja meningkat secara angka namun target tetap tercapai karena capainya lebih dari 100%, artinya semakin kecil Persentase Penduduk Miskin Perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2) akan semakin baik. Realisasi pada Tahun 2023 sebesar 0,71% dengan capaian terhadap target sebesar 175,85%, pada Tahun 2024 sebesar 2,48% dengan capaian realisasi 109,42%..

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2024 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel III.B.2.6.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2024 dengan Target RPJMD
Sasaran 2.6 Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2024	Target Akhir RPJMD	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Penduduk Miskin Perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2)	%	5,34	4,00	66,5%
2.	Persentase Penduduk Miskin Perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2)	%	2,48	2,65	106,42%
Rata-rata Capaian					**86,46%**

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka capaian sasaran 2.2 ini telah mencapai **86,46%**. Adapun rincian masing-masing indikator sebagai berikut:

1) Persentase Penduduk Miskin Perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2) pada tahun 2024 terealisasi sebesar 5,34 dari target akhir RPJMD sebesar 4,00 sehingga capaian terhadap target RPJMD adalah 66,5%.
2) Persentase Penduduk Miskin Perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2) pada tahun 2024 terealisasi sebesar 2,48 dari target akhir RPJMD sebesar 2,65 sehingga capaian terhadap target RPJMD adalah 106,42%.

Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi indikator Persentase Penduduk Miskin Perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2) dengan Persentase Penduduk Miskin Perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2) Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota sekitar dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel III.B.2.6.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Lain

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kabupaten	Realisasi Kabupaten/ Kota Lain	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Penduduk Miskin Perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2)	%	5,34	NA	NA	NA
2.	Persentase Penduduk Miskin Perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2)	%	2,48	NA	NA	NA

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa perbandingan antara realisasi indikator Persentase Penduduk Miskin Perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2) dengan Persentase Penduduk Miskin Perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2)

tidak dapat dilakukan dengan Realisasi Nasional, Realisasi Provinsi, maupun Realisasi Kabupaten/Kota lain. Hal ini disebabkan karena indikator tersebut merupakan indikator mandiri, yang berarti bahwa data untuk perkotaan dan perdesaan ini dihitung dan diukur secara terpisah berdasarkan kategori atau definisi yang spesifik untuk kabupaten yang sedang dievaluasi. Dengan demikian, tidak ada kesamaan atau standarisasi indikator yang sejenis pada tingkat nasional, provinsi, maupun antar kabupaten/kota lainnya. Oleh karena itu, tidak memungkinkan untuk membandingkan indikator tersebut secara langsung karena perbedaan metodologi atau cakupan yang digunakan dalam pengukuran data di setiap level. Dengan kata lain, indikator mandiri yang dimaksud menunjukkan bahwa pengukuran atau perhitungan masing-masing indikator dilakukan berdasarkan parameter khusus yang berbeda-beda pada tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. sehingga tidak relevan untuk membandingkan data tersebut.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.2.6.5
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2.6

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin	89,79%	Rp. 1.241.957.600	Rp. 1.239.175.598	-10,01

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator pada Sasaran 2.6 sebesar 89,79% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.241.957.600,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.239.175.598,- sehingga efisiensinya sebesar -10,01%.

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 2.6, melalui:

1) Program Pemberdayaan Sosial melalui kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 385.855.000,00 terealisasi Rp. 384.553.000,00 atau 99,66%.

2) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial melalui kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 856.102.600,00 terealisasi Rp. 854.622.598,00 atau 99,83%. Adapun sub kegiatan yang mendukung yaitu sub kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

3) Tujuan ketiga : Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan insklusif.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun 2024, pencapaian kinerja untuk tujuan adalah sebagai berikut:

Tabel III.B.3
Capaian Kinerja Tujuan 3
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan insklusif

No.	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2024			% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
				Realisasi	Capaian	Realisasi 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,9	4,97	101,43%	5,06	83,67%
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,57	3,65	120,13%	3,40	118,35%
3.	Pendapatan perkapita	Rp (Juta)	49.9	53.08	106,37%	49.88**	106,35%
Rata-rata Capaian					109,31%		102,79%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan 3, yaitu Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan insklusif, dari 3 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya rata-rata capaian kinerja tujuan mencapai **109,31%**, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**.

Mengacu pada hasil pengukuran di atas terlihat bahwa pada indikator Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2024 sebesar 4,97% jika dibandingkan dengan target 2024 maka capaiannya 101,43%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaiannya 83,67%. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian

secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi juga dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 sebesar 3,82% meningkat menjadi 5,61 % tahun 2022, dan capaian di tahun 2023 sebesar 5,06%, sedangkan tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 4,97. Kondisi ini lebih baik dibandingkan Provinsi 4,95%. Pertumbuhan ekonomi Sukoharjo sebesar 4,9% menunjukkan kondisi yang cukup stabil, tetapi masih memiliki potensi untuk ditingkatkan. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan adalah Meningkatkan daya beli masyarakat dengan kebijakan yang mendukung stabilitas harga dan peningkatan pendapatan; Meningkatkan realisasi belanja pemerintah, khususnya untuk proyek-proyek produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; Mendorong investasi lebih lanjut, baik dalam sektor industri maupun jasa, untuk memperkuat struktur ekonomi jangka Panjang; dan Meningkatkan produktivitas sektor pertanian, misalnya dengan modernisasi alat pertanian, peningkatan akses pasar, serta diversifikasi produk pertanian.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2023 sebesar 3,40% dan mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 3,65%. Hal ini disebabkan karena, pelaku UMKM mengalami pertumbuhan sehingga banyak tenaga kerja yang terserap dari usaha tersebut, dan juga pelatihan-pelatihan calon tenaga kerja lebih ditingkatkan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna tenaga kerja. Untuk dapat melihat perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Kota sekitar maka dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.3.1
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar

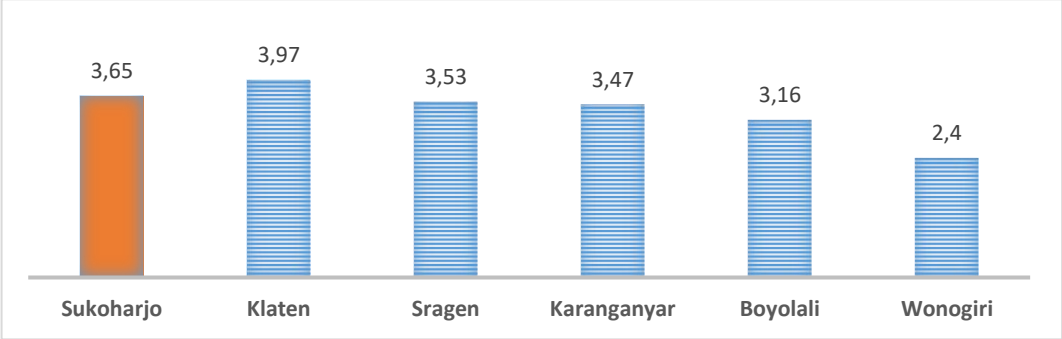

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data di atas, jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya se solo raya, untuk Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sukoharjo berada pada posisi ke tertinggi kedua dibawah Kabupaten Klaten, dengan angka 3,65%, dan Kabupaten Klaten sebesar 3,97%

Pada tahun 2024, Kabupaten Sukoharjo mencatatkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebesar 53,08 juta, lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 47,97 juta. Pertumbuhan ini didorong oleh beberapa faktor utama, seperti peningkatan konsumsi rumah tangga yang didorong oleh daya beli masyarakat pasca pandemi, investasi yang berfokus pada infrastruktur dan ekspansi usaha, serta kinerja ekspor yang semakin kompetitif. Selain itu, efisiensi belanja pemerintah dalam mendukung sektor produktif, seperti UMKM dan industri kreatif, turut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.

Untuk dapat melihat perbandingan PDRB per kapita Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2022 hingga tahun 2024 maka dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.3.2
PDRB Per Kapita Tahun 2022 s.d 2024

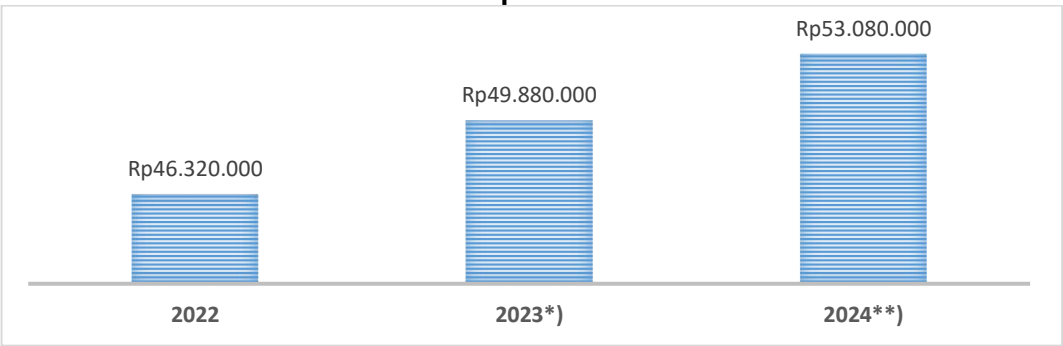

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2022 PDRB per kapita Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp. 46.320.000,- meningkat sampai tahun 2024 menjadi Rp. 53.080.000,-. Tren pertumbuhan ekonomi Sukoharjo juga menunjukkan pemulihan yang signifikan sejak 2020, dengan momentum yang semakin kuat pada tahun 2023 dan 2024. Meskipun ada pertumbuhan yang positif, tantangan utama yang perlu dihadapi adalah ketergantungan pada konsumsi domestik. Oleh karena itu, diperlukan diversifikasi ekonomi dengan memperkuat sektor manufaktur dan industri kreatif. Selain itu, kualitas investasi yang masuk harus dipastikan berorientasi pada peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi lokal, bukan sekadar investasi jangka pendek. Penguatan ekspor dan daya saing produk lokal juga perlu didorong melalui inovasi produk dan perluasan akses pasar. Terakhir, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, termasuk jalan, sarana transportasi, dan fasilitas industri, akan menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan 2 sasaran strategis, yaitu:

a. Sasaran 3.1 Meningkatnya pertumbuhan produktifitas.

Pencapaian kinerja pada sasaran 3.1, yaitu Meningkatnya pertumbuhan produktifitas tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.B.3.1.1
Capaian Kinerja Sasaran 3.1 Meningkatnya pertumbuhan produktifitas

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Realisasi 2023	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	14	31,66	226,14%	19,74	197,88%
2.	Pertumbuhan Usaha Mikro Ke Usaha Kecil	%	3,5	6,10	174,3%	1,6	164,9%
3.	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	5,30	5,25	99,06%	5,01	93,75%
4.	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	%	5,74	3,63	63,24%	3,23	56,72%
5.	Pertumbuhan investasi	%	20	-35,43	-177,15$	-23,25	-126,54%
6.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, dan Perikanan	%	2,8	1,34	47,86%	2,68	43,23%
7.	Skor Pola Pangan Harapan	%	93,8	93,9	100,11%	93,9	100%
8.	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota	%	84	63,54	75,64%	76,63	74,75%
Rata-rata Capaian					**76,15%**		**75,59%**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 3.1, yaitu Meningkatnya pertumbuhan produktifitas dapat dilihat bahwa capaian kinerja lebih tinggi dengan yang ditargetkan, sehingga rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar **76,15%** sehingga dapat dikategorikan **Baik.** Adapun realisasi dan capaian masing masing indikator sebagai berikut:

1) Pertumbuhan Wirausaha Baru pada tahun 2024 dengan target 14%, dapat terealisasi sebesar 31,66% sehingga capaiannya sebesar 226,14%. Hal tersebut berarti bahwa capaian kinerja dapat melebihi target yang diharapkan.
2) Pertumbuhan Usaha Mikro Ke Usaha Kecil pada tahun 2024 dari target sebesar 3,5% terealisasi sebesar 6,10%. Capaian kinerja pada indikator ini sebesar 174,3% atau telah melebihi target yang diharapkan.
3) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan yang memiliki target 5,08% dengan realisasi di tahun 2024 ini sebesar 5,25%. Realisasi tersebut belum mencapai target, namun terdapat peningkatan dibandingkan

dengan tahun 2023 dan 2022. Hal tersebut dikarenakan adanya konflik perang Rusia-Ukraina, konflik Palestina-Israel, meningkatnya harga minyak dunia, sehingga berpengaruh terhadap kondisi iklim perdagangan, adanya inflasi yang masih melanda, selain itu terjadinya penurunan harga komoditas global dan kinerja ekspor.

4) Pertumbuhan PDRB Sektor Industri tahun 2024 terealisasi sebesar 3,63% dari target 5,74% sehingga capaian yang diperoleh sebesar 63,24% atau kurang dari target. Hal ini dikarenakan kondisi pekonomian kabupaten sukoharjo yang cenderung mengalami penurunan salah satunya dikarenakan penanaman modal baik asing maupun domistik di wilayah kabupaten sukoharjo tergolong menurun, dan juga dikarenakan belum banyaknya para penanam modal atau investor yang berminat terhadap produk yang diciptakan oleh pengrajin dan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

   Adapun solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah melakukan koordinasi dengan DPMPTSP untuk mendorong penanaman modal baik asing maupun domistik agar tertarik menanamkan modalnya di Kabupaten Sukoharjo, yaitu dengan cara mempermudah proses perijinan terkait dengan penanaman modal, menciptakan keamanan yang kondusif serta penyiapan tenaga kerja yang cakap dan terampil serta melakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha di Kabupaten Sukoharjo untuk meningkat mutu dari produk yang dipasarkan.

5) Pertumbuhan investasi dengan target tahun 2024 sebesar 20% dapat terealisasi sebesar -35,43%, sehingga capaiannya -177,15%. Terdapat faktor-faktor tidak tercapaianya target yaitu:
   a) Jangka waktu pelaporan yang sangat singkat.
   b) Sistem pelaporan diportal OSS sering bermasalah (Maintenance) sehingga menyulitkan untuk menyetujui pelaporan yang sudah masuk.
   c) Tahun 2024 merupakan tahun politik, sehingga pelaku usaha menunggu kebijakan-kebijakan dari Kepala Daerah.

d) Perusahaan yang besar sudah mencapai tahap produksi sehingga pelaporan LKPM hanya tambahan kecil saja (tambahan modal tetap).

e) Untuk usaha mikro tidak dihitung dalam realisasi investasi.

6) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, dan Perikanan tahun 2024 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik terealisasi sebesar 1,34% dari target 2,8% sehingga capaian yang diperoleh sebesar 47,86%.

7) Skor Pola Pangan Harapan pada tahun 2024 dari target 93,8% terealisasi 93,9% sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100,11%.

8) Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota pada tahun 2024 dari target 84% terealisasi 63,54% sehingga capaian yang diperoleh sebesar 75,64% atau belum mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan kondisi perusahaan lokal maupun nasional banyak yang melakukan efisiensi sehingga terjadi Pemutusan Hubungan Kerja . Selain itu adanya perubahan pola pikir /mindset pencari kerja yang selektif dalam memilih pekerjaan. Adapun Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan meningkatkan pelatihan berbasis kompetensi , sehingga dapat meningkatkan jumlah calon tenaga terampil dan dapat di tempatkan di perusahaan yang sesuai kompetensinya dan juga dapat menjadi modal bagi calon tenaga kerja untuk berwirausaha secara mandiri, Pelatihan Keterampilan yang terdapat diBLK Kabupaten Sukoharjo dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Sukoharjo diantaranya Keterampilan Menjahit, Otomotif, tataboga, las, tatarias, service hp, keterampilan komputer.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel III.B.3.1.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024
Sasaran 3.1 Meningkatnya pertumbuhan produktifitas

No.	Indikator	Satuan	2022		2023		2024		
			Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3			4	5	6	7	8
1.	Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	31	258,33%	19,74	151,84%	14	31,66	226,14%
2.	Pertumbuhan Usaha Mikro Ke Usaha Kecil	%	16,35	583,93%	1,6	800%	3,5	6,1	174,29%
3.	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	4,13	88,06%	5,01	98,62%	5,30	5,25	99,06%
4.	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	%	4,44	82,68%	3,23	59,48%	5,74	3,63	63,24%
5.	Pertumbuhan investasi	%	n/a	n/a	-23,25	-145,31%	20	-35,43	-177,15
6.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, dan Perikanan	%	0,89	37,08%	2,68	103,08%	2,8	1,34	47,86%
7.	Skor Pola Pangan Harapan	%	93,8	100,21%	93,9	100,11%	93,8	93,9	100,11%
8.	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota	%	75,75	90,18%	76,63	91,22%	84	63,54	75,64%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa:

1) Pertumbuhan Wirausaha Baru pada tahun 2024 dengan target 14%, dapat terealisasi sebesar 31,66% sehingga capaiannya sebesar 226,14%. Hal tersebut berarti bahwa capaian kinerja dapat melebihi target yang diharapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 19,74%, tahun 2022 sebesar 31%, dan di tahun 2021 sebesar 26,34%, maka hal menunjukkan peningkatan karena banyaknya warga yang sudah mulai berusaha dan mendaftarkan NIB (Nomor Induk Berusaha) untuk usahanya, serta berbagai upaya yang dilakukan seperti kemudahan akses dalam mengurus NIB, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai (Mall Pelayanan Publik, GP3D, Gedung Menara Wijaya), dan adanya pendampingan dalam mengurus NIB melalui PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu). Pada tahun 2023 jumlah wirausaha yang sudah memiliki NIB sebanyak 26.868 orang dan pada tahun 2024 sebanyak 35.377 orang.
2) Pertumbuhan Usaha Mikro Ke Usaha Kecil pada tahun 2024 dari target sebesar 3,5% terealisasi sebesar 6,1%. Capaian kinerja pada indikator ini sebesar 174,3% atau telah melebihi target yang

diharapkan. Realisasi ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2023) yaitu 1,6% namun di tahun 2022 lebih tinggi yaitu sebesar 16,35%. Hal ini dikarenakan adanya perubahan klasifikasi kelas UMKM berdasarkan modal usahanya sesuai PP No.7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Jika dibandingkan dengan data tahun 2021 yaitu sebesar -0,67% disebabkan karena adanya beberapa pelaku usaha yang mulai bekerja kembali sebagai karyawan pada perusahaan – perusahaan pasca Covid-19. Pada tahun 2023, jumlah UMKM sebanyak 1.297 sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 1.376.

3) Realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan pada tahun 2024 sebesar 5,25% dengan target 5,3%. Hal ini menujukkan bahwa realisasi tidak mencapai target yang diharapkan, namun mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari -3,50% tahun 2020 sebanyak 9,2 poin menjadi 5,70% tahun 2021. Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 1,57 poin menjadi 4,13%. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan kembali menjadi 5,01%. Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.3.1.1
Perbandingan Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar

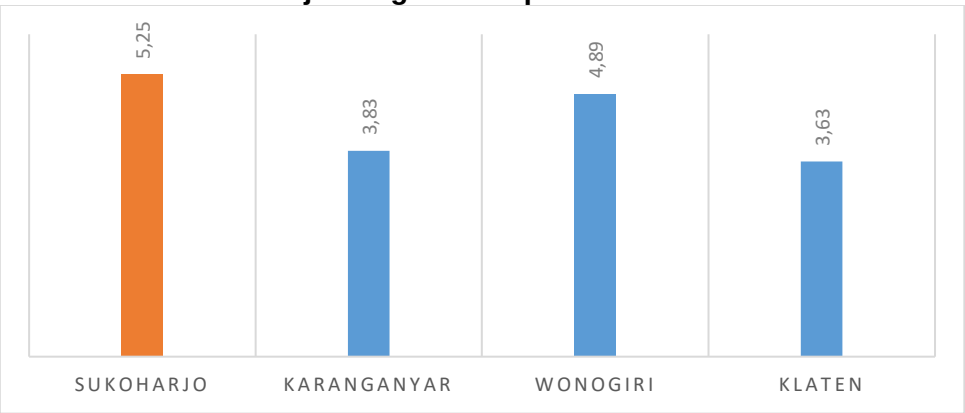

Sumber: Badan Pusat Statistik

Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Sukoharjo di tahun 2024 ini sebesar 5,25%. Angka ini naik jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2023 yang hanya sebesar 5,01%. Jika dibandingkan dengan beberapa Kabupaten sekitarnya, dalam contoh ini dibandingkan dengan Kabupaten Wonogiri yang capaiannya sebesar 4,89%, Kabupaten Klaten sebesar 3,63%, serta Kabupaten Karanganyar sebesar 3,83%, angka capaian PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Sukoharjo sudah lebih baik dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai dari 3 (tiga) Kabupaten sekitarnya.

4) Realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Industri pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar 3,63% jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 3,23% maka terdapat penurunan realisasi sebesar 0,40%. Sedangkan realisasi pada tahun 2022 sebesar 4,44. Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.3.1.2
Perbandingan Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Kabupaten Sukoharjo dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kota Sekitar

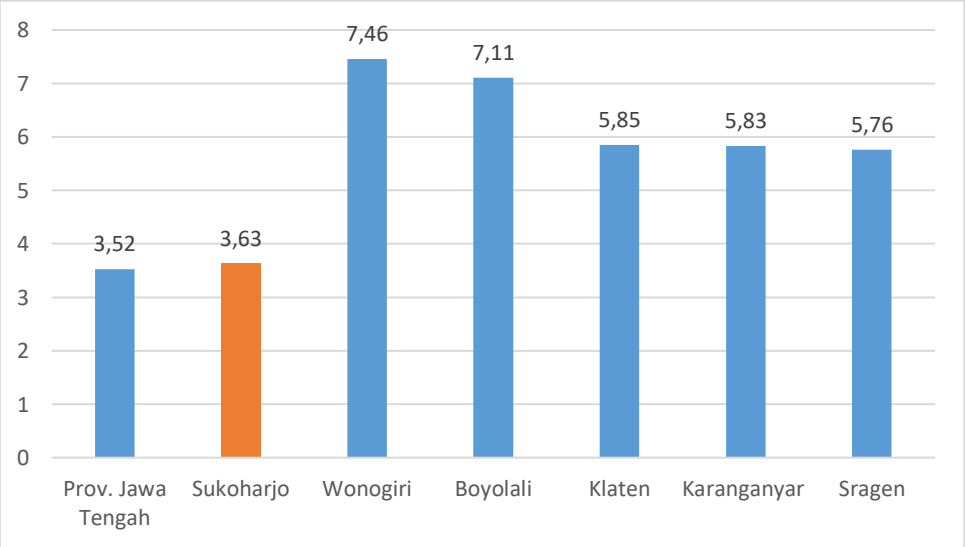

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Kabupaten Sukoharjo sebesar 3,63 diatas Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,52. Namun demikian, realisasi Kabupaten Sukoharjo lebih rendah dari Kabupaten Wonogiri sebesar 7,46;

Kabupaten Boyolali sebesar 7,11; Kabupaten Klaten sebesar 5,85; Kabupaten Karanganyar sebesar 5,83; dan Kabupaten Sragen sebesar 5,76.

5) Realisasi indikator Pertumbuhan investasi pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar -35,43% jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar -23,25% maka terdapat penurunan realisasi sebesar -12,18%. Pertumbuhan investasi berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dikarenakan target yang dijadikan dasar adalah realisasi investasi di tahun sebelumnya, dimana target realisasi investasi Tahun 2023 sebesar 2 triliyun, tercapai realisasi investasi sebesar 1,4 triliyun, sedangkan target realisasi investasi tahun 2024 sebesar 0,9 Triliyun, realisasi investasi sebesar 0,94 triliyun, sehingga pertumbuhan realisasi investasi turun menjadi -35,43%.

Adapun realisasi investasi dari tahun 2021 hingga tahun 2023 sebagai berikut:

Gambar III.B.3.1.3
Realisasi Investasi di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan LKPM Tahun 2022 s.d 2024

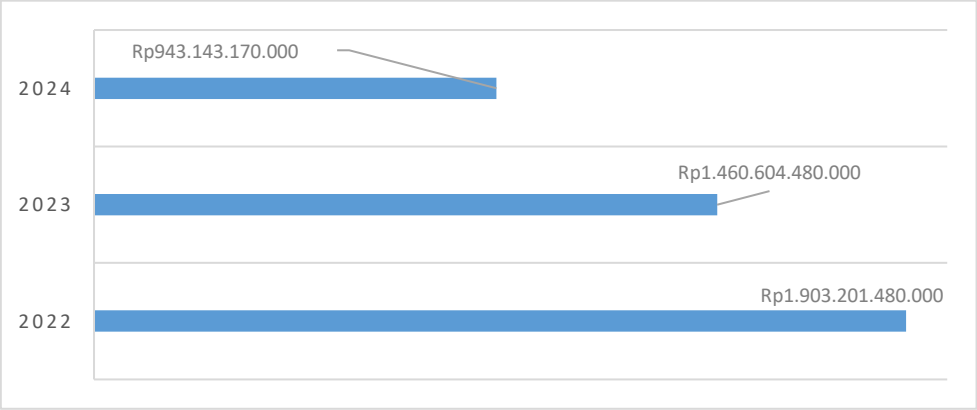

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan grafik diatas, realisasi investasi di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.903.201.480.000,- kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi Rp. 1.460.604.480.000,-. Sementara pada tahun 2024, realisasi investasi di Kabupaten Sukoharjo Kembali mengalami penurunan menjadi Rp. 943.143.170.000,-. Untuk dapat melihat sejauh mana Realisasi

Investasi Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.3.1.4
Perbandingan Realisasi Investasi Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar

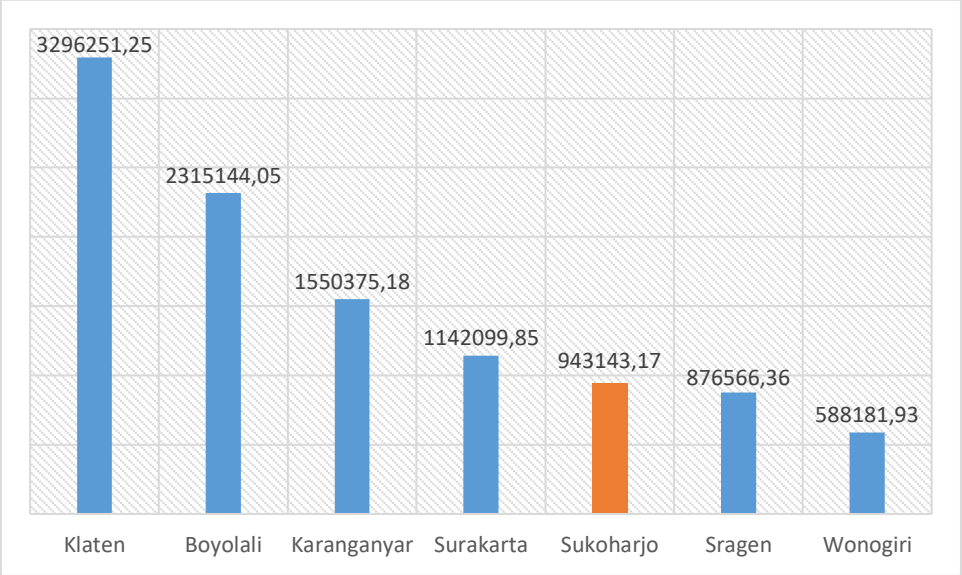

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa realisasi investasi Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 sebesar Rp. 943.143.170.000,- jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar berada pada peringkat lima setelah Kabupaten Klaten dengan realisasi Rp. 3.296.251.250.000,-; Kabupaten Boyolali sebesar Rp. 2.315.144.050.000,- ; Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 1.550.375.180.000,- dan Kota Surakarta sebesar Rp. 1.142.099.850.000,- Meskipun demikian, realisasi investasi Kabupaten Sukoharjo lebih tinggi dari Kabupaten Sragen sebesar Rp. 876.566.360.000,- ; dan Kabupaten Wonogiri sebesar Rp. 588.181.930.000,-.

6) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, dan Perikanan pada tahun 2022 terealisasi 0,89%, tahun 2023 terjadi kenaikan realisasi menjadi 2,68%, sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 1,34%. Ini menjadikan kinerja sektor pertumbuhan pertanian ada dibawah target Kinerja yang dibawah target ini disebabkan oleh penurunan produksi pertanian di Tahun 2024 yang diakibatkan karena anomali iklim yang pada tahun 2024 merupakan iklim kering sehingga

mengganggu proses produksi di sektor pertanian dan sektor perikanan; dan turunnya investasi dan sektor pekerjaan di sektor pertanian sehingga membuat peningkatan pergerakan ekonomi menurun pada semua sisi selain hanya produksi. Untuk dapat melihat sejauh mana Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.3.1.5
Perbandingan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota Sekitar

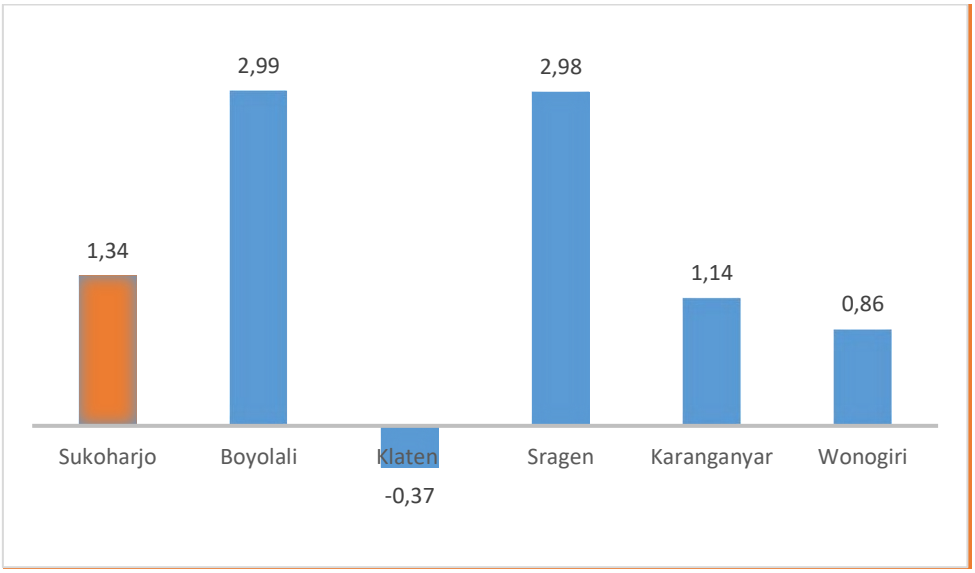

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, dan Perikanan apabila dibandingkan dengan daerah sekitar, secara umum kinerja kita diatas nomor 3 dibawah Kabupaten Sragen dan Boyolali dari total 6 Kabupaten yang ada. Kondisi ini dikarenakan di Kabupaten Sragen dengan luas wilayah yang jauh lebih besar volume ekonomi di sektor pertanian dibandingkan kabupaten sukoharjo juga lebih besar hal ini juga terlihat bahwa di Kabupaten Sragen sektor pertanian mempunyai kontribusi kurang lebih 13% dibandingkan dengan Kabupaten Sukoharjo kurang lebih 8%. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Boyolali, sektor pertaniannya didukung subsektor peternakan yang didukung oleh

industri ternak sapi perah (susu) yang mapan sehingga mampu menopang skala ekonomi di sektor pertanian dan perikanan.

7) Skor Pola Pangan Harapan pada tahun 2022 terealisasi sebesar 93,8. Adapun Skor Pola Pangan Harapan memiliki realisasi yang sama pada tahun 2023 dan tahun 2024, yaitu 93,9%. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan. Dengan adanya sosialisasi, pembinaan serta pelatihan diversifikasi pangan secara berkelanjutan kepada masyarakat (produsen dan konsumen) dengan cakupan semakin luas setiap tahun, serta informasi yang semakin mudah diakses melalui media sosial, mendorong semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan. Sehingga mendorong terwujudnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang semakin baik. Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.3.1.6
Perbandingan Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar

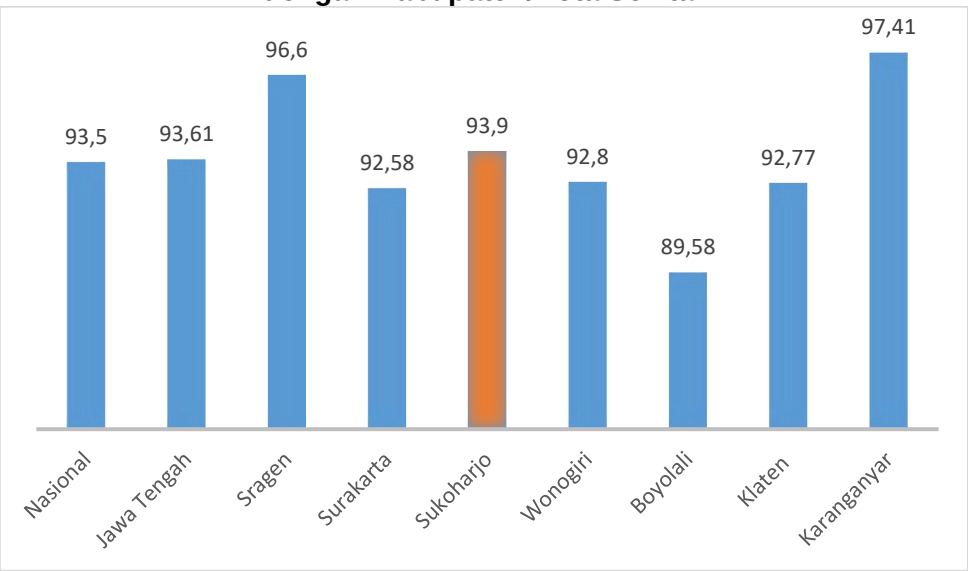

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sukoharjo sebesar 93,9% jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar berada pada peringkat ketiga setelah Kabupaten Karanganyar dengan realisasi sebesar 97,41% dan

Kabupaten Sragen dengan realisasi sebesar 96,6%. Skor PPH Kabupaten Sukoharjo realisasinya lebih tinggi jika dibandingkan dengan Skor PPH nasional sebesar 93,5 dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 93,61. Data Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sukoharjo menggunakan hasil survei mandiri, sedangkan data Skor PPH Nasional dan Provinsi Jawa Tengah menggunakan hasil susenas dari BPS.

8) Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota pada tahun 2022 terealisasi 75,75, tahun 2023 terealisasi 76,63% dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 63,54%. Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.3.1.7
Perbandingan Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota lain dan Provinsi Jawa Tengah

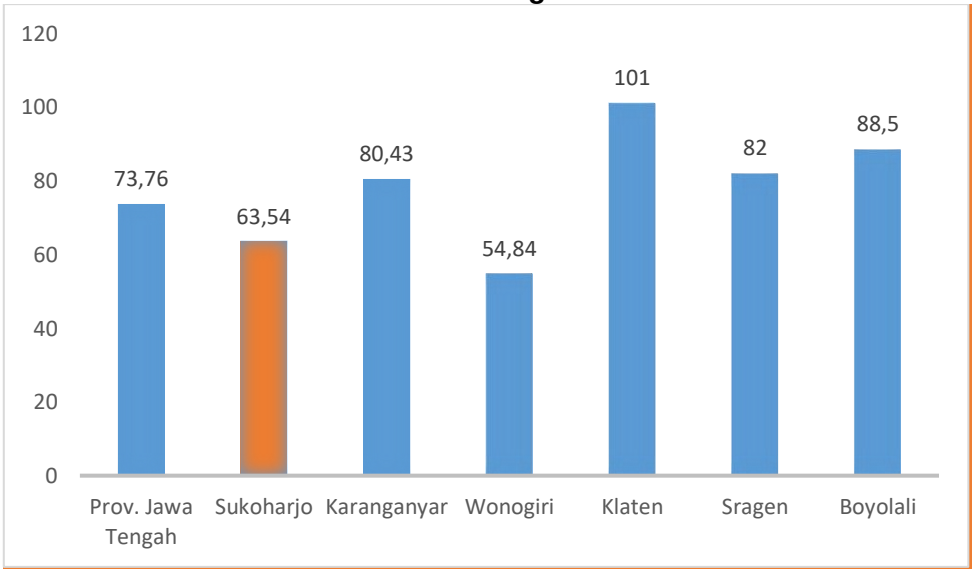

Sumber: Dispernaker Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja Kabupaten Sukoharjo sebesar 63,54% jika dibandingkan

dengan Kabupaten/Kota sekitar dan provinsi Jawa Tengah maka Kabupaten Sukoharjo berada pada posisi keempat setelah Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah. Meskipun demikian, persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja Kabupaten Sukoharjo lebih tinggi dari Kabupaten Wonogiri sebesar 54,84%.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2024 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.B.3.1.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2024 dengan Target RPJMD
Sasaran 3.1 Meningkatnya pertumbuhan produktifitas

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2024	Target Akhir RPJMD (2026)	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
1.	Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	31,66	16	197,88%
2.	Pertumbuhan Usaha Mikro Ke Usaha Kecil	%	6,10	3,70	164,9%
3.	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	5,25	5,60	93,75%
4.	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	%	3,63	6,40	56,72%
5.	Pertumbuhan investasi	%	-35,43	28	-126,54%
6.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, dan Perikanan	%	1,34	3,10	43,23%
7.	Skor Pola Pangan Harapan	%	93,9	93,9	100%
8.	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota	%	63,54	85,00	74,75%
Rata-rata capaian kinerja					**75,59%**

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target akhir yang telah ditetapkan dalam RPJMD maka rata-rata capaian sasaran 3.1 adalah **75,59%**. Adapun capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

1) Pertumbuhan Wirausaha Baru memperoleh realisasi sebesar 31,66% dari target akhir RPJMD sebesar 16% sehingga capaiannya telah melampaui target akhir RPJMD sebesar 197,88%.

2) Pertumbuhan Usaha Mikro Ke Usaha Kecil memperoleh realisasi sebesar 6,10% dari target akhir RPJMD sebesar 3,70% sehingga capaiannya telah melampaui target akhir RPJMD sebesar 164,9%.
3) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan memperoleh realisasi sebesar 5,25% dari target akhir RPJMD sebesar 5,60% sehingga capaian terhadap target akhir sebesar 93,75% dan telah melampui target akhir RPJMD.
4) Pertumbuhan PDRB Sektor Industri memperoleh realisasi 3,63% dari target akhir RPJMD sebesar 6,4% sehingga capaian yang diperoleh baru 56,72%.
5) Pertumbuhan investasi memperoleh realisasi sebesar -35,43% dari target akhir RPJMD sebesar 28% sehingga capaiannya terhadap target akhir RPJMD sebesar -126,54%.
6) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, dan Perikanan memperoleh realisasi sebesar 1,34% dari target akhir RPJMD sebesar 3,10% sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 43,23%.
7) Skor Pola Pangan Harapan memperoleh realisasi sebesar 93,9% dari target akhir RPJMD sebesar 93,9% sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 100%.
8) Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota memperoleh realisasi sebesar 63,54% dari target akhir RPJMD sebesar 85% sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 74,75%.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.3.1.4
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 3.1

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pertumbuhan produktifitas	76,15%	Rp. 38.756.607.854	Rp. 34.820.077.570	-15,24

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator pada Sasaran 3.1 sebesar 76,15% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 38.756.607.854,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.820.077.570,- sehingga efisiensinya sebesar -15,24%.

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 3.1, melalui:

1) Pertumbuhan Wirausaha Baru Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.190.675.520,- dengan realisasinya Rp 2.124.293.084,- atau 96,7%.
2) Pertumbuhan Usaha Mikro ke Usaha Kecil Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, dan Program Pengembangan UMKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp 380.449.700,- dan Realisasinya Rp 378.910.312,- atau 99,6%.
3) Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan Program Perizinan dan Pendaftaran Usaha, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, dan Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.833.685.436,- dan realisasinya Rp 8.693.387.888,- atau 98,41%.
4) Pertumbuhan PDRB sektor industri dilaksanakan pada program berikut:
   a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan anggaran Rp. 336.448.000,- terealisasi Rp. 333.840.300,- atau (99,22%);
   b) Program pengendalian izin usaha industri dengan anggaran Rp. 46.250.000,- terealisasi Rp. 46.164.000,- atau (99,81%);
   c) Program Pengelolaan sistem informasi industri nasional dengan anggaran Rp. 130.500.000,- terealisasi Rp. 129.770.476,- atau (99,44%).

5) Pertumbuhan Investasi dilaksanakan pada program berikut:
   a) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 28.689.334,- atau 88,27%;
   b) Program Promosi Penanaman Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 85.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 84.735.180,- atau 99,69%;
   c) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 451.245.000,- terealisasi sebesar Rp. 358.276.500,- atau 79,40%.
6) Pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan dilaksanakan pada program berikut:
   a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.711.372.000,- dan terealisasi sebesar Rp .648.644.480,- atau 98,31%.
   b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp 13.270.692.852,- dan realisasi sebesar Rp 13.162.769.040,- atau 99,19%.
   c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan alokasi anggaran sebesar Rp 563.037.570,- dan terealisasi sebesar Rp 556.900.136,- atau 98.81%.
   d) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Alam dengan alokasi anggaran sebesar Rp 530.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 517.577.160,- atau 97,66%.
   e) Program Perizinan Usaha Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 14.994.800,- atau 99,97%.
   f) Program Penyuluhan Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.417.174.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.410.719.680,- atau 99,54%.

g) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan alokasi anggaran sebesar Rp 103.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 102.625.000,- atau 99,15 %.

h) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 563.900.776,- dan terealisasi sebesar Rp 557.744.700,- atau 98,91%.

i) Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 9.999.000,- atau 99,99%.

j) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 102.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp 102.554.300,- atau 99,95%.

7) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dilaksanakan pada program berikut:

a) Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 198.337.000,- terealisasi sebesar Rp. 197.574.000,- atau tercapai 99,62%;

b) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan alokasi anggaran Rp. 1.545.626.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.539.041.000,- atau tercapai 99,57%;

c) Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 176.430.000,- terealisasi sebesar Rp. 172.373.000,- atau tercapai 97,70%;

d) Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan alokasi anggaran Rp. 57.386.000,- terealisasi sebesar Rp. 57.314.000,- atau tercapai 99,87%;

e) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.685.798.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.274.820.000,- atau tercapai 88,85%.

8) Program yang mendukung indikator sasaran Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota adalah Program Penempatan

Tenaga kerja dengan anggaran Rp. 319.000.000,- terealisasi Rp. 316.360.200,- atau 99,17%.

b. Sasaran 3.2 Meningkatnya kemandirian desa.

Pencapaian kinerja pada sasaran 3.2 Meningkatnya kemandirian desa, tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.B.3.2.1
Capaian Kinerja Sasaran 3.2 Meningkatnya kemandirian desa

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Realisasi 2023	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,7698	0,7946	**103,22%**	0,7698	**103,78%**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **Sasaran 3.2,** yaitu: Meningkatnya kemandirian desa, dengan indikator kinerja Indeks Desa Membangun (IDM) terealisasi pada tahun 2024 sebesar 0,7946 dari target 0,7698. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih tinggi dengan yang ditargetkan, sehingga capaian kinerja pada sasaran ini sebesar **103,22%** sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel III.B.3.2.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024
Sasaran 3.2 Meningkatnya kemandirian desa

No.	Indikator	Satuan	2022		2023		2024		
			Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3			4	5	6	7	8
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,7410	100,73%	0,7698	103,25%	0,7698	0,7946	103,22%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi indikator Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun 2022 sampai 2024 mengalami peningkatan, tahun 2022 sebesar 0,7410, tahun 2023 sebesar 0,7698 dan tahun 2024 sebesar 0,7946.

Hal ini dapat tercapai sesuai petunjuk Bupati Sukoharjo melalui DPMD Kabupaten Sukoharjo melakukan upaya peningkatan IDM dengan kolaborasi melibatkan beberapa OPD terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, DPU dan Penataan Ruang, BPBD serta beberapa OPD terkait lainnya termasuk unsur Kecamatan dan pendamping desa Kemendes sehingga diharapkan dapat memfasilitasi desa dalam rangka meningkatkan dalam penilaian IDM.

Selain Kolaborasi dengan OPD teknis beberapa hal yang mendorong keberhasilan tercapainya IDM di Kabupaten Sukoharjo antara lain : Salah satu indikator keberhasilan kepemimpinan seorang kepala desa, menjadi status desa menjadi mandiri, Munculnya kesadaran tumbuhnya Jiwa Bangun Desa berangsur-angsur mengurangi ketergantungan pihak lain dengan pemanfaatan potensi dan pengelolaan sumber daya secara mandiri, melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Adapun kendala atau hambatan yang ditemui dalam pencapaian target adalah sebagai berikut :

1) Masih adanya informasi yang tidak benar bahwa desa berstatus mandiri tidak akan mendapatkan bantuan lagi dan atau pengurangan bantuan sedangkan nyatanya banyak desa mendapatkan apresiasi / penghargaan justru karena status desa mandiri desa berstatus mandiri;
2) Belum seluruh program kegiatan baik pemerintah desa dan kabupaten memiliki target kinerja yang merujuk pada IDM/Strata Desa dan minimnya pembinaan dan pengawasan;
3) Kemampuan Perangkat Desa yang masih kurang dalam memahami dimensi pembentuk IDM sehingga terdapat kesalahan penginputan data.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam upaya meningkatkan pembangunan desa yang merujuk pada Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu:

1) Optimalisasi peran pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan desa yang memiliki target kinerja yang merujuk pada Indeks Desa Membangun (IDM);
2) Melakukan koordinasi dengan Perangkat daerah teknis agar dalam setiap program kegiatannya dapat melakukan intervensi langsung kepada desa yang membutuhkan;
3) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Perangkat Daerah lainnya melakukan serangkaian upaya peningkatan pembangunan desa yang merujuk pada Indeks Desa Membangun, antara lain:
   a. Secara pragmatis: melakukan Validitas dan pemuktakhiran data pada pengisisan indikator IDM, Validitas dan intervensi program kegiatan pada peningkatan nilai skor IDM yang lemah / kecil.
   b. Secara Substantif: optimalisasi potensi dan sumberdaya desa serta kawasan perdesaan, pemanfaatan & pengembangan potensi dan sumberdaya dalam wujud inovasi program kegiatan.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2024 dengan target akhir RPJMD sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel III.B.3.2.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2024 dengan Target RPJMD
Sasaran 3.2 Meningkatnya kemandirian desa

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2024	Target Akhir RPJMD (2026)	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,7946	0,7656	103,78%

Realisasi kinerja indikator Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,7946 pada tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar 0,7656 maka capaiannya adalah 103,78%. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), status desa-desa di Kabupaten Sukoharjo di Tahun 2024 adalah sebagai berikut : Desa Tertinggal : 0 Desa; Desa Berkembang : 0 Desa; Desa Maju : 89 Desa dan Desa Mandiri : 61 Desa.

Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi Indeks Desa Membangun Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.3.2.1
Perbandingan Indeks Desa Membangun Kabupaten Sukoharjo dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Boyolali

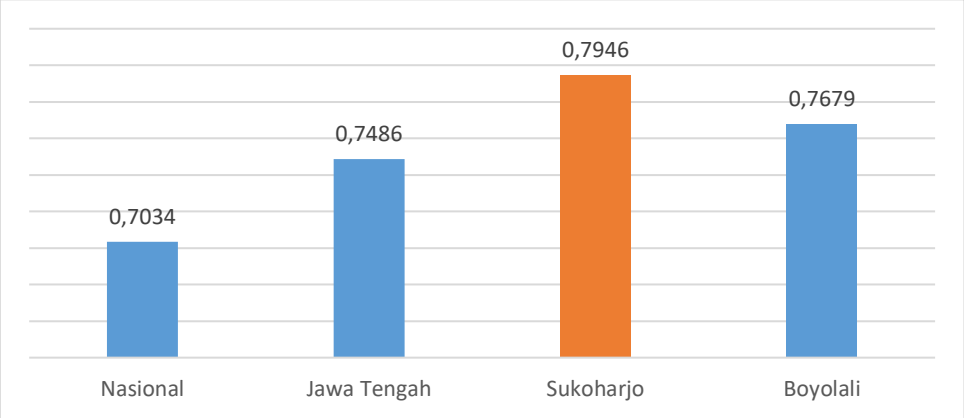

Sumber: Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024.

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa Indeks Desa Membangun Kabupaten Sukoharjo senilai 0,7946 melebihi rata-rata nasional senilai 0,7034, rata-rata Jawa Tengah dengan nilai 0,7486 dan melebihi Kabupaten Boyolali dengan nilai 0,7679.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.3.2.4
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 3.2

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kemandirian desa	103,22%	Rp. 23.294.579.200	Rp. 22.396.578.793	7,36

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator pada Sasaran 3.2 sebesar 103,25% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.294.579.200,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.396.578.793,- sehingga efisiensinya sebesar 7,36%.

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 3.2, melalui:

1) Program Ururan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.534.141.800,- terealisasi sebesar Rp. 4.848.701.170,- atau 87,61%.
2) Program Penataan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.951.538.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.931.255.100,- atau 99,49%.
3) Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 164.180.000,- terealisasi sebesar Rp. 160.080.000,- atau 97,50%.
4) Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.490.782.800,- terealisasi sebesar Rp. 3.305.844.720,- atau 94,70%.
5) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.153.936.600,- terealisasi sebesar Rp. 10.150.697.803,- atau 99,97%.

4) Tujuan keempat : Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun 2024, pencapaian kinerja untuk tujuan adalah sebagai berikut:

Tabel III.B.4
Capaian Kinerja Tujuan 4
Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan

No.	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2024			% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
				Realisasi	Capaian	Realisasi 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)	Nilai	68,26	73,79	108,05%	67,69	99,45%
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	61,32	63,59	103,70%	62,03	103,38%
3.	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	81,29	64,18	121,05%	71,27	130,24%
Rata-rata Capaian					110,93%		111,02%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan 4, yaitu Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dari 3 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya rata-rata capaian kinerja tujuan mencapai **110,93%**, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**. Indeks pembangunan infrastruktur adalah ukuran yang mengindikasikan perkembangan dan kemajuan dalam pembangunan infrastruktur suatu negara atau wilayah. Indeks ini biasanya mencakup berbagai faktor seperti pembangunan jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya yang penting untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nilai indeks pembagunan Infrastruktur di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 sebesar 73,79 dari target 68,26% dengan capaian 108,05%. Terdapat peningkatan sebesar 6,1% dibandingkan dengan tahun 2023, yang menunjukkan kemajuan dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah fokus pada pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan desa, laboratorium kesehatan, dan gedung serbaguna. Ini berkontribusi pada peningkatan indeks pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah dengan meningkatkan aksesibilitas, menurunkan biaya logistik, dan mendorong investasi. Peningkatan infrastruktur juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan akses yang lebih baik ke layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Perhitungan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ditentukan berdasarkan 3 indikator kualitas lingkungan meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Adapun

persentase kontribusi dari setiap indeks yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 0,376; Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 0,405 dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 0,219. Nilai IKLH dapat dikategorikan sebagaimana pada tabel berikut:

Skor	Kriteria
90 ≤ x < 100	Sangat Baik
70 ≤ x < 90	Baik
50 ≤ x < 70	Sedang
25 ≤ x < 50	Kurang
0 ≤ x < 25	Sangat Kurang

Berdasarkan hasil penghitungan diperoleh hasil bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2024 sebesar 63,59 dan termasuk ke dalam kategori ”SEDANG”. Selama tahun 2021 hingga 2024, nilai IKLH mengalami penurunan pada tahun 2022, lalu meningkat pada tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2022, nilai IKLH mengalami penurunan sebesar 2,39 (3,74%). Hal ini disebabkan karena nilai IKA dan IKU pada tahun 2022 juga mengalami penurunan. Pada tahun 2023, nilai IKLH mengalami kenaikan sebesar 0,59 (0,96%). Kenaikan ini disebabkan karena nilai IKA dan IKU pada tahun 2023 juga mengalami kenaikan, dan nilai IKL juga sedikit mengalami penurunan. Pada tahun 2024, nilai IKLH Kabupaten Sukoharjo sebesar 63,59. Nilai ini sudah melebihi target yang ditetapan dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo yaitu sebesar 61,32. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai IKLH pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,56 (2,51%). Kenaikan nilai IKLH ini disebabkan karena adanya kenaikan pada nilai IKA, IKU dan IKTL dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Adapun perbandingan IKLH Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024 sebagai berikut:

Gambar III.B.4.1
Perbandingan IKLH Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024

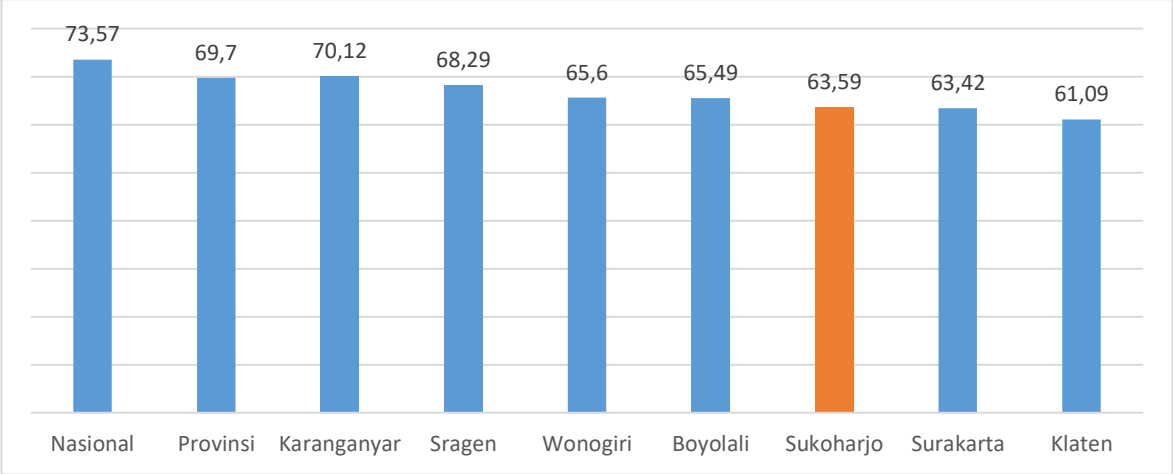

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sukoharjo sebesar 63,59 lebih kecil dari realisasi Kabupaten Karanganyar sebesar 70,12; Kabupaten Sragen sebesar 68,29; Kabupaten Wonogiri sebesar 65,6; dan Kabupaten Boyolali sebesar 65,49. Meskipun demikian, IKLH Kabupaten Sukoharjo lebih besar dari IKLH Kota Surakarta sebesar 63,42 dan Kabupaten Klaten sebesar 61,09. Nilai IKLH Kabupaten Sukoharjo lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai IKLH Provinsi Jawa Tengah sebesar 69,7 dan lebih kecil jika dibandingkan dengan nasional sebesar 73,57.

Perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) merupakan suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian. Berdasarkan perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dilakukan oleh Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, nilai IRB Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 adalah 64,18 atau masuk ke kelas risiko sedang. Jika dibandingkan dengan nilai indeks tahun 2023 (71,27), maka nilai IRB Kabupaten Sukoharjo turun sebesar 7,09 poin di tahun 2024. Upaya mengurangi indeks risiko bencana mampu dilaksanakan dengan implementasi pada fase perencanaan, pelaksaan, dan monitoring serta evaluasi. Program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan telah dilaksanakan secara lintas sektor. Pengarusutamaan pengurangan risiko

bencana dalam program kegiatan lintas sektor ini diharapkan dapat berlangsung lebih baik dengan adanya instrumen kebijakan yang lebih mendukung pada program penanggulangan bencana. Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.4.2
Perbandingan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar, dan Provinsi Jawa Tengah

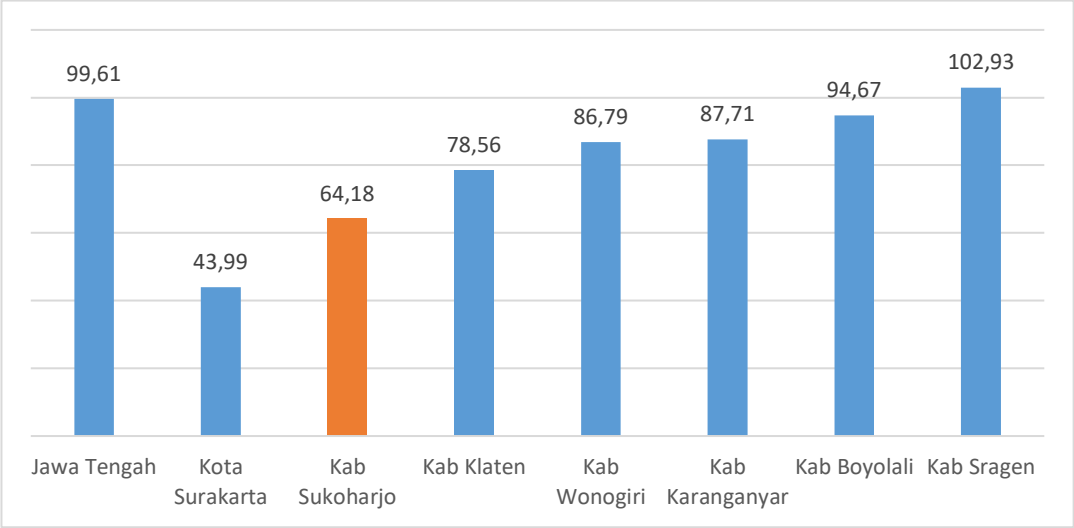

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sukoharjo sebesar 64,18 lebih tinggi dari Kota Surakarta sebesar 43,99. Meskipun demikian, Indeks Risiko Bencana Kabupaten lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 99,61; Kabupaten Klaten sebesar 78,56; Kabupaten Wonogiri sebesar 86,79; Kabupaten Karanganyar sebesar 87,71; Kabupaten Boyolali sebesar 94,67; dan Kabupaten Sragen 102,93.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan 2 sasaran, yaitu:

a. Sasaran 4.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur.

Pencapaian kinerja sasaran 4.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur, tercermin pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.B.4.1.1
Capaian Kinerja Sasaran 4.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Realisasi 2023	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prosentase Lingkungan Hunian Layak	%	84,7	91,63	108,18%	88,57	100,90%
2.	Indeks Layanan Infrastruktur	Nilai	70,79	69,44	98,09%	67,55	97,28%
3.	Indeks Fatalitas	Angka	0,256	0,06	176,56%	0,047	176%
4.	Cakupan layanan telekomunikasi	**%**	100	100	100%	100	100%
Rata-rata Capaian					**120,71%**		**118,55%**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 4.1, yaitu Meningkatnya kualitas infrastruktur, diperoleh rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar **120,71%** sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik.** Adapun hasil pengukuran kinerja Sasaran 4.1 dapat dilihat bahwa:

1) Prosentase Lingkungan Hunian Layak merupakan indikator kumulatif dimana realisasi sampai dengan tahun 2024 berjumlah 91,63% dari target 84,7%. Capaian untuk indikator ini adalah 108,18% dari target yang diharapkan.
2) Indeks Layanan Infrastruktur pada tahun 2024 memiliki target 70,79 dengan realisasi 69,44. Capaian untuk indikator ini belum mencapai 98,09% dari target yang diharapkan.
3) Indek Fatalitas pada tahun 2024 memiliki target 0,256 dengan realisasi 0,06. Capaian untuk indikator ini adalah 176,56% telah melebihi target yang diharapkan.
4) Cakupan layanan telekomunikasi pada tahun 2024 memiliki target 100% dengan realisasi 100%. Capaian untuk indikator ini adalah 100% telah sesuai target yang diharapkan.

Sedangkan untuk perbandingan pencapaian Sasaran 4.1 tahun 2023 dan tahun 2024 tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III.B.4.1.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan 2024
Sasaran 4.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur

No.	Indikator	Satuan	2023		2024		
			Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prosentase Lingkungan Hunian Layak	%	88,57	108,48%	84,7	91,63	108,18%
2.	Indeks Layanan Infrastruktur	Nilai	67,55	99,19%	70,79	69,44	98,09%
3.	Indeks Fatalitas	Angka	0,047	181,92%	0,256	0,06	176,56%
4.	Cakupan layanan telekomunikasi	%	100	134,15%	100	100	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa:

1) Prosentase Lingkungan Hunian Layak memiliki realisasi 88,57% pada tahun 2023 dan terjadi kenaikan menjadi 91,63% pada tahun 2024.
2) Indeks Layanan Infrastruktur memiliki realisasi 67,55 pada tahun 2023 dan terjadi peningkatan realisasi menjadi 69,44 pada tahun 2024. Indeks Layanan Infrastruktur didukung oleh 6 (enam) indikator yaitu akses air minum yang layak, akses layanan sanitasi, rasio jaringan irigasi, persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat, rasio bangunan sesuai ketentuan, dan proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel III.B.4.1.3
Capaian Indeks Layanan Infrastruktur

Indikator	2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Layanan Infrastruktur	68,36	**67,68**	99	69,6	**67,5**	97	70,79	**69,44**	98,09
Akses air minum layak	96	93,23	97,11	93,79	93,83	95,7	100	94	94
Akses Sanitasi Layak	98,5	97,91	99,4	95,99	93,61	97,5	100	99,97	99,97
Proporsi jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	88,2	88,2	100	88,25	89,36	101	88,3	89,54	101,40
Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	46	46	100	50	50	100	53	53	100
Prosentase drainase dalam kondisi baik	6,56	6,53	99,54	7,03	6,64	94,5	7,55	7,45	98,68
Rasio bangunan sesuai dengan ketentuan	26,24	26,24	100	26,63	26,48	99,4	27,01	26,97	99,85

Sumber: DPUPR Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024, terdapat satu indikator indeks layanan infrastruktur yang memiliki capaian kurang dari 100% sebagai berikut:

a) Akses air minum layak.

Akses air minum layak capaian kinerja 94 % dari target 100% realisasi 94 %. Untuk capaian adalah belum tercapai, dikarenakan:

- Tidak semua lokasi di Kabupaten Sukoharjo memenuhi standar/ kriteria pembangunan IPAL.
- Tidak tersedianya lahan untuk dibangun IPAL (diantaranya terkait aset/ kepemilikan lahan).
- Kondisi geografis dan topografi yang tidak memungkinkan untuk dibangun SPALD-T atau IPAL Skala Permukiman (diantaranya dekat dengan badan air yang airnya selalu mengalir dan kemiringan lahan diharapkan posisi IPAL pada daerah yang lebih rendah dari daerah layanan).
- Ketidaksiapan dan tidak adanya minat masyarakat terhadap pembangunan SPALD-T atau IPAL Skala Permukiman (kesiapan dan minat masyarakat juga menentukan keberhasilan pembangunan).
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah domestik ataupun Perilakau Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- Kondisi Septic Tank/ SPALD-S terbangun tidak dapat dipastikan sudah aman/ kedap.
- Belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat.Akses realisasi 96,02 %. Untuk capaian belum tercapai dikarenakan.

b) Akses sanitasi layak.

Akses sanitasi layak capaian 96,02 % dari target 100% realisasi 96,02 % ,sehingga untuk capaian belum tecapai dikarenakan belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat,tidak semua lokasi di Kabupaten Sukoharjo memenuhi standar/kriteria pembangunan IPAL ,dan kondisi septi tank/SPALD-S terbangun tidak dapat dipastikan sudah aman/kedap.

c) Prosentase drainase dalam kondisi baik.

Prosentase drainase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat capaian kinerja 98,68 % dari target 7,55 % realisai 7,45 %. Untuk capaian kinerja adalah belum tercapai, dikarenakan dalam pelaksanaan banyak penyesuaian dengan kondisi di lapangan berupa dimensi (ukuran desain saluran) dan konstruksi saluran yang digunakan.

d) Rasio bangunan sesuai dengan ketentuan.

Rasio bangunan sesuai dengan ketentuan capaian kinerja 99,85 % dari target 27,01 % realisasi 26,97 %. Untuk capaian belum tercapai dikarenakan kurang kesadaran masyarakat terhadap peraturanterkait perizinan Bangunan Gedung.

3) Indeks Fatalitas memiliki realisasi 0,06 dari target 0,256 atau sebesar 176,56%. Dibandingkan tahun 2023, Indeks Fatalitas tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,013 dari 0,047 menjadi 0,06, selain itu dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan 0,01. Indeks Fatalitas ini diperoleh dari total jumlah orang yang meninggal dunia dibagi dengan total kejadian kecelakaan pada tahun yang bersangkutan. Berikut tabel jumlah orang yang meninggal dunia dan jumlah kejadian kecelakaan selama tiga tahun terakhir.

Tabel III.B.4.1.4
Indeks Fatalitas Tahun 2022 – 2024

Tahun	Jumlah Orang Yang Meninggal	Jumlah Kejadian Kecelakaan	Indeks Fatalitas
2022	90	1.527	0,059
2023	70	1.486	0,047
2024	91	1.514	0,060

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

Dari tabel di atas diketahui Indeks Fatalitas di Kabupaten Sukoharjo mengalami fluktuatif. Ada beberapa faktor pendukung yang mempengaruhinya, diantaranya tersedianya prasarana perlengkapan jalan (Meliputi tersedianya belanja penerangan jalan umum di ruas Jalan Kabupaten, pemasangan guardrail atau pagar pengaman jalan, pemasangan tiang penerangan jalan umum, pemasangan rambu bersuar dan tidak bersuar, serta terselenggaranya Keselamatan Lalu

Lintas Angkutan Jalan yang berupa sosialisasi keselamatan yang dilaksanakan di beberapa SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Sukoharjo), tersedianya sarana perlengkapan jalan (tersedianya halte di ruas Jalan Kabupaten, terlaksananya uji KIR untuk kendaraan wajib uji, terealisasinya sosialisasi Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji, terlaksananya sosialisasi pemilik bengkel umum kendaraan bermotor, terlaksananya Uji Petik untuk meningkatkan kesadaran wajib uji, dan terlaksananya Pemilihan Abi Yaksa Teladan).

4) Pada indikator Kinerja Cakupan Layanan Telekomunikasi, nilai cakupan yang telah dicapai pada tahun 2022 adalah 59%. Pada tahun 2023 telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 68%. Pada tahun 2024 cakupan layanan telekomunikasi sebesar 100%. Dari segi kuantitas telah tercapai 100% pada tahun 2023 tetapi ada peningkatan kualitas layanan telekomunikasi yaitu peningkatan bandwith internet dari sebesar 4GB di tahun 2023 menjadi 5GB di tahun 2024 dan peningkatan kapasitas back up bandwith di setiap Perangkat Daerah di 50 Mbps pada tahun 2023 menjadi 75 Mbps di tahun 2024. Cakupan layanan Telekomunikasi ini adalah jumlah titik layanan telekomunikasi internet dan intranet berbasis fiber optik pada titik yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diantaranya pada 39 Perangkat Daerah, 12 Puskesmas, 25 Fasilitas Umum (Masjid, Pasar, Mall) dan layanan CCTV 34 titik.

   Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.4.1.1
Perbandingan Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Sukoharjo dengan Provinsi Jawa Tengah

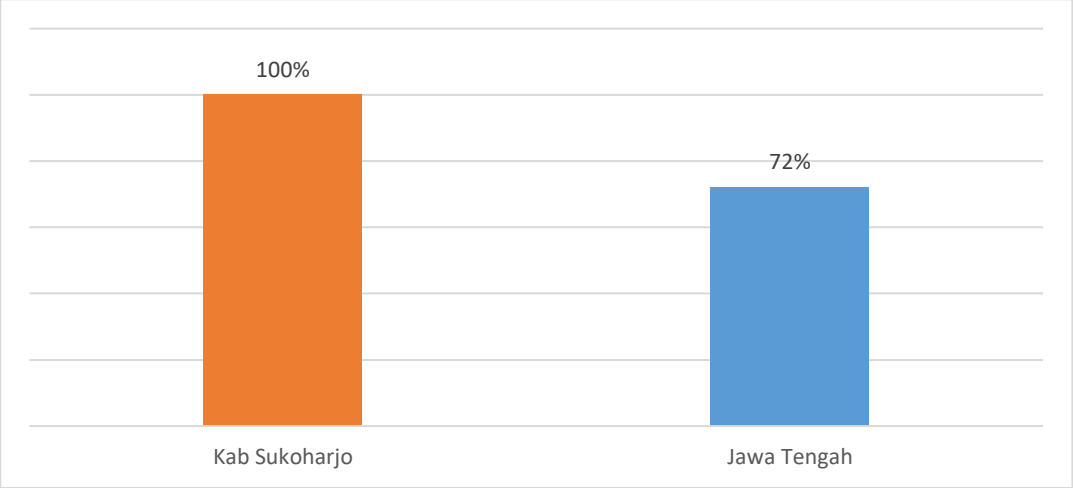

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sukoharjo

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Sukoharjo sebesar 100% lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 72%.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2024 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel III.B.4.1.5
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 4.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d 2024	Target Akhir RPJMD (2026)	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
1.	Prosentase Lingkungan Hunian Layak	%	91,63	90,81	100,90%
2.	Indeks Layanan Infrastruktur	Nilai	69,44	71,38	97,28%
3.	Indeks Fatalitas	Angka	0,06	0,250	176%
4.	Cakupan layanan telekomunikasi	%	100	100	100%
Rata-rata Capaian					**118,55%**

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target akhir yang telah ditetapkan dalam RPJMD maka rata-rata capaian sasaran 4.1 adalah **118,55%**. Adapun capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

1) Prosentase Lingkungan Hunian Layak memperoleh realisasi sebesar 91,63% dari target akhir RPJMD sebesar 90,81% sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 100,90%. Untuk diketahui tahun 2024 Rumah Layak Huni yang ditangani sebanyak 2.057 unit dimana rincian sumber dananya termuat pada tabel berikut:

Tabel III.B.4.1.6
Sumber Dana Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2024

Sumber Dana	Unit	Rupiah	Total
APBD	100	15.000.000	1.500.000.000
	2	23.000.000	46.000.000
Bantuan Keuangan	610	20.000.000	12.200.000.000
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	1.000	20.000.000	20.000.000.000
Dana Insentif Fiskal	200	15.000.000	3.000.000.000
Program Keberlanjutan Penuntasan Kemiskinan	95	15.000.000	1.425.000.000
Corporate Social Responsibility	50	15.000.000	750.000.000
Jumlah	2.057		38.921.000.000

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Sukoharjo

Berdasarkan tabel diatas, sebanyak 102 unit bersumber dari APBD, 610 unit bersumber dari Bantuan Keuangan, 1.000 unit bersumber dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, 200 unit bersumber dari Dana Insentif Fiskal, 95 unit bersumber dari Program Keberlanjutan Penuntasan Kemiskinan dan 50 unit bersumber dari CSR *(Corporate Social Responsibility).*

2) Indeks Layanan Infrastruktur memperoleh realisasi sebesar 69,44 dari target akhir RPJMD sebesar 71,38 sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 97,28%.

3) Indeks Fatalitas memperoleh realisasi sebesar 0,06 dari target akhir RPJMD sebesar 0,250 sehingga capaiannya 176% dan telah melebihi target akhir RPJMD.

4) Cakupan layanan telekomunikasi memperoleh realisasi sebesar 100% dari target akhir RPJMD sebesar 100% sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 100%.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.4.1.7
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 4.1

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur	120,71%	Rp. 244.731.318.934	Rp. 225.852.395.395	30,80

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator pada Sasaran 4.1 sebesar 120,71% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 244.731.318.934,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 225.852.395.395,- sehingga efisiensinya sebesar 30,80%.

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 4.1, melalui:

1) Prosentase Lingkungan Hunian Layak dilaksanakan pada program berikut:
   a) Program Pengembangan Perumahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 980.683.000,- terealisasi sebesar Rp. 938.555.350,- atau tercapai 95,70%;
   b) Program Kawasan Permukiman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 508.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 481.179.891,- atau tercapai 94,70%;
   c) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.190.277.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.187.686.500,- atau tercapai 99,95%;
   d) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 750.250.000,- terealisasi sebesar Rp. 742.208.800,- atau tercapai 98,93%;
   e) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.794.239.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.428.458.807,- atau tercapai 93,69%.
2) Indeks Layanan Infrastruktur dilaksanakan pada program berikut:
   a) Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.610.961.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 2.563.818.500,- atau tercapai 55,60%;

b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 908.726.900,- dan terealisasi sebesar Rp 745.179.160,- atau tercapai 82,00%;

c) Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan alokasi anggaran sebesar Rp 11.591.635.000,- dan terealisasi sebesar Rp 10.411.679.128,- atau tercapai 89,82%;

d) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.228.075.100,- dan terealisasi sebesar Rp 6.993.194.500,- atau tercapai 96,75%;

e) Program Penataan Bangunan Gedung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 38.139.979.600,- dan terealisasi sebesar Rp 35.156.593.500,- atau tercapai 92,18%;

f) Program Penyelenggaraan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 100.536.217.700,- dan realisasi sebesar Rp 90.833.350.990,- atau tercapai 90,35%.

3) Indeks Fatalitas dilaksanakan pada program berikut:

a) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 41.294.857.967,- dan terealisasi sebesar Rp 40.137.179.595,- atau tercapai 97,20%;

b) Program Pengelolaan Perekeretaapian dengan alokasi anggaran sebesar Rp 750.164.000,- dan terealisasi sebesar Rp 699.265.513,- atau tercapai 93,22%.

4) Cakupan layanan telekomunikasi dilaksanakan pada Program Aplikasi Informatika melalui Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota pada sub kegiatan Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.152.572.067,- dan realisasi sebesar Rp 3.137.466.368,- atau tercapai 99,52%.

b. Sasaran 4.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan.

Pencapaian kinerja sasaran 4.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan, tercermin pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.B.4.2.1
Capaian Kinerja Sasaran 4.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Realisasi 2023	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	51	53,72	105,33%	52,79	104,31%
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	87,24	89,47	102,56%	87,32	102,54%
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	31,09	32,67	105,08%	31,14	105,05%
4.	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,6	0,63	105%	0,63	126%
Rata-rata Capaian					**104,49%**		**109,48%**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **Sasaran 4.2**, yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan, sehingga rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar **104,49%** sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik.** Adapun hasil pengukuran kinerja Sasaran 4.2 dapat dilihat bahwa:

1) Indeks Kualitas Air (IKA) terealisasi 53,72 pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 105,33%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaiannya sebesar 104,31%.
2) Indeks Kualitas Udara (IKU) terealisasi 89,47 pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 102,56%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaiannya sebesar 102,54% dan telah melebihi target.
3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) terealisasi 32,67 pada tahun 2024 dengan capaian 105,08%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaiannya sebesar 105,05%.
4) Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 terealisasi 0,63 dengan capaian 105%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaiannya sebesar 126% dan telah melebihi target.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel III.B.4.2.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024
Sasaran 4.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan

No.	Indikator	Satuan	2022		2023		2024		
			Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	50,87	100,73%	52,79	104,02%	51	53,72	105,33%
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	87,26	99,96%	87,32	99,90%	87,24	89,47	102,56%
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	31,84	102,41%	31,14	100,16%	31,09	32,67	105,08%
4.	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,56	172,31%	0,63	180%	0,6	0,63	105%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa:

1) Realisasi Indeks Kualitas Air (IKA) dari tahun 2022 sampai 2024 mengalami peningkatan, tahun 2022 sebesar 50,87, tahun 2023 sebesar 52,79 dan tahun 2024 sebesar 53,72. Kenaikan Indeks Kualitas Air (IKA) disebabkan karena semaikin baiknya kualitas air sungai, dimana berdasarkan hasil pengujian terdapat 8 titik pemantauan dengan status mutu “memenuhi” dan 35 titik pemantauan dengan status mutu “tercemar ringan”. Adapun upaya yang dilakukan untuk menaikkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sebagai berikut:
   a) Menurunkan beban pencemaran melalui pemantauan kualitas badan air sungai
   b) Memperketat ijin pembuangan air limbah bagi kegiatan usaha yang berada di sekitar sungai
   c) Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL

   Selain itu pada tahun ini hasil kualitas air sungai yang dipantau tidak ada yang termasuk ke dalam kategori tercemar sedang dan berat.
2) Realisasi Indeks Kualitas Udara (IKU) dari tahun 2022 sampai 2024 mengalami peningkatan, tahun 2022 sebesar 87,26, tahun 2023 sebesar 87,32 dan tahun 2024 sebesar 89,47. Kualitas udara ambien di Kabupaten Sukoharjo sangat dipengaruhi oleh beberapa sektor atau kegiatan, diantaranya yaitu dari kegiatan transportasi, industri, permukiman dan perkantoran. Kegiatan-kegiatan tersebut berkontribusi terhadap kualitas udara ambien akibat pemakaian bahan bakar yang menghasilkan polutan CO, HC, SO2, NO2 dan partikulat. Oleh karena itu, pemantauan kualitas udara ambien di Kabupaten Sukoharjo dilakukan di sektor-sektor tersebut

meliputi 6 titik lokasi yaitu area Perumahan (Perum Jombor Permai, Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari dan Perum KORPRI, Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo), area industri (PT. RUM Kecamatan Nguter), area transportasi (Jl. Sukoharjo – Wonogiri di depan Kantor Kecamatan Nguter dan Jl. Ir. Soekarno depan Fave Hotel Solo Baru, Kecamatan Grogol) dan area perkantoran (Komplek Setda Kabupaten Sukoharjo) sehingga terdapat 12 data untuk 2 periode pemantauan, dengan parameter SO2 dan NO2. Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan dengan menggunakan metode passive sampler selama 14 x 24 jam (14 hari). Periode I dilakukan pada tanggal 21 Maret – 4 April 2024 dan Periode II dilakukan pada tanggal 3 – 17 September 2024.

Pemantauan kualitas udara ambien juga dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi 4 (empat) area yang terdiri dari area permukiman (Perum KORPRI, Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo), industri (PT. RUM Kecamatan Nguter), perkantoran/perniagaan (Komplek Setda Kabupaten Sukoharjo) dan area padat lalu lintas kendaraan bermotor (Jl. Sukoharjo – Wonogiri di depan Kantor Kecamatan Nguter). sehingga terdapat 8 data untuk 2 periode pemantauan, dengan parameter SO2 dan NO2. Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan dengan menggunakan metode passive sampler selama 14 x 24 jam (14 hari). Periode I dilakukan pada tanggal 15 – 29 Juli 2024 dan Periode II dilakukan pada tanggal 6 – 20 September 2024. Pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas udara ambien dengan menggunakan metode *passive sampler*.

3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada tahun 2022 terealisasi sebesar 31,84. Sedangkan pada tahun 2024 mendapatkan nilai 32,67. Nilai ini naik dibandingkan dengan nilai pada tahun 2023 yang mendapatkan nilai 31,14. Apabila realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 maka terjadi kenaikan sebesar 1,53 (4,91%). Hal ini disebabkan karena adanya penambahan data tutupan lahan berupa RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan) ke dalam perhitungan. Perhitungan nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) di

Kabupaten Sukoharjo dihitung dengan cara melakukan deliniasi terhadap tutupan lahan hijau berdasarkan penampakan citra satelit dengan menggunakan aplikasi Google Earth. Deliniasi merupakan upaya pembuatan garis batas untuk membentuk dan menandai sebuah objek, yang dalam hal ini yaitu batas-batas dari area tutupan lahan hijau berupa RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan tutupan vegetasi. Tutupan RTH meliputi taman kehati, taman kota, median jalan dan sempadan sungai, sedangkan tutupan vegetasi meliputi hutan negara, hutan rakyat, pekarangan dan perkebunan. Data tutupan lahan berupa hutan negara dan RHL (rehabilitasi hutan dan lahan) disediakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sedangkan data tutupan lahan lainnya dihitung berdasarkan hasil deliniasi citra satelit.

4) Indeks Ketahanan Daerah pada tahun 2022 terealisasi 0,56. Pada tahun 2023 terealisasi 0,63 dengan capaian 180%, kemudian pada tahun 2024 terealisasi sebesar 0,63 dengan capaian 105%. Hal ini disebabkan keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam penanggulangan bencana sudah mulai terbuka dan sinergi, serta masyarakat sudah menyadari pentingnya edukasi dan wawasan kebencanaan sehingga peningkatan kapasitas SDM perlu ditingkatkan.

Sedangkan untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2024 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel III.B.4.2.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD
Sasaran 4.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2024	Target Akhir RPJMD (2026)	% Capaian thd.Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	53,72	51,50	104,31%
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	89,47	87,25	102,54%
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	32,67	31,10	105,05%
4.	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,63	0,5	126%
Rata-rata Capaian					**109,48%**

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target akhir yang telah ditetapkan dalam RPJMD maka rata-rata capaian sasaran 4.2 adalah 109,48%. Adapun capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

1) Indeks Kualitas Air (IKA) memperoleh realisasi sebesar 53,72 dari target akhir RPJMD sebesar 51,50 sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 104,31%. Apabila realisasi Indeks Kualitas Air Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar maka dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar III.B.4.2.1
Perbandingan Indeks Kualitas Air Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024

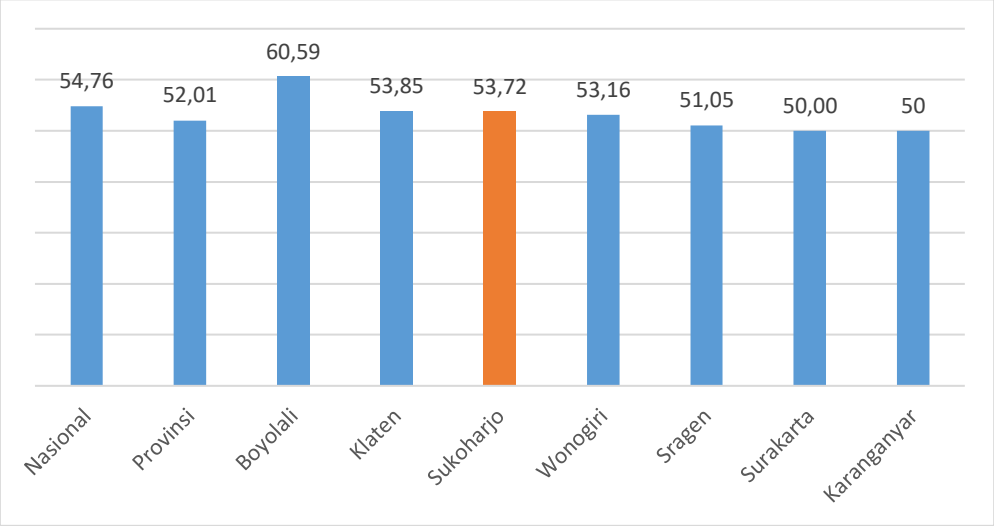

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Sukoharjo sebesar 52,72 lebih kecil dari realisasi Kabupaten Klaten sebesar 53,85; dan Kabupaten Boyolali sebesar 60,59. Meskipun demikian, IKA Kabupaten Sukoharjo lebih besar dari IKA Kabupaten Wonogiri sebesar 53,16; Kabupaten Sragen sebesar 51,05; Kota Surakarta sebesar 50 dan Kabupaten Karanganyar sebesar 50. Nilai IKA Kabupaten Sukoharjo lebih besar jika dibandingkan dengan nilai IKA Provinsi Jawa Tengah sebesar 52,01 dan lebih kecil jika dibandingkan dengan nasional sebesar 54,76.

2) Indeks Kualitas Udara (IKU) memperoleh realisasi sebesar 89,47 dari target akhir RPJMD sebesar 87,25 sehingga capaian terhadap target

akhir RPJMD sebesar 102,54%. Apabila realisasi Indeks Kualitas Air Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar maka dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar III.B.4.2.2
Perbandingan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024

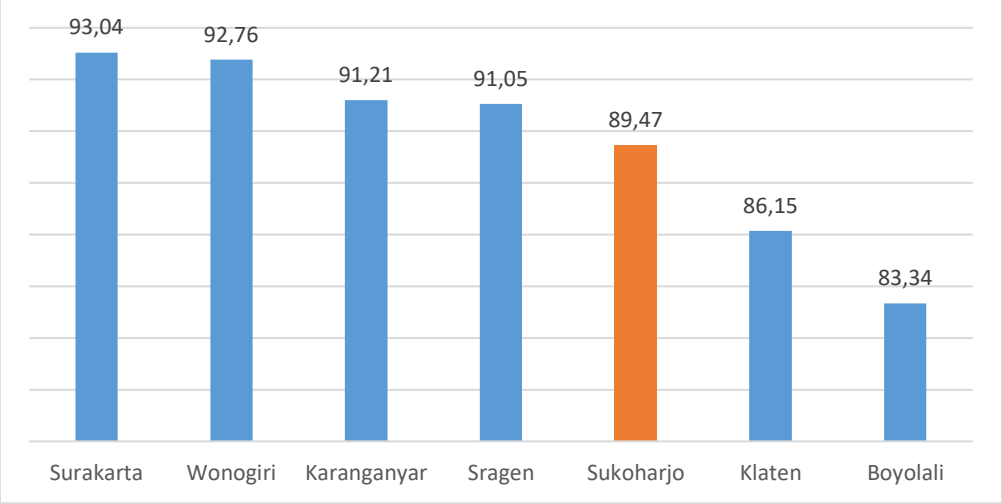

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Sukoharjo sebesar 89,47 lebih kecil dari realisasi Kota Surakarta sebesar 93,04; Kabupaten Wonogiri sebesar 92,76; Kabupaten Karanganyar sebesar 91,21; dan Kabupaten Sragen sebesar 91,05. Meskipun demikian, IKU Kabupaten Sukoharjo lebih besar dari IKU Klaten sebesar 86,15 dan Kabupaten Boyolali sebesar 83,34. Nilai IKU Kabupaten Sukoharjo lebih besar jika dibandingkan dengan nilai IKU Provinsi Jawa Tengah sebesar 88,03 dan lebih kecil jika dibandingkan dengan nasional sebesar 90,17.

3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) memperoleh realisasi sebesar 32,67 dari target akhir RPJMD sebesar 31,10 sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 105,05%. Apabila realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar maka dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar III.B.4.2.3
Perbandingan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024

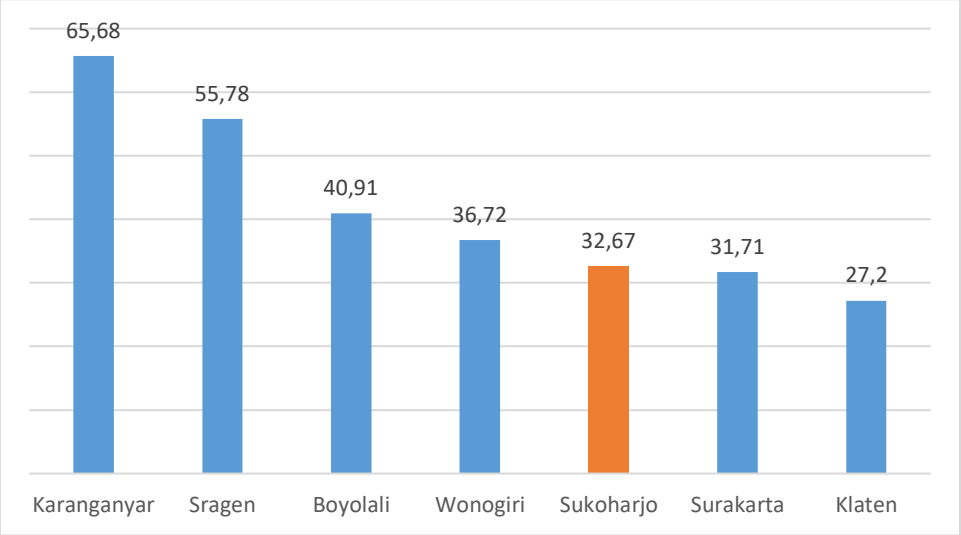

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Sukoharjo sebesar 32,67 lebih kecil dari realisasi Kabupaten Karanganyar sebesar 65,68; Kabupaten Sragen sebesar 55,78; Kabupaten Boyolali sebesar 40,91 dan Kabupaten Wonogiri sebesar 36,72. Meskipun demikian, IKTL Kabupaten Sukoharjo lebih besar dari IKTL Kota Surakarta sebesar 31,71 dan Kabupaten Klaten sebesar 27,2. Nilai IKTL Kabupaten Sukoharjo lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai IKTL Provinsi Jawa Tengah sebesar 49,26 dan lebih kecil jika dibandingkan dengan nasional sebesar 62,25.

4) Indeks Ketahanan Daerah memperoleh realisasi sebesar 0,63 dari target akhir RPJMD sebesar 0,5 sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 126%. Apabila realisasi Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Sekitar maka dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar III.B.4.2.4
Perbandingan Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota sekitar Tahun 2024

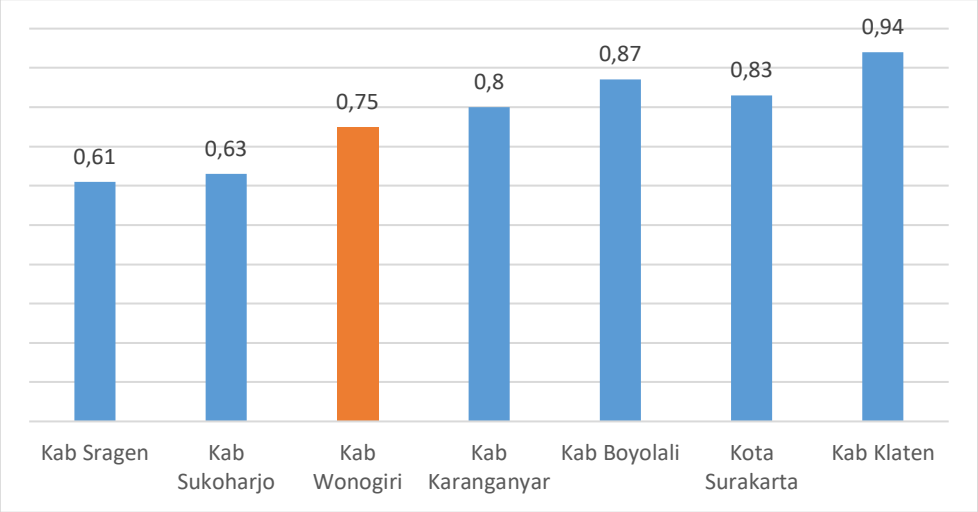

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar 0,63 melebihi realisasi Kabupaten Sragen sebesar 0,61. Meskipun demikian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Sukoharjo lebih kecil dari Kabupaten Wonogiri sebesar 0,75; Kabupaten Karanganyar 0,8; Kabupaten Boyolali sebesar 0,87; Kota Surakarta sebesar 0,83; dan Kabupaten Klaten sebesar 0,94.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.4.2.4
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 4.2

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	104,49%	Rp. 8.800.365.000	Rp. 8.511.273.953	8,04

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator pada Sasaran 4.2 sebesar 104,49% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.800.365.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.511.273.953,- sehingga efisiensinya sebesar 8,04%.

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 4.2 bersumber dari:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup melalui Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.811.960,- atau 98,12%.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup melalui Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 550.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 544.401.879,- atau 98,98%.
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) melalui Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.953.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.907.444.948,- atau 99,08%;
4. Program Penanggulangan Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.434.949.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.401.942.914,- atau 97,70%; Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.852.416.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.647.672.252- atau 88.95 %.

5) Tujuan kelima : Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2024, maka pencapaian kinerja untuk tujuan adalah sebagai berikut:

Tabel III.B.5
Capaian Kinerja Tujuan 5
Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman

No.	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2024			% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
				Realisasi	Capaian	Realisasi 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum	%	87,97	90,37	102,73%	88,70	102,11%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan 5, yaitu Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman, capaian kinerja tujuan mencapai **102,11%**, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**. Mengacu pada hasil pengukuran di atas terlihat bahwa pada indikator Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum dari target sebesar 87,97 realisasinya 90,37 atau capaiannya sebesar 102,73%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaiannya telah mencapai 102,11%.

Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum merupakan indikator Tujuan yang merupakan penjumlahan dari indikator penegakan Perda/Perkada, Persentase Penyelesaiaan Gangguan Tibum Tranmas dan Angka Kriminalitas yang tertangani. Adapun realisasi yang diperoleh berdasarkan data pada tabel di bawah ini:

Tabel III.B.5.1
Realisasi Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum

No.	Indikator	Target	Realisasi
1.	Persentase Penegakan PERDA	97,50	96,96
2.	Persentase Penyelesaiaan Gangguan Tibum Tranmas	98,40	98,51
3.	Angka Kriminalitas yang tertangani	68,00	75,63
	Rata-rata	**87,97**	**90,37**

Sumber : Satpol PP Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Persentase Penegakan PERDA terealisasi sebesar 96,96 dari target 97,50; Persentase Penyelesaian Gangguan Tibum Tranmas terealisasi sebesar 98,51 dari target 98,40; dan Angka Kriminalitas yang tertangani terealisasi sebesar 75,63 dari target 68,00. Persentase Penanganan Gangguan Keamanan,

Ketentraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum diperoleh dari rata-rata ketiga indikator tersebut, sehingga realisasinya sebesar 90,37 pada tahun 2024.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan 2 sasaran strategis, yaitu:

a. Sasaran 5.1 Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat

Pencapaian kinerja pada sasaran 5.1 Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat, tercermin pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.B.5.1.1
Capaian Kinerja Sasaran 5.1 Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Realisasi 2023	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	91,49	91,37	99,87%	91,24	99,42%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 5.1, yaitu Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator kinerja Cakupan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terealisasi pada tahun 2024 sebesar 91,37 % dari target 91,49 %. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja telah mendekati dari target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja pada sasaran ini sebesar **99,87 %** sehingga dapat dikategorikan **Baik**.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel III.A.5.1.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024
Sasaran 5.1 Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat

No.	Indikator	Satuan	2022		2023		2024		
			Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cakupan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	90,83	100,12%	91,24	100,14%	91,49	91,37	99,86%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Cakupan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dari tahun 2022 sampai 2024 mengalami peningkatan, tahun 2022 sebesar 90,83, tahun 2023 sebesar 91,24 dan tahun 2024 sebesar 91,37. Cakupan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan indikator Sasaran yang merupakan penjumlahan dan pembobotan dari indikator penegakan Perda/Perkada, penanganan gangguan Trantibum/ penyelesaian pelanggaran K3, dan persentase satlinmas terlatih serta cakupan pelayanan bencana kebakaran, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel III.B.5.1.3
Cakupan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

No.	Indikator	Target	Realisasi
1.	Persentase penegakan Perda dan Perkada	97,50	96,96
2.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Ketentraman dan Keindahan (K3)	98,40	98,51
3.	Prosentase Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) terlatih	58	58
4.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	95,50	95,50
	Rata-rata	**91,49**	**91,37**

Sumber : Satpol PP Kabupaten Sukoharjo

Pencapaian kinerja tersebut dapat sesuai dengan target karena didukung oleh SDM dan Sarana Prasarana yang memadai, koordinasi dan komunikasi lintas sektoral yang harmonis dan peran serta partisipasi masyarakat yang baik dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2024 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel III.B.5.1.4
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 5.1 Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2024	Target Akhir RPJMD	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
1	Cakupan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	91,37	91,90	99,42%

Berdasarkan tabel di atas, Cakupan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat memperoleh realisasi 91,37 dari target akhir RPJMD sebesar 91,90 sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 99,42%.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.5.1.5
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 5.1

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	99,87%	Rp. 27.132.401.954	Rp. 25.212.470.272	7,47

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator pada Sasaran 5.1 sebesar 99,87% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.132.401.954,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.212.470.272,- sehingga efisiensinya sebesar 7,47%.

Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran 5.1 yaitu:

1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.928.932.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.206.471.400,- atau 95,16 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 722.460.600,- atau 4,84%.
2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 2.471.207.050,- terealisasi sebesar Rp. 2.381.569.608,- atau 96,37% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 89.637.442,- atau 3,63%.

3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.732.262.904,- terealisasi sebesar Rp. 8.624.429.264,- atau 88,62% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.107.833.640,- atau 11,38 %.

b. Sasaran 5.2 Meningkatnya Kesatuan Bangsa Dan Bernegara

Pencapaian kinerja pelayanan dengan sasaran 5.2 Meningkatnya Kesatuan Bangsa Dan Bernegara, tercermin pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.B.5.2.1
Capaian Kinerja Sasaran 5.2
Meningkatnya Kesatuan Bangsa Dan Bernegara

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Realisasi 2023	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara	%	82	82	**100%**	80	**94,25%**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran 5.2,** yaitu : Meningkatnya Kesatuan Bangsa Dan Bernegara, dengan indikator kinerja Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara terealisasi pada tahun 2024 sebesar 82% dari target 82%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran ini sebesar **100%** sehingga dapat dikategorikan **Baik**.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel III.B.5.2.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024
Sasaran 5.2 Meningkatnya Kesatuan Bangsa Dan Bernegara

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
			Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3			4	5	6	7	8
1.	Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara	%	78	100%	80	100%	82	82	100%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara dari tahun 2022 sampai 2024 mengalami peningkatan, tahun 2022 sebesar 78, tahun 2023 sebesar 80 dan tahun 2024 sebesar 82. Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan indikator yang diperoleh dari rata-rata dari indikator berikut: Persentase masyarakat yang telah mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan; Presentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu; dan Presentase kegiatan kerukunan umat beragama.

Adapun penyebab keberhasilan kinerja yaitu:

1) Adanya dukungan sumber daya manusia yang tergabung dalam Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), FPK dan Tim Penanganan Konflik Sosial (PKS) turut berperan dalam penyerapan informasi, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan kepada penyelenggara forum terkait kondisi Kabupaten Sukoharjo, menyangkut aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan;
2) Tingginya minat dan antusias masyarakat dalam mengikuti pendidikan politik dan diharapkan para masyarakat/ peserta yang telah mengikuti pendidikan tersebut dapat menjadi agen pendidikan politik bagi lingkungan sekitarnya.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2024 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel III.B.5.2.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 5.2 Meningkatnya Kesatuan Bangsa Dan Bernegara

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2024	Target Akhir RPJMD (2026)	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
1.	Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara	%	82	87	94,25%

Berdasarkan tabel di atas, Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara memperoleh realisasi 82 dari target akhir RPJMD sebesar 87 sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 94,25%.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.5.2.4
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 5.2

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kesatuan Bangsa Dan Bernegara	100%	Rp. 40.958.901.000	Rp. 40.361.347.103	1,48

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator pada Sasaran 5.1 sebesar 100% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.958.901.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 40.361.347.103,- sehingga efisiensinya sebesar 1,48%.

Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran 5.2 diatas yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.599.733.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.337.795.576,- atau tercapai 92,72% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 261.937.424,- atau 7,28%.
2) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.843.170.000- dan terealisasi sebesar Rp 1.791.179.325,- atau tercapai 97,18% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 51.990.675,- atau 2,82%.
3) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25.555.176.000,- dan terealisasi sebesar Rp 25.548.205.250,- atau tercapai 99,97% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 6.970.750,- atau 0,03%.
4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.619.661.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.471.291.000,- atau

tercapai 94,34% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 148.370.000,- atau 5,66%.

5) Program Pembinaan dan Pengambangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 856.550.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 833.158.500,- atau tercapai 97,27% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 23.391.500,- atau 2,73%.

6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.484.611.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.379.717.452,- atau tercapai 98,38% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 104.893.548,- atau 1,62%.

C. Capaian IKU, Anggaran dan Realisasi

Tabel III.C.1
Capaian IKU, Anggaran dan Realisasi

No.	IKU	Capaian IKU (%)	Anggaran	Realisasi
1	**Indek Reformasi Birokrasi (IRB)**	**118,21%**		
1.1.a	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	103,66%	Rp. 140.318.000	Rp.135.841.389
1.1.b	Sistem Pemerintahan Bebasis Elektronik (SPBE)	102,30%	Rp. 277.500.000	Rp. 273.598.880
1.1.c	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	89,25%	Rp. 175.538.000	Rp.171.863.458
1.1.d	Indek Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	64,82%	Rp. 422.566.200.037	Rp. 415.939.833.202
1.1.e	Indeks Sistem Merit (ISM)	100%	Rp. 37.168.571.600	Rp.31.830.507.204
1.1.f	Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	116,89%	Rp. 140.318.000	Rp.135.841.389
2.a	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**100,81%**		
2.b	**Angka Kemiskinan**	**101,71%**		
2.1.a	Angka Harapan Hidup (AHH)	100,18%	Rp. 437.317.341.102	Rp. 413.302.808.999
2.2.a	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	101,62%	Rp.151.091.409.778	Rp. 147.427.279.449
2.2.b	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	100%	Rp. 259.000.000	Rp. 259.000.000
2.3.a	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	140,23%	Rp. 13.265.813.000	Rp. 12.927.037.149
2.4.a	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	100%	Rp. 998.509.000	Rp. 996.804.010
2.4.b	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	111,29%	Rp. 290.000.000	Rp. 288.695.000
2.5.a	Angka Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya	145,14%	Rp. 5.291.631.500	Rp. 5.034.582.238
2.6.a	Persentase Penduduk Miskin Perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2)	69,76%	Rp. 385.855.000	Rp. 384.553.000
2.6.b	Persentase Penduduk Miskin Perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2)	109,82%	Rp. 856.102.600	Rp. 854.622.598

No.	IKU	Capaian IKU (%)	Anggaran	Realisasi
3.a	**Pertumbuhan Ekonomi**	**101,43%**		
3.b	**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**	**120,13%**		
3.c	**Pendapatan perkapita**	**106,37%**		
3.1.a	Pertumbuhan Wirausaha Baru	226,14%	Rp. 2.190.675.520	Rp. 2.124.293.084
3.1.b	Pertumbuhan Usaha Mikro Ke Usaha Kecil	174,29%	Rp. 380.449.700	Rp. 378.910.312
3.1.c	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	99,06%	Rp. 8.833.685.436	Rp. 8.693.387.888
3.1.d	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	63,24%	Rp. 513.198.000	Rp. 509.774.776
3.1.e	Pertumbuhan investasi	-177,15%	Rp. 568.745.000	Rp. 471.701.014
3.1.f	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, dan Perikanan	47,86%	Rp. 20.287.277.198	Rp. 17.084.528.296
3.1.g	Skor Pola Pangan Harapan	100,11%	Rp. 5.663.577.000	Rp. 5.241.122.000
3.1.h	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota	75,64%	Rp. 319.000.000	Rp. 316.360.200
3.2.a	Indeks Desa Membangun (IDM)	103,22%	Rp. 23.294.579.200	Rp. 22.396.578.793
4.a	**Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)**	**108,05%**		
4.b	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**103,70%**		
4.c	**Indeks Resiko Bencana (IRB)**	**121,05%**		
4.1.a	Prosentase Lingkungan Hunian Layak	108,18%	Rp. 13.223.549.000	Rp. 12.778.089.348
4.1.b	Indeks Layanan Infrastruktur	98,09%	Rp. 163.015.595.800	Rp. 146.703.815.778
4.1.c	Indek Fatalitas	176,56%	Rp. 42.045.021.967	Rp. 40.836.445.108
4.1.d	Cakupan layanan telekomunikasi	100%	Rp. 3.152.572.967	Rp. 3.137.466.368
4.2.a	Indeks Kualitas Air (IKA)	105,33%	Rp. 10.000.000	Rp. 9.811.960
4.2.b	Indeks Kualitas Udara (IKU)	102,56%	Rp. 550.000.000	Rp. 544.401.879
4.2.c	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	105,08%	Rp. 4.953.000.000	Rp. 4.907.444.948
4.2.d	Indeks Ketahanan Daerah	105%	Rp. 3.287.365.000	Rp. 3.049.615.166
5.a	**Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum**	**102,73%**		
5.1.a	Cakupan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	99,87%	Rp. 27.132.401.954	Rp. 25.212.470.272
5.1.b	Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara	100%	Rp. 40.958.901.000	Rp. 40.3611.347.103

*Anggaran yang berorientasi langsung pada pencapaian indikator kinerja utama

D. Akuntabilitas Keuangan

1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

Berdasarkan analis capaian kinerja dan penggunaan sumber daya sebagaimana telah diuraikan pada subbab terdahulu, maka simpulan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran untuk masing-masing sasaran strategis adalah sebagimana tabel di bawah ini:

Tabel III.D.1
Perbandingan Capaian Indikator dan Prosentase Realisasi Anggaran

Tujuan	Sasaran	Indikator	Rata-rata % Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran
1. Terwujudnya tata kepemerintahan yang profesional		**Indek Reformasi Birokrasi (IRB)**	**118,,21%**	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,16%	97,40%
		Sistem Pemerintahan Bebasis Elektronik (SPBE)		
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)		
		Indek Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)		
		Indeks Sistem Merit (ISM)		
		Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik		
2. Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter		**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**101,26%**	
		Angka Kemiskinan		
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	100,18%	94,51%
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	100,81%	97,45%
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
	Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	140,23%	97,45%
	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	105,64%	99,77%
		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		
	Meningkatnya kearifan budaya lokal	Angka Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya	145,14%	95,14%
	Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin	Persentase Penduduk Miskin Perkotaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin)	89,79%	99,78%
		Persentase Penduduk Miskin Perdesaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin)		
3. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Insklusif		**Pertumbuhan Ekonomi**	**109,31%**	
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		
		Pendapatan perkapita		

Tujuan	Sasaran	Indikator	Rata-rata % Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran
	Meningkatnya pertumbuhan produktifitas	Pertumbuhan Wirausaha Baru	76,15%	89,84%
		Pertumbuhan Usaha Mikro Ke Usaha Kecil		
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan		
		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri		
		Pertumbuhan investasi		
		Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan		
		Skor Pola Pangan Harapan		
		Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota		
	Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	103,22%	96,15%
4. Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan		**Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)**	**110,93%**	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
		Indeks Resiko Bencana (IRB)		
	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Prosentase Lingkungan Hunian Layak	120,71%	92,29%
		Indeks Layanan Infrastruktur		
		Indek Fatalitas		
		Cakupan layanan telekomunikasi		
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Air (IKA)	104,49%	96,72%
		Indeks Kualitas Udara (IKU)		
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)		
		Indeks Ketahanan Daerah		
5. Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman		**Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum**	**102,73%**	
	Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	99,87%	92,92%
	Meningkatnya Kesatuan Bangsa Dan Bernegara	Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara	100%	98,54%

2. Realisasi Anggaran

Kebijakan umum pengelolaan keuangan Kabupaten Sukoharjo dalam Tahun Anggaran 2024 meliputi Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah dan Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan

Daerah. Kebijakan tersebut dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel III.D.2
Ringkasan APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2024 (unaudited)

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
I.	**Pendapatan**	**2.190.025.468.523,00**	**2.241.420.563.371,00**	**102,35**
	1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	**486.633.326.543,00**	**553.602.937.171,00**	**113,76**
	2. Pendapatan Transfer	**1.703.392.141.980,00**	**1.687.817.626.200,00**	**99,09**
	3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II.	**Belanja**	**2.463.984.324.894,00**	**2.350.492.492.454,00**	**95,39**
	1. Belanja Operasi	**1.800.864.626.902,00**	**1.709.135.538.150,00**	**94,91**
	2. Belanja Modal	**255.097.444.335,00**	**234.714.674.156,00**	**92,01**
	3. Belanja Tidak Terduga	**2.511.985.817,00**	**250.222.728,00**	**9,96**
	4. Belanja Transfer	**405.510.267.840,00**	**406.392.057.420,00**	**100,22**
	Surplus/ defisit	**273.958.856.371,00**	**109.071.929.083,00**	**39,81**
III.	**Pembiayaan**	**273.958.856.371,00**	**283.638.209.105,00**	**103,53**
	1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	**289.958.856.371,00**	**299.638.209.105,00**	**103,34**
	2. Pengeluaran Pembiayan Daerah	**16.000.000.000,00**	**16.000.000.000,00**	**100,00**
	Pembiayaan Netto	**273.958.856.371,00**	**283.638.209.105,00**	**103,53**
	Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Tahun Berkenan	**0,00**	**174.566.280.022,00**	**0,00**

Sumber : BPKPAD Kabupaten Sukoharjo

Uraian rinci kebijakan umum pengelolaan keuangan tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah di dikelompokkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Arah kebijakan umum pendapatan daerah adalah upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan dari berbagai sumber keuangan daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan wujud dari partisipasi langsung masyarakat dalam mendukung proses pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berupaya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan. Intensifikasi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sistem pengelolaan pendapatan daerah, melalui melalui peningkatan ketersediaan data berupa studi potensi pendapatan dan peningkatan mutu pelayanan. Ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan pengembangan jenis pajak dan retribusi dengan cara penggalian dan pendataan obyek pajak dan retribusi yang belum terjaring/digali dan dimungkinkan dapat dikenai pajak serta didukung dengan Peraturan Daerah.

Peningkatan kinerja pendapatan daerah dapat ditempuh melalui kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah tahun 2024 yang meliputi:

1. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini dan jalinan Kerjasama yang baik dengan *stake-holder* (BUMDes dalam pemungutan PBB-P2)
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan objek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
3. Inventarisasi, optimalisasi, dan pemberdayaan/revitalisasi asset daerah untuk peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan daerah.
4. Optimalisasi hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.

Target Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2024 yang dituangkan dalam APBD Kabupaten Sukoharjo sebelum dan setelah perubahan APBD adalah sebagai berikut :

Tabel III.D.3
Kebijakan Pendapatan – Target Pendapatan
Tahun 2024

Uraian	Target PAD (Rp)	Pendapatan Transfer	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Sebelum Perubahan APBD	484.133.326.543,00	1.684.254.780.000,00	0,00
Setelah Perubahan APBD	486.633.326.543,00	1.703.392.141.980,00	0,00
Kenaikan(Penurunan)	2.500.000.000,00	19.137.361.980,00	0,00

Sumber : BPKPAD Kabupaten Sukoharjo

B. Target dan Realisasi Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, target pendapatan ditetapkan sebesar **Rp 2.190.025.468.523**,- realisasi atas target pendapatan tersebut adalah **Rp 2.241.420.563.371,00** dan realisasi untuk pendapatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel III.D.4
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah (*unaudited*)
Tahun Anggaran 2024

	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
I	**Pendapatan**	**2.190.025.468.523,00**	**2.241.420.563.371,00**	102,35
1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**486.633.326.543,00**	**553.602.937.171,00**	**113,76**
	a. Pajak Daerah	275.850.000.000,00	325.763.944.615,00	118,09
	b. Retribusi Daerah	53.619.835.232,00	61.113.222.225,00	113,98
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	42.298.309.636,00	42.298.309.636,00	100,00
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	114.865.181.675,00	124.427.460.695,00	108,32
2	**Pendapatan Transfer**	**1.703.392.141.980,00**	**1.687.817.626.200,00**	**99,09**
	a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.475.873.626.380,00	1.475.220.471.981,00	99,96
	1) Dana Perimbangan	1.294.460.963.380,00	1.289.812.978.981,00	99,64
	2) Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00
	3) Dana Desa	158.952.647.000,00	162.947.477.000,00	102,51
	4) Insentif Fiskal	22.460.016.000,00	22.460.016.000,00	100,00
	b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	227.518.515.600,00	212.597.154.219,00	93,44
3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a. Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKPAD Kabupaten Sukoharjo

Keberhasilan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2024 ditunjukkan oleh realisasi yang mencapai 113,76% atau sebesar Rp 553.602.937.171,00. Berdasarkan tabel III.B.4 Pajak daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan penyumbang terbesar PAD. Rincian dari pendapatan Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel III.D.5
Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00
2	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00
3	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Reklame	6.000.000.000,00	6.512.758.381,00	108,55
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00
6	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00
7	Pajak Air Tanah	2.500.000.000,00	2.695.822.527,00	107,83
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	350.000.000,00	693.396.714,00	198,11
9	PBBP2	40.000.000.000,00	47.066.566.066,00	117,67
10	BPHTB	81.000.000.000,00	110.194.825.569,00	136,04
11	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	146.000.000.000,00	158.094.552.858,00	108,28
Jumlah		**486.633.326.543,00**	**553.602.937.171,00**	**113,76**

Sumber : BPKPAD Kabupaten Sukoharjo

C. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan umum Belanja Daerah dalam pencapaian sasaran dalam RKPD Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Pemilihan Umum khususnya Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, dan/atau ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

Stabilitas Sistem Keuangan, maka Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 diarahkan pada:

a. Pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha utamanya UMKM dan IKM yang terdampak;
b. Pemulihan perekonomian masyarakat terdampak diantaranya pada sektor ketenagakerjaan dan daya beli masyarakat;
c. Fokus pada upaya penanganan masalah sosial dan kemisikinan;
d. Fokus pada upaya kesehatan masyarakat dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
e. Memenuhi alokasi prosentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20% fungsi pendidikan dan 10% fungsi Kesehatan. Sedangkan mandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi dan kemampuan keuangan daerah;
f. Alokasi belanja daerah adalah untuk pemenuhan kepentingan publik dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
g. Alokasi belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat Kabupaten Sukoharjo di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan sosial dan pemerintahan umum untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sejalan dengan agenda reformasi birokrasi;

2. Target, Realisasi Belanja

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, Anggaran belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 2.463.984.324.894,00. Realisasi belanja

pada tahun 2024 adalah Rp 2.350.492.492.454,00 atau 95,39%. Rincian anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel III.D.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
I. Belanja Daerah	**2.463.984.324.894,00**	**2.350.492.492.454,00**	**95,39**
1. Belanja Operasi	**1.800.864.626.902,00**	**1.709.135.538.150,00**	**94,91**
a. Belanja Pegawai	953.299.953.483,00	911.823.685.254,00	95,65
b. Belanja Barang dan Jasa	719.158.641.969,00	672.311.280.676,00	93,49
c. Belanja Subsidi	706.000.000,00	632.535.549,00	89,59
d. Belanja Hibah	110.965.931.450,00	107.657.436.671,00	97,02
e. Belanja bantuan Sosial	16.734.100.000,00	16.710.600.000,00	99,86
2. Belanja Modal	**255.097.444.335,00**	**234.714.674.156,00**	**92,01**
a. Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.882.522.695,00	57.057.488.669,00	93,72
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.184.846.290,00	68.487.478.404,00	94,88
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	117.571.756.700,00	104.768.565.884,00	89,11
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.458.318.650,00	4.401.141.199,00	98,72
3. Belanja Tidak Terduga	**2.511.985.817,00**	**250.222.728,00**	**9,96**
4. Belanja Transfer	**405.510.267.840,00**	**406.392.057.420,00**	**100,22**
a. Belanja Bagi Hasil	37.441.605.000,00	37.331.519.000,00	99,71
b. Belanja Bantuan Keuangan	368.068.662.840,00	369.060.538.420,00	100,27
II. Pembiayaan	**273.958.856.371,00**	**283.638.209.105,00**	**103,53**
1. Penerimaan Pembiayaan	289.958.856.371,00	299.638.209.105,00	103,34
2. Pengeluaran Pembiayaan	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	100,00
a. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
b. Penyertaan Modal Daerah	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	100,00

Sumber : BPKPAD Kabupaten Sukoharjo

E. Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Adapun data peta jabatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel III.E.1
Jumlah Bezzeting dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

No	OPD	BEZZETING	KEBUTUHAN	SELISIH
1	Sekretariat Daerah	132	299	-167
2	BKPSDM	47	79	-32
3	BPKPAD	76	182	-106
4	BAPPERIDA	28	80	-52
5	Badan Kesbangpol	19	61	-42
6	Dinas Sosial	25	73	-48
7	Dinas Pangan	21	49	-28
8	DPMD	26	61	-35
9	Disporapar	24	58	-34
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	75	339	-264
11	DPUPR	122	248	-126
12	Dispernaker	30	101	-71
13	Dinas PM dan PTSP	28	112	-84
14	Diskominfo	34	109	-75
15	Dinas Kesehatan	1679	2796	-1117
16	Dinas Perhubungan	44	207	-163
17	DPKP	35	93	-58
18	Dinas PPKB dan P3A	20	58	-38
19	Dinas LH	85	201	-116
20	Diskopumdag	78	311	-233
21	Dispertan dan Perikanan	156	276	-120
22	Satpol PP	61	264	-203
23	BPBD	10	42	-32
Jumlah		**4690**	**9329**	**-4639**

**OPD yang berorientasi langsung pada pencapaian indikator kinerja utama*

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 sebanyak 4.690 orang. Jika dibandingkan dengan kebutuhan sebanyak 9.329 orang, terdapat selisih sebanyak -4.639 orang. Meskipun terdapat selisih sumber daya manusia yang banyak, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mampu memperoleh rata-rata capaian kinerja **99,06%**, dengan kategori **Baik.**

F. Penghargaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Selama tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang berhasil diraih. Adapun daftar penghargaan dan prestasi yang berhasil dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel III.F.1
Penghargaan dan Prestasi yang diraih Tahun 2024

No.	NAMA PENGHARGAAN	PENERIMA	INSTANSI PEMBERI	TINGKAT
1.	Penghargaan Ibangga Tingkat Nasional	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Nasional
2.	Penghargaan Wahana Tata Nugraha	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Kementerian Perhubungan	Nasional
3.	Penghargaan Hub Awards Nominasi Transportasi Berkelanjutan Kategori Kabupaten Besar	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Kementerian Perhubungan	Nasional
4.	Produktivitas Padi Tertinggi Kedua Tingkat Nasional	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Kementerian Pertanian RI	Nasional
5.	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Terbaik Pada Kategori Kabupaten	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi	Nasional
6.	JDIH Award 2024	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia	Nasional
7.	Penghargaan Kabupaten peduli HAM	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia	Nasional
8.	Penghargaan Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia	Nasional
9.	Penghargaan Subroto 2024	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI	Nasional
10.	Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penylenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Ombudsman Republik Indonesia	Nasional
11.	Opini Wajar Tanpa Pengecualian	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	BPK RI	Nasional
12.	Innovative Government Award (IGA)	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Kementerian Dalam Negeri	Nasional
13.	Universal Health Coverage (UHC) Awards	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan	Nasional

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo

BAB IV
PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sub sistem dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu suatu instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Sebagai bahan pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan kinerja, LKjIP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 memuat informasi kinerja mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026.

Pencapain sasaran strategis ini dianalisis secara mandiri (*self assessment*) dan melalui pengukuran kinerja dan dilakukan evaluasi secara mandiri (*self evaluation*). Hal ini perlu dilakukan karena kita menyadari bahwa sejumlah indikator yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran strategis belum sepenuhnya bersifat *outcome* dan sebagian masih berupa indikator keluaran (*output).*

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama, dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2024 secara keseluruhan berhasil. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 13 Sasaran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo disimpulkan bahwa 9 sasaran dikategorikan “Sangat Baik” dan 4 sasaran dikategorikan “Baik”.

Hasil ini merupakan representasi dari kinerja instansional yang ditunjukkan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yaitu : Dinas Daerah, Badan Daerah, Lembaga Lain, RSUD, Setda, Sekretariat DPRD, yang telah memberikan dukungan bagi pencapaian tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024. Adapun perincian rata-rata capaian kinerja per sasaran dan kategorinya, sebagai berikut:

Tabel IV.A.1
Prosentase Capaian Kinerja per Sasaran

Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian	Kategori
1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	6	96,16%	**Baik**
2.1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	100,18%	**Sangat Baik**
2.2 Meningkatnya kualitas pendidikan	2	100,81%	**Sangat Baik**
2.3 Meningkatnya pengendalian penduduk	1	140,23%	**Sangat Baik**
2.4 Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda	2	105,64%	**Sangat Baik**
2.5 Meningkatnya kearifan budaya lokal	1	145,14%	**Sangat Baik**
2.6 Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin	2	89,79%	**Baik**
3.1 Meningkatnya pertumbuhan produktifitas	8	76,15%	**Baik**
3.2 Meningkatnya kemandirian desa	1	103,22%	**Sangat Baik**
4.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur	4	120,71%	**Sangat Baik**
4.2 Meningkatnya kualitas lingkungan	4	104,49%	**Sangat Baik**
5.1 Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	1	99,87%	**Baik**
5.2 Meningkatnya kesatuan bangsa dan bernegara	1	100%	**Sangat Baik**

Pada tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja per indikator, dari 34 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tersebut, indikator capaian kinerjanya termasuk dalam kategori **Baik**,

Jika dilihat dari rata-rata capaian Kinerja Utama untuk 34 indikator kinerja utama dari 13 Sasaran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maka rata-rata capaian indikator untuk tahun 2024 adalah 99,06%, dengan kategori **Baik**.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Permasalahan teknis yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diantaranya :

1. Dalam pencapaian di beberapa sasaran masih jumpai adanya kendala baik berupa keterbatasan sumber daya yang ada, baik sumber daya aparatur, alokasi anggaran maupun sarana dan prasarana.
2. Permasalahan yang terkait dengan faktor ekternal seperti perubahan regulasi dari pemerintah pusat, dan faktor iklim dan cuaca serta kondisi geopolitik yang turut mempengaruhi pencapaian sasaran strategis.

Solusi pemecahan masalah yang diharapkan dapat memberikan perbaikan-perbaikan kinerja ke depan adalah:

1. Melakukan terobosan-terobosan dalam rangka menyediakan sumber daya yang memadai, seperti mengupayakan bantuan alokasi dana dari pemerintah pusat, ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan lain-lain.
2. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam setiap tahapan pelaksanan pembangunan, seperti misalnya dengan menyelenggarakan forum Perangkat Daerah.
3. Mengoptimalkan pengembangan *e-Gov* melalui pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan mulai dari *e-planning, e-budgeting,* dan *e-monev* dalam kegiatan proses penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan maupun monitoring dan evaluasi.

Pada akhir laporan ini diharapkan agar Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 ini di samping sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, agar dapat pula dimanfaatkan pula untuk :

1. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
2. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
3. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 disusun, dengan harapan informasi yang tersaji dapat meningkatkan kinerja yang telah baik dan memperbaiki kinerja yang belum optimal dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Sukoharjo, Maret 2025

BUPATI SUKOHARJO,

Hj. ETIK SURYANI, S.E, M.M.

LAMPIRAN

A. Perjanjian KInerja

BUPATI SUKOHARJO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS SANTOSA
Jabatan : Plt. Bupati Sukoharjo

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sukoharjo, 31 Oktober 2024

Plt. BUPATI SUKOHARJO,

BUPATI SUKOHARJO

AGUS SANTOSA

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	**Terwujudnya tata kepemerintahan yang profesional**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Nilai**	**72,92**
1.1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83
		2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	4,35
		3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Predikat	BB (75)
		4. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Nilai	1,646
		5. Indeks Sistem Merit	Kategori	III (307)
		6. Evaluasi kepatuhan standar pelayanan publik	Nilai	85
2.	**Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter**	**1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Nilai**	**78,66**
		2. Angka Kemiskinan	**%**	**7,6**
2.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	77,87
2.2	Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	Tahun	9,85
		2. Harapan lama sekolah (tahun)	Tahun	13,92
2.3	Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,87
2.4	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	97,32
		2. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	54,66
2.5	Meningkatnya kearifan budaya lokal	Angka partisipasi pelaku seni dan budaya	%	36

1

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
2.6	Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin	Persentase penduduk miskin perkotaan (DTKS) Desil 1 dan 2)	%	4,10
		Persentase penduduk miskin perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2)	%	2,75
3.	**Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan insklusif**	**1. Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**4,9**
		2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	**%**	**4,57**
		3. Pendapatan Perkapita	**Rp (Juta)**	**49,9**
3.1.	Meningkatnya pertumbuhan produktifitas	1. Pertumbuhan wirausaha baru	%	14
		2. Pertumbuhan usaha mikro ke usaha kecil	%	3,5
		3. Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	5,3
		4. Pertumbuhan PDRB sektor industri	%	5,74
		5. Pertumbuhan investasi	%	20
		6. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan	%	2,8
		7. Skor pola pangan harapan	%	93,8
		8. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota	%	84
3.2	Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,7698
4.	**Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan**	**1. Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)**	**Nilai**	**68,26**
		2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	**Nilai**	**61,32**
		3. Indeks Resiko Bencana	**Nilai**	**81,29**

2

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
4.1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur	1. Prosentase lingkungan hunian layak	%	84,7
		2. Indeks layanan infrastruktur	Nilai	70,79
		3. Indeks fatalitas	Angka	0,256
		4. Cakupan layanan telekomunikasi	%	100
4.2	Meningkatnya kualitas lingkungan	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	51
		2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	87,24
		3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	31,09
		4. Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,6
5.	**Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman**	**Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum**	**%**	**87,97**
5.1.	Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	91,49
5.2.	Meningkatnya kesatuan bangsa dan bernegara	Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara	%	82

	Program		Anggaran
1.1.1.1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	291.860.000,00
1.1.1.2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp.	55.096.269.000,00
1.1.2.1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.	1.604.493.485,00
1.1.2.2	Program Aplikasi Informatika	Rp.	5.497.414.322,00
1.1.3.1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp.	25.660.282.780,00
1.1.3.2	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp.	2.763.352.000,00
1.1.3.3	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp.	2.000.000.000,00
1.1.3.4	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	1.971.710.000,00
1.1.3.5	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp.	1.880.092.000,00
1.1.3.6	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp.	1.095.417.000,00
1.1.3.7	Program Pengelolaan Arsip	Rp.	184.000.000,00
1.1.3.8	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp.	30.000.000,00
1.1.4.1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	411.543.299.157,00
1.1.4.2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp.	4.186.443.000,00
1.1.4.3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp.	10.880.018.880,00
1.1.5.1	Program Kepegawaian Daerah	Rp.	3.789.524.500,00
1.1.5.2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp.	5.800.652.200,00
1.1.6.1	Program Pendaftaran Penduduk	Rp.	1.188.371.480,00
1.1.6.2	Program Pencatatan Sipil	Rp.	411.835.660,00
1.1.6.3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.	387.750.000,00
1.1.6.4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp.	32.725.900,00
2.1.1.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan UKM Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Rp.	99.270.948.988,00
2.1.1.2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Rp.	1.589.607.400,00
2.1.1.3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman	Rp.	607.273.600,00
2.1.1.4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp.	1.363.514.600,00
2.2.1	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp.	151.091.409.778,00
2.2.2	Program Pengembangan Kurikulum	Rp.	259.000.000,00
2.2.3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp.	30.000.000,00
2.2.4	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp.	453.040.000,00
2.3.1	Program Pengendalian Penduduk	Rp.	443.575.000,00
2.3.2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp.	7.781.898.000,00

	Program		Anggaran
2.3.3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp.	5.040.340.000,00
2.4.1.1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp.	366.100.000,00
2.4.1.2	Program Perlindungan Perempuan	Rp.	107.938.000,00
2.4.1.3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp.	252.670.000,00
2.4.1.4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Rp.	26.800.000,00
2.4.1.5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp.	120.000.000,00
2.4.1.6	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp.	125.000.000,00
2.4.2.1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp.	1.368.255.000,00
2.4.2.2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp.	10.184.254.000,00
2.4.2.3	Program Pengembangan Kepramukaan	Rp.	687.590.000,00
2.5.1	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp.	4.381.351.500,00
2.6.1	Program Pemberdayaan Sosial	Rp.	689.742.000,00
2.6.2	Program Rehabilitasi Sosial	Rp.	730.679.000,00
2.6.3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.	15.062.327.100,00
3.1.1	Program Perizinan Dan Pendaftaran Usaha	Rp.	11.000.000,00
3.1.2.1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp.	94.043.700,00
3.1.2.2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp.	54.500.000,00
3.1.2.3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp.	147.906.000,00
3.1.2.4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp.	815.992.260,00
3.1.2.5	Program Pemberdayaan UMKM	Rp.	1.374.683.260,00
3.1.2.6	Program Pengembangan UMKM	Rp.	84.000.000,00
3.1.3.1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	6.849.756.160,00
3.1.3.2	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp.	228.575.000,00
3.1.3.3	Program Pengembangan Ekspor	Rp.	672.100.000,00
3.1.3.4	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp.	147.601.406,00
3.1.3.5	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp.	924.652.870,00
3.1.4.1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp.	333.238.000,00
3.1.4.2	Pogram Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Rp.	47.000.000,00
3.1.4.3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp.	133.000.000,00
3.1.5.1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp.	32.500.000,00
3.1.5.2	Program Promosi Penanaman Modal	Rp.	85.000.000,00

	Program		Anggaran
3.1.5.3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp.	268.548.000,00
3.1.5.4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp.	451.245.000,00
3.1.5.5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp.	40.000.000,00
3.1.6.1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp.	3.711.372.000,00
3.1.6.2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp.	13.270.692.852,00
3.1.6.3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp.	563.037.570,00
3.1.6.4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp.	530.000.000,00
3.1.6.5	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp.	15.000.000,00
3.1.6.6	Program Penyuluhan Pertanian	Rp.	1.417.174.000,00
3.1.6.7	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp.	103.500.000,00
3.1.6.8	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp.	563.500.776,00
3.1.6.9	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp.	10.000.000,00
3.1.6.10	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp.	102.600.000,00
3.1.7.1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp.	198.337.000,00
3.1.7.2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp.	1.545.626.000,00
3.1.7.3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp.	176.430.000,00
3.1.7.4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp.	57.386.000,00
3.1.8.1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp.	25.000.000,00
3.1.8.2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	768.926.064,00
3.1.8.3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp.	319.000.000,00
3.1.8.4	Program Hubungan Industrial	Rp.	698.880.000,00
3.2.1	Program Penataan Desa	Rp.	3.718.238.000,00
3.2.2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp.	157.480.000,00
3.2.3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp.	3.490.782.800,00
3.2.4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Rp.	10.158.386.600,00
4.1.1.1	Program Kawasan Permukiman	Rp.	508.100.000,00
4.1.1.2	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp.	5.190.277.000,00
4.1.1.3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp.	750.250.000,00
4.1.2.1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp.	4.610.961.500,00
4.1.2.2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp.	908.728.900,00
4.1.2.3	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp.	11.591.635.000,00

	Program		Anggaran
4.1.2.4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp.	6.531.575.100,00
4.1.2.5	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp.	103.130.642.700,00
4.1.3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp.	41.294.857.967,00
4.2.1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp.	170.000.000,00
4.2.2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp.	1.629.775.000,00
4.2.3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rp.	5.049.200.000,00
4.2.4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp.	30.000.000,00
4.2.5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp.	85.000.000,00
4.2.6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp.	70.000.000,00
4.2.7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp.	25.000.000,00
4.2.8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp.	35.000.000,00
4.2.9	Program Pengelolaan Sampah	Rp.	14.873.340.584,00
4.2.4.1	Program Penanggulangan Bencana	Rp.	1.434.949.000,00
4.2.4.2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp.	2.471.207.050,00
5.1.1	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp.	14.928.932.000,00
5..2.1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Bangsa	Rp.	1.843.170.000,00
5..2.2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp.	25.555.176.000,00
5..2.3	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp.	856.550.000,00

Sukoharjo, 31 Oktober 2024

Plt. BUPATI SUKOHARJO

AGUS SANTOSA

PENGUKURAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian s/d 2023	Data Capaian Kinerja 2024			Target Akhir RPJMD (2026)	% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (TH 2026)	PD Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Prosentase			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Percepatan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya tata kepemerintahan yang profesional		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	72,92	72,92	86,2	118,21%	80	107,75%	SETDA
		1.1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,35	83	86,04	103,66%	85	101,22%	Bag. Organisasi
			2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	4,35	4,35	4,45	102,30%	3,84	115,89%	Diskominfo
			3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Predikat	B (65,04)	BB (75)	B (66,94)	89,25%	A (**80**-90)	83,68%	Bag. Organisasi
			4. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Nilai	1,231	1,646	1,067	64,82%	1,885	56,60%	BPKPAD
			5. Indeks Sistem Merit	Kategori	307	III (307)	III (307*)	100%	III (**250**-324)	122,8%	BKPSDM
			6. Evaluasi kepatuhan standar pelayanan publik	Nilai	97,41	85	99,36	116,89%	90	110,40%	Bag. Organisasi
		Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 1.1						**96,16%**		**98,43%**	

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian s/d 2023	Data Capaian Kinerja 2024			Target Akhir RPJMD (2026)	% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (TH 2026)	PD Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Prosentase			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	78,65	78,66	79,3	100,81%	78,40	101,14%	BAPPERIDA
			Angka Kemiskinan	%	7,58	7,6	7,47	101,71%	**7,0**-6,8	93,29%	BAPPERIDA
		2.1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	77,86	77,87	78,01	100,18%	77,90	100,14%	Dinkes
		2.2. Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	Tahun	9,84	9,85	10,01	101,62%	9,39	106,60%	Dinas P dan K
			2. Harapan lama sekolah (tahun)	Tahun	13,91	13,92	13,92	100%	13,86	100,43%	Dinas P dan K
		Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 2.2						**100,81%**		**103,52%**	
		2.3. Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,76	0,87	0,52	140,23%	0,86	139,53%	Dinas PPKB dan P3A
		2.4. Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	97,37	97,32	97,32 ***th 2023**	100%	96,55	100,79%	Dinas PPKB dan P3A
			2. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	54,66	54,66	60,83	112,29%	51,66	117,75%	Disporapar
		Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 2.4.						**105,64%**		**109,27%**	
		2.5. Meningkatnya kearifan budaya lokal	Angka partisipasi pelaku seni dan budaya	%	36	36	52,25	145,14%	35	149,28%	Dinas P dan K
		2.6. Meningkatnya Kualitas Hidup Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin Perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2)	%	6,68	4,10	5,34	69,76	4	66,5%	Dinsos

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian s/d 2023	Data Capaian Kinerja 2024			Target Akhir RPJMD (2026)	% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (TH 2026)	PD Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Prosentase			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase Penduduk Miskin Perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2)	%	0,71	2,75	2,48	109,82%	2,65	109,82%	
3. Memperkuat Perekonomian Rakyat yang Berdaya Saing Tinggi	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan insklusif		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,06	4,9	4,97	101,43%	**5,94**-6,28	83,67%	BAPPERIDA
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,40	4,57	3,65	120,13%	**4,47**-4,0	118,35%	Dispernaker
			Pendapatan Perkapita	Rp (Juta)	49,88	49,9	53,08	106,37%	49,909	106,35%	BAPPERIDA
		3.1. Meningkatnya pertumbuhan produktifitas	1. Pertumbuhan wirausaha baru	%	19,74	14	31,66	226,14%	16	197,88%	Diskopumdag
			2. Pertumbuhan usaha mikro ke usaha kecil	%	1,6	3,5	6,10	174,3%	3,70	164,9%	Diskopumdag
			3. Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	5,01	5,30	5,25	99,06%	5,60	93,75%	Diskopumdag
			4. Pertumbuhan PDRB sektor industri	%	3,23	5,74	3,63	63,24%	6,40	56,72%	Dispernaker
			5. Pertumbuhan investasi	%	-23,25	20	-35,43	-177,15%	28	-126,54%	Dinas PM dan PTSP
			6. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan	%	2,68	2,8	1,34	45,86%	3,10	43,23%	Dispertan dan Perikanan
			7. Skor pola pangan harapan	%	93,9	93,8	93,9	100,11%	93,9	100%	Dinas Pangan

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian s/d 2023	Data Capaian Kinerja 2024			Target Akhir RPJMD (2026)	% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (TH 2026)	PD Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Prosentase			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			8. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota	%	76,63	84	63,54	75,64%	85	74,75%	Dispernaker
		Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 3.1.						**76,15%**		**75,59%**	
		3.2. Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,7698	0,7698	0,7946	103,22%	0,7656	103,78%	Dinas PMD
4. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan		Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)	Nilai	67,69	68,26	73,79	108,05%	74,20	99,45%	DPUPR
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	62,03	61,32	63,59	103,70%	61,51	103,38%	Dinas LH
			Indeks Resiko Bencana	Nilai	71,27	81,29	64,18	121,05%	92,00	130,24%	BPBD
		4.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur	1. Prosentase lingkungan hunian layak	%	88,57	89	91,63	102,96%	90,81	100,90%	DPKP
			2. Indeks layanan infrastruktur	Nilai	67,55	68,76	69,44	100,99%	71,38	97,28%	DPUPR
			3. Indeks fatalitas	Angka	0,047	0,256	0,06	176,56%	0,250	176%	Dishub
			4. Cakupan layanan telekomunikasi	%	100	100	100	100%	100	100%	Diskominfo
		Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 4.1.						**120,71%**		**118,55%**	
		4.2. Meningkatnya kualitas lingkungan	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	52,79	51	53,72	105,33%	51,50	104,31%	Dinas LH

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian s/d 2023	Data Capaian Kinerja 2024			Target Akhir RPJMD (2026)	% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (TH 2026)	PD Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Prosentase			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	87,32	87,24	89,47	102,56%	87,25	102,54%	Dinas LH
			3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	31,14	31,09	32,67	105,08%	31,10	105,05%	Dinas LH
			4. Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,63	0,6	0,63	105%	0,5	126%	BPBD
		Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 4.2.						**104,49%**		**109,48%**	
5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Dan Keagamaan	Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman		Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum	%	88,70	87,97	90,37	102,73%	88,50	102,11%	SATPOL PP
		5.1. Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	91,24	91,49	91,37	99,87%	91,90	99,42%	SATPOL PP
		5.2. Meningkatnya kesatuan bangsa dan bernegara	Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara	%	80	82	82	100%	87	94,25%	Badan Kesbangpol